

Jurnal Hubungan Internasional | Vol. 5 | No. 1 | April 2012 |
ISSN 1829-5088

JURNAL
HUBUNGAN
INTER 
NASIONAL

JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dua kali setahun pada bulan April dan November. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 sampai 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis.

Ketua Penyunting

Ade Marup Wirasenjaya, M.A

Sekretaris Penyunting

Faris Alfadh M.A

Dewan Penyunting

Prof. Dr. Tulus Warsito, M.A.
Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A.
Ali Muhammad, M.A., Ph.D.
Takdir Ali Mukhti, M.Si.
Ratih Herningtyas, S.IP., M.A.
Sugito, S.IP., M.Si.
Sidiq Ahmadi, S.IP.
Sugeng Riyanto, S.IP., M.Si.

Alamat Redaksi

Gedung E, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ringroad Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta,
Tel. 0274-387656
Email: jurnalHI@umy.ac.id

Daftar isi

- Halaman* 1 “The “English School”, Southeast Asia, and Indonesia: Locating and Defending Productive “middle ground
Linda Quayle; PhD graduand, School of Social and Political Sciences, The University of Melbourne, Australia.
- Halaman* 22 *Weak State* Sebagai Sebuah Ancaman Keamanan: Studi Kasus Kolombia
Ratih Herningtyas; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Halaman* 38 Disharmoni Negara dan Pasar dalam Rezim Neoliberal
Ade Marup Wirasenjaya; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Halaman* 51 Islamic Civil Society and Conflict Resolution Muhammadiyah Challenges Towards The Dynamics of Malaysia-Indonesia Relation
Muhammad Zahrul Anam; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Halaman* 66 Tipologi Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi
Bambang Wahyu Nugroho; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Halaman* 79 Factors Influencing Indonesian Women Becomes Migrant Workers
Mutia Hariati Hussin; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Halaman* 94 Welcome to ‘Indonesia’! Feminist Readings of “*teach yourself Indonesian*” Self-Learning Language Course
Marjaana Jauhola; Department of International Politics, Aberystwyth University.
- Halaman* 111 Relasi Antara Tingkat Konflik di Dunia Islam dengan Setting Geografi Politik (Studi Kasus Konflik di Kawasan Timur Tengah)
Surwando; Staf Pengajar FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Halaman* 123 Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama
Wahyuni Kartikasari; urusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Halaman* 140 Model Pemerintahan Dunia: Perspektif Taqyuddin An Nabani
Siti Muslikhati; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pengantar redaksi

Alhamdulillah, Jurnal Hubungan Internasional Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta edisi terbaru ini akhirnya bisa kembali terbit.

Secara perlahan tapi pasti, kami dari pengelola terus berikhtiar melakukan pembenahan dalam penerbitan jurnal ini. Kami juga terus berusaha melakukan berbagai penyesuaian dengan format jurnal yang dirancang oleh Dikti. Meskipun barangkali masih jauh mendapatkan peringkat dan skor standar dari Dikti, setidaknya kami berupaya untuk terus melakukan pembenahan baik manajemen maupun dari sisi kualitas tulisan. Sejauh ini kami masih kesulitan mendapatkan naskah. Nampaknya perlu kerjasama semua pihak untuk benar-benar membuat para penstudi hubungan internasional bisa mengirimkan tulisannya ke sebuah jurnal. Di luar itu, kehadiran jurnal yang amat khusus tentu saja akan sangat strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Para pembaca,

Edisi ini menampilkan sejumlah tulisan yang beragam, baik dari sisi isu maupun dari sisi pendekatan yang digunakan. Semua itu niscaya akan memberi gambaran tentang horison studi hubungan internasional yang terus hidup secara dinamis, dan tak jarang memunculkan fenomena tak terduga. Kami yakin tulisan-tulisan dalam volume ini akan memberi khazanah penting bagi wacana ilmu hubungan internasional.

Tentu saja volume ini masih memiliki banyak kekurangan. Kami menunggu saran dan masukannya sambil tidak lupa, kami menunggu partisipasinya untuk menulis di jurnal ini pada edisi-edisi mendatang.

Salam hangat.

Ade M Wirasenjaya
Ketua penyunting

Pedoman Penulisan

1. Artikel yang ditulis untuk JHI meliputi hasil pemikiran dan hasil penelitian dalam lingkup ilmu hubungan internasional. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dicetak pada kertas A4 sepanjang 12 sampai 20 halaman, dan diserahkan dalam bentuk prin-out sebanyak 2 eksemplar. Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word. Pengiriman file juga dapat dilakukan sebagai attachment email ke alamat jurnalHI@umy.ac.id
2. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah jusul artikel. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan di bawah judul artikel adalah nama penulis utama; nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah. Bagi naskah yang ditulis oleh sebuah tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis dianjurkan mencantumkan alamat email untuk memudahkan komunikasi.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan format esai, disertai judul pada masing-masing bagian artikel. Bagian pendahuluan disajikan tanpa judul bagian. Judul artikel dicetak dengan huruf besar di tengah-tengah, dengan poin 14. Peringkat judul bagian ditulis dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul bagian dan sub-bagian dicetak tebal atau tebal dan miring) dan tidak menggunakan angka/nomor pada judul bagian;

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar Kecil, Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil, Tebal-Miring, Rata Tepi Kiri)

4. Sistematika artikel hasil pemikiran adalah: judul, nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata); kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi ke dalam beberapa sub bagian); penutup atau kesimpulan; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk).
5. Sistematika artikel hasil penelitian adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak (maksimum 100 kata) yang berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; kata kunci; pendahuluan (tanpa judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; kesimpulan; daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk)
6. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan

penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah.

7. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Friedman, 2008: 85).
8. Daftar Rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Buku

Kristol, Irving. 1983. *Reflection of a Neoconervative: Looking Back, Looking Ahead*. New York: Free Press.

Buku kumpulan artikel

Skinner, Kiron (ed).2003. *Reagan: A Life in Letters*.New York. Free Press.

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Sutton, Frank. 2006. Nation-Building in US Foreign Relations. Dalam Francis Fukuyama (ed), *Nation-Building: Beyond Afghanistan and Iraq*. Baltimore: Jhon Hopkins University Press.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Skocpol, Theda.1977. *Wallerstein's Capitalist World System and Historical Critique*. The American Journal of Sociology, March, Vol.82, No.5.

Artikel dalam koran:

Hiarej, Erik. 2 Nopember, 2008. Terorisme dan Individualisasi Perang. *Kompas*, hlm.6.

Tulisan/berita dalam koran (tanpa nama pengarang):

Kompas. 14 November, 2008. *Korea Utara Semakin Mengisolasi Diri*, hlm.9

Dokumen resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1978. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian. Jakarta: Depdikbud. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional.1990.Jakarta: PT Armas Duta Jaya.

Buku terjemahan:

Soros, George.2000. *Open Society: Reforming Global Capitalism*. Terjemahan Sri Koesdiyantiyah.2007. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Sugito.2007. *Analisis Terhadap Misi Peacebuilding United Nations Transition Administration In East Timor (UNTAET)*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Makalah seminar, lokakarya, penataran:

Garnaut, Ross. 2008. *Indonesia and the World of Climate Change*. Makalah disajikan dalam Panglaykim Memorial Lecture. CSIS, Jakarta, 17 Oktober.

Internet (karya individual)

Ahmadi, Sidiq.2008. *Tantangan ASEAN Pasca Agreement on Transboundary Haze Pollution*. (Online), (http://www.aseansec.org/pdf/agr_haze.pdf, diakses 12 November 2008).

Internet (artikel dalam jurnal online)

Herningtyas, Ratih. 2007. *Pengaruh Internet terhadap Demokrasi*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. (Online), Jilid 2, No.4, (<http://www.umy.ac.id>, diakses 1 Januari 2008)

Internet (bahan diskusi):

Sabrina, Katy, 20 Desember 2008. CIFOS Discussion List, (Online), (CIFOS@forest-world.org., diakses 25 November 2008).

Internet (email pribadi)

Riyanto, Sugeng (umy@ac.id). 5 Oktober 2008. Artikel untuk JHI. Email kepada Siti Muslihati (siti_m@msn.com)

9. Tata cara penyajian kutipan, tabel dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Universitas Negeri Malang, 2000) atau mencontoh tata cara yang digunakan dalam artikel yang telah dimuat. Artikel berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987). Artikel berbahasa Inggris menggunakan ragam baku.
10. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (reviewer) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kompetensinya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari atau penyunting. Kepastian pemuatan dan penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis atau melalui surat elektronik (email).

“The “English School”, Southeast Asia, and Indonesia: Locating and Defending Productive “middle ground”

Linda Quayle

PhD graduand, School of Social and Political Sciences, The University of Melbourne, Australia. lcquayle@gmail.com, GPO Box 793, Melbourne, Victoria 3001, Australia

Introduction

“Theorizing” Southeast Asia (SEA) is notoriously problematic. Collections of theoretical perspectives (Acharya & Stubbs, 2006; Rüländ & Jetschke, 2008) attest to widely varying views, none of which is wholly satisfactory on its own. Realists account for the “power” elements of the SEA story, but not the “community” elements; liberals understand the institution-making impetus, but not the rather thin nature of these institutions; constructivists grasp the importance of ideas and norms, but sometimes give more weight to identity than the region can comfortably bear (Narine, 2006); left-oriented theories speak powerfully to structural constraints, but less convincingly to agential strategies. None alone can tell a story that adequately captures all these many contradictory streams and strands.

Nor is this simply an academic conundrum. All observers – activists, diplomats, government officials, television viewers – have a political lens, whether they acknowledge it or not. The difficulties of framing SEA therefore do not stay comfortably within academia. They resurface at the level of expectations, perceptions and policy, both in SEA and beyond. How SEA is seen and talked

about *matters*.

This article will suggest that the so-called “English School” (ES) of International Relations has a useful contribution to make, and is currently under-exploited. It will argue that the ES’s capacity to recognize and defend conceptual “in-between” spaces makes it a natural bridge between realist and constructivist, statist and liberal, or structural and agential interpretations. It therefore facilitates a more nuanced – and sometimes more positive – interpretation of the region’s dynamics, with implications for our understanding of both the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and Indonesia’s role within it.

It is emphatically *not* being claimed that the ES is a complete, final, stand-alone answer to the problems of interpreting SEA’s politics. But its contribution, though partial, offers a valuable alternative view, which deserves greater attention.

Furthermore, this is a two-way, open-ended conversation. As Halliday notes, using a theory to look at a region should never be a one-directional affair (2009, 2). Regions have data and political cultures from which theories can and should learn. The ES is still developing, and input from SEA can usefully influence that development. There is a synergy here that has not yet been sufficiently exploited.

The argument will be developed as follows. The first section briefly reviews the key concepts that characterize the ES’s approach to International Relations, and relates this perspective to SEA. The second section suggests two areas where ES theory, by locating some useful middle ground, can provide a different view of SEA – and, turning the tables, the equivalent areas where the theory can gain from observing ASEAN’s experience. The third repeats this process, but looks more specifically at the example of Indonesia. The fourth section evaluates the usefulness of this theoretical approach, arguing that it makes a modest but positive contribution to our overall understanding of political dynamics in SEA, but contending, too, that the theoretical framework has much to learn from continued interaction with the region.

The English School and ASEAN

Key ES ideas

The English School (ES) is best known for its concept of international society. The basic idea, Buzan explains, is quite simple: “Just as human beings as individuals live in societies which they both shape and are shaped by, so also states live in an international society which they shape and are shaped by” (2001, 477). But the international version is an anarchical society. Without a recognized “world government”, it has to rely on more complicated mechanisms for the establishment and maintenance of order. The ES’s hallmark, therefore, is an interest in the inter-state cooperation and socialization that still exist *despite* all the reasons they might be expected not to exist.

It attaches particular importance to the *institutions* that underpin that cooperation; however, it understands institutions not primarily in the sense of visible organizations, but in the sense of underlying sets of "habits and practices shaped towards the realisation of common goals" (Bull, 2002, 71). The existence of an international society therefore presupposes that a group of states have not only become aware of "common interests and common values", but also understand themselves to be "bound by a common set of rules", and share in "the working of common institutions". Bull's institutions include sovereignty, diplomacy, the balance of power, the managerial role of great powers, and international law (2002, 13, 39). However, institutions vary in accordance with the notions of legitimacy prevalent at any given time. Indeed, for Clark, it is the idea of legitimacy that makes an international society. Where there is a belief among states that they are bound to a certain set of institutions and practices, he argues, there is also an international society (2005, 23).

ES tradition, however, has never maintained that international society is the *only* dynamic at work in the world. The societal impulse shares the stage with powerful patterns of inter-state rivalry on the one hand, and various kinds of state-transcending ideology on the other. Wight's "three traditions" (realism, pragmatic internationalism, and universalism) clearly articulate a realm of political plurality (1991), and there is never any guarantee that the middle (societal) element in this conversation will survive (Bull, 2002, 39). While remaining aware of these competing strands, ES scholarship has traditionally focused on the middle-ground tradition of international society – precisely because this is the one that is most easily squeezed out by the loud voices of power and transnationalism on either side.

On a rough spectrum of ideas and theories, then, the ES's points of emphasis (on society, order, and inter-state social relations) would sit somewhere between realism (with its focus on anarchy, power, and inter-state competition) and the various transnational theories (liberal, Marxist, religious, and so on), which in different ways focus on *transcending* the state to reach emancipation in a borderless world. In its belief in the possibility of political progress, likewise, the ES sits somewhere between realism (where power patterns endlessly repeat themselves) and liberalism (which tends to the teleological). In its interpretation of power, it sits somewhere between realism (with its focus on material power) and constructivism (with its focus on ideational power).

It would be a mistake, however, to think of these categories as rigidly separated. They are more like pools of paint on a palette, which blend into each other at the edges. On a narrower theoretical spectrum – ranging, for example, from classical realism (à la Morgenthau), through ES ideas, to thin constructivism (à la Wendt) – there is considerable overlap at the edges.

It would also be a mistake to think of ES middle ground as the grey, watered-down zone of "not quite this" and "not quite that". The middle ground, as depicted by ES

scholars, is a pragmatic, creative, productive, and potentially progressive area. It is constantly under assault from political currents with more seductive slogans, but it is eminently worth defending.

Applying ES ideas to SEA

Whatever its overlaps and struggles, this middle-ground positioning allows the ES to facilitate conversations between a range of opposite polls, and this, it will be argued, is one of its major advantages in interpreting the politics of SEA.

International societies, according to ES scholars, are not all the same. “Thinner”, pluralist societies stress the values of individual state autonomy, diversity, and minimalism, while “thicker”, solidarist societies seek a more ambitious level of cooperation, in a wider range of areas, and with a higher tolerance of enforcement. ASEAN’s pluralism, for example, is often contrasted with the European Union’s solidarism.

Normatively, too, individual ES scholars also *endorse* different positions. “Pluralists” stress the virtues of gradualism, tolerance, and the preservation of diversity, while “solidarists” push for faster progress and higher goals, with the aim of more quickly reaching solutions to pressing problems. This article is written from a pluralist perspective. This is partly because that position best reflects where ASEAN currently finds itself (as will be discussed in the next section), but also because the vantage-point offered by a pluralist perspective gives better traction in isolating a distinctive ES position, and defending the middle ground that is so vital in SEA.

The ES also has interesting arguments to advance about the nature and role of non-state actors in SEA (see Quayle, forthcoming), but these are beyond the scope of the present article.

Early ES scholarship concentrated on the international society that manifested itself at a global level. More recently, however, interest has turned to “sub-global international societies” (Buzan, 2004; Buzan & Gonzalez-Pelaez, 2009; Hurrell, 2007). In this article, therefore, ASEAN will be understood as the organizational expression of a regional international society (a subfield of the global international society).

ASEAN does not technically need to exist for there to be an international society in the region. ES writers, keen not to distract attention from the *underlying* institutions of international society, tend to portray inter-governmental organizations such as ASEAN as part of its “auxiliary framework” (Jackson, 2000, 105). Of course, ASEAN as an organization is important. It plays a significant role in symbolizing “a shared commitment to fundamental international institutions and principles” (Narine, 2006, 205), and in testifying to its members’ desire to play a more demanding regional version of the international society game, in parallel with the minimal version that exists on a global level. But ASEAN is essentially a *symptom* of cooperation, not a *cause*. It is not surprising, then, that its hands are often tied. It is essentially the servant, not the master, of the international society that underlies it.

From the point of view of ES ideas, the international society observable in SEA has succeeded in identifying a number of common interests (reducing vulnerability, maintaining independence, resisting hegemonial threats inside and outside the region, protecting sovereignty, promoting economic growth, and bolstering regional order and stability) and common values (consultation, non-aggression, non-interference, and a sense of cultural distinctness). The common institutions it has formed (sovereignty, diplomacy, the pursuit of economic resilience, and socially organized balancing strategies, including the shaping of a role for great powers) reflect these interests and values, and indicate that SEA is essentially a pluralist society. The fact that many of these values and institutions are starting to shift, however, points to a society that is also investigating moves towards solidarism.

Scholarship that applies ES ideas to SEA is still fairly limited in scope. The idea that SEA can be seen as a regional international society, with ASEAN as the outward expression of some of its institutions, has been noted (Chong, 2009; Narine, 2006, 2008, 2009), as has the relevance to SEA, and to Asia more generally, of ES ideas about order (Alagappa, 2003) and power-balancing (Acharya, 2005; Emmers, 2003; Goh, 2007/08; Khong, 2005; Odgaard, 2007). Passing references note further potential connections (for example, Acharya & Buzan, 2007, 289-290; Bellamy, 2005, 23; Buzan, 2004, 238). But much more remains to be explored.

Claiming the middle ground in SEA

An ES perspective can bridge two very obvious gaps in the commentary on SEA: the realist/constructivist gap on the relative importance of the themes of power or community in the region; and the realist/liberal gap on ASEAN's community-building plans. This section will look at these in turn.

Power and community – contradiction or synergy?

It is hard to ignore a very definite power dynamic in SEA. An ever-present awareness of relative power and relative gain exists alongside a palpable sense of competition and jostling. But it is equally hard to ignore a very distinct community urge, with huge amounts of political energy expended on ASEAN processes and goals. Realist discourses tend to foreground the power narrative, and dismiss the region's community impulses as mere window-dressing. Constructivists, on the other hand, acknowledge the reality of community, but often express disappointment with the continued salience of power. Describing SEA in terms of only one of these themes is unsatisfactory. Yet theorists experience difficulty fitting both into a coherent framework.

There have been several attempts to resolve this dilemma. Some theorists have attempted to devise new theories, proposing "soft" realism (Peou, 2002, 135-136), or "realist institutionalism" (Khoo, 2004, 43-44), or "institutional realism" (He, 2006, 189, 195; 2008, 492), or "abridged realism" (Chong, 2006). But none of these solu-

tions seems to fit the bill, as this problem continues to draw scholarly attention (Chiou, 2010, 373; Nesadurai, 2009, 104). As a result, eclecticism – combining elements from multiple theories – is often suggested as the best way forward (see, for example, Batabyal, 2004, 350, 368; Ganesan, 2003).

The ES, however, intrinsically combines ideas of power and community. Its concept of power is acutely aware of the salience of material factors, but also sees power as “a social relationship” (Northedge, 1976, 20, 127). Its concept of international society encapsulates the idea that a group of states can share common goals and develop common patterns of behaviour, while not entirely turning their backs on power considerations. And the ES’s societal dynamic, as noted above, positions itself between much starker forms of power on the one hand and community on the other.

It is therefore able to draw both narratives into an integrated whole. A pluralist English School approach need not share constructivist disappointment that SEA’s states still strive for a balance of power in the region and beyond (Acharya, 2001, 184-185; 2007, 37; 2006, 39; Busse & Maull, 1999), and would see no incompatibility here with their creation of ASEAN. It need not share realist surprise that SEA’s comparatively small states attempt to manage *extra*-regional powers by enmeshing them in frameworks such as ASEAN Plus Three (APT), or the East Asia Summit (EAS), since small powers have always contributed to creating a socially-managed balance of power (Wight, 1978, 160). In ES terms, none of these forums should require states to surrender their power-awareness at the door as they enter, but each provides opportunities – for small and large powers alike – to work on identifying the common interests and values that are an essential part of societal behaviour. “Me-first” realist behaviour is certainly visible in Southeast Asia, and disputes over the South China Sea are currently bringing these to the fore, but the power strand has not – as yet, anyway – fundamentally undermined what is essentially an internationalist orientation.

As well as overcoming some of the discursive incompatibilities of realist and constructivist narratives, this ES picture encourages a recalibration of expectations. States do not have to always move in unison, or forsake all their instincts for self-preservation, to qualify for membership of international society. The concept of international society exists to explain the phenomenon of unlikely but actually existing cooperation. It can therefore readily provide a label for the activities of polities that have little practice in cooperating as sovereign states, and little incentive to trust each other, but nevertheless invest large amounts of time, money, and energy in promoting community-building activities. Rather than decrying the shortcomings of ASEAN, an ES perspective suggests modest gratification that its existence celebrates a desire and an ability to move beyond purely minimal levels of cooperation.

In this area, then, the ES has much to offer. It can capture the apparently incompatible power and community discourses in one theoretically and historically grounded

package, and provide a more modest yardstick by which to evaluate ASEAN's achievements.

The ES, however, also has much to learn from the region in this area. ES theory is still not clear on how regional international societies relate to the larger societies in which they are embedded. How does SEA's international society, for example, connect with, or nest within, its broader East Asian or Asia-Pacific counterparts? If ASEAN is the superstructure of a deeper international society, is this also true of the APT or EAS? If so, how do these various levels of international society – building from the states represented in ASEAN, up through the APT and EAS, to the global level – actually relate to each other? Ongoing data from SEA will be crucial in learning how to answer that question.

ASEAN's community-building goals – aspirational or achievable?

The second discursive gap that ES narratives can help to bridge is the one that has opened up over ASEAN's community-building plans. The Association has clear ambitions to become a qualitatively different kind of community, collaborating more deeply on a broader range of issues. But the painful slowness of progress in this direction attracts plenty of adverse commentary. Liberal discourses tend to urge ASEAN on to herculean (and as yet impracticable) feats of community-building, regularly proposing various (usually extraordinarily complex and difficult) tasks as essential "tests" that ASEAN "must not fail" (there are many instances of this technique, but see, for example, Kavi Chongkittavorn, 2009; Miclat, 2009; So, 2009). Realist narratives, on the other hand, see ASEAN as, at best, a "diplomatic community" (Leifer, 2005, 138), and are highly sceptical of moves to create anything deeper. Over much of the commentary, there is a pall of pessimism. Ravenhill used to distinguish between ASEAN "boosters" and ASEAN "sceptics" (2009, 220). Now, however, boosters are rather too thin on the ground.

Again, the ES can clear some middle ground. Its scholars are acutely aware of the fragility of international cooperation, so its expectations of "community" are correspondingly modest. It therefore rejects the liberal view that ASEAN is fundamentally faulty because its cooperation has not yet taken off to higher levels. However, an ES lens also recognizes and values the *societal* element in international politics, and embraces the idea that societies can consolidate. Progress is difficult, but not impossible. It therefore rejects the realist view that cooperation can only ever be skin-deep.

The ES's focus on underlying *institutions* similarly acts as a reminder not to jeopardize the cooperative practices that have supported ASEAN up to now by trying to move too far too fast. This is by no means a redundant reminder. Many of the underlying institutions that were referred to in the previous section are already under strain. Concepts of sovereignty are shifting, but have not yet consolidated into something new; Indonesia's international profile has grown, prompting regional concerns about

abandonment or domination; Myanmar is a constant challenge to the institution of diplomacy; and the pursuit of economic resilience is massively complicated by the vast socio-economic disparities that criss-cross the region. As new norms are forged, the ES acts as a reminder that the basic institutions that have so far undergirded cooperation developed in the particular way they did for a reason. The institution of sovereignty, for example, with its corollary of non-interference, developed because of lack of trust. Modifying that institution *before* the underlying problem of lack of trust has been fixed is a possible route to trouble. If a bucket is being used to deal with the problem of a leaking roof, there is little to be gained by removing the bucket without first fixing the roof. Non-interference is the bucket, lack of trust the leak.

This is by no means a rejection of change. The institutions of international society are always evolving, and there is nothing abnormal about the challenges that have been posed to SEA's institutions in recent years. But from an ES perspective, effective and deep-rooted change depends on solid consensus.

The much-maligned ASEAN practice of consensus-building is a great frustration for observers who want to see ASEAN travel further and faster. But from a pluralist ES perspective, consensus – even though it might be painful to achieve – is a key criterion in determining the speed with which international societies can advance the scope of their cooperation. In other words, “solidarism” depends on genuine, consensual solidarity (Bull, 2002, 230-232, 305).

Enforcing more ambitious rules is one of the great problems of solidarism. If states agree to take their cooperation to higher levels, and agree on the rules on which that cooperation will be based, then there is theoretically no problem with the idea of those mutually agreed rules being enforced. But for those higher levels of cooperation to withstand the demands of enforcement, they need to have been reached through robust consensus. For enforcement to work, states need to willingly agree to stricter rules, and to the enforcement of those rules – not be coerced into that agreement. Consensus is the horse, and international law the cart – not vice versa (Vincent, 1990, 54-57).

With consensus – which does not, of course, have to equal unanimity, as traditional ASEAN practices make clear – there is no practical or ethical limit on the “thickness” of any given international society. It can be as ambitious as it likes. But without consensus, there are severe limits.

Consensus is not easy to forge. Bull notes that the process implies a willingness not only to eliminate gross economic inequalities (2002, 314-316), but also to recognize very different values and institutions (1999, 155-156). *Global* international society struggles with both these elements. Its prosperous liberal core has had great difficulty with contemplating demands for serious redistribution – whether these demands are for a New International Economic Order, or for help with tackling climate change. It has not taken seriously the reality that fundamental disparities in economic position-

ing and the differing needs of individual states have a major bearing on the shape of global institutions (Buzan, 2010, 25). This liberal core of global international society has also found it difficult to accept difference. Lacking global ideological convergence, and too impatient to forge consensus, it has all too often resorted to coercion in promoting its values and interests, making many dubious decisions and strongly reinforcing the hierarchical characteristics of global international society in the process (Clark, 2009, 572-573, 580).

The coercive short-cut to solidarism easily goes wrong. Those who are coerced readily become resentful. And if the anticipated global power shift remains on track, managing by coercion from the liberal core will become an even less viable strategy (Bell, 2007, 43-47).

In terms of consensus-building practice, SEA has much to teach global international society. Whatever is made of the ASEAN Charter, it has to be acknowledged that the fact that it appeared at all was a major achievement for bridge-building diplomacy (Koh, Manalo, & Woon, 2009). Whatever the inadequacies of the ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights, the fact that it was established at all is a huge step forward, and its Terms of Reference provide a host of norm-building opportunities (Haywood, Kaur, & Caballero-Anthony, 2010).

Yet, within SEA, too, the coercive route to solidarism – despite its dubious success at global level – often beckons too attractively as an alternative to a consensus-building that is deemed too frustrating and too slow. Demands for organizations, or rules, or processes to be given “teeth” (that is, the capacity to coerce) are very understandable. But without securing genuine consensus on installing the teeth, they will never truly be able to bite – or may end up biting the wrong people. If solidarism-by-coercion is problematic at global level, and too apt to create careless winners and sore losers, it is doubly so within close geographical confines, and in a region where levels of inter-state trust are already low, and divisions already problematic. Consensus-building is easily criticized, but the precise nature of proposed alternatives to consensus is often left unexamined.

ES ideas therefore provide a valuable counter-narrative on the question of community-building in ASEAN. Unlike so much commentary, they do not undervalue pluralist cooperation, or insist that ASEAN has no utility until it dramatically raises its game. They call attention to the ever-present dangers of losing what is good in pursuit of what is better. And by foregrounding the role of consensus in solidarism, they shed a different light on a much maligned aspect of ASEAN practice.

But the theory also has a lot to learn. It can currently offer a diagnosis, but not much of a prescription. It therefore stands to gain hugely over the coming years from ongoing observation of ASEAN’s community-building practice. The ES’s solidarist scholars have traditionally focused on liberal ideals of democracy and human rights as routes to solidarism. But these are very difficult areas in which to forge consensus

in SEA. Its pluralist scholars have too often been reluctant to contemplate solidarism at all. But this is not a satisfactory recipe for SEA, where ambition for a deeper community cannot and should not be simply turned off.

Some ES literature hints that a solidarist community can be built on the basis of other areas of consensus-building – such as identity, economics, or functional cooperation – but it offers few further pointers. It has much to learn from SEA, therefore, since these are precisely the areas where ASEAN is at work, doing its utmost to promote a regional sense of belonging that will smooth the way to more region-focused policies, and striving to advance economic and other functional cooperation in a way that will bring more direct and material benefits to the region’s population. In this sense, SEA resembles a giant construction site aimed at turning a pluralist society into a solidarist one, and ES understandings of community-building will be substantially enhanced by staying in touch with ASEAN’s experiences over the next few years.

Indonesia through an ES lens

ES perspectives are also useful in evaluating Indonesia’s position, both as a regional power and a putative world power. The ES defines “great powers” not only in terms of their material status (the reach of their military, the size of their economy, the extent of their natural resources, and so on), but also in terms of their social status. By talking of great powers, Bull argues, “we imply ... the existence of a club with a rule of membership”; we imply that certain states are “accepted by one another and by international society at large as having a common pre-eminence” (2002, 194). There is therefore a marked societal element involved in defining great powers. They are in part *who we think they are*. Great powers are also generally considered by the rest of international society to have not only special rights but special duties in that society (Bull, 2002, 195-196). They may or may not live up to this expectation, but the idea that it is the responsibility of great powers to “do something” to solve pressing problems is common at all levels of political discussion.

Indonesia is the resident “great power” of SEA’s regional international society. As an ASEAN member under President Suharto, it generally conformed to Bull’s descriptions of societally oriented great-power behaviour, conscious of both rights and duties. Former ASEAN Secretary-General Rodolfo Severino recalls that Indonesia was certainly “the big voice”, and it was impossible to get things done without its consent, but “one of the strengths of ASEAN was that Indonesia lowered its profile, pretended that it was just like the others” (interview, Singapore, February 2010). As a democratic polity, however, obliged to mediate and reflect a range of domestic voices, Indonesia faces a much more difficult relationship. So does ASEAN. Even as early as the Habibie administration, Severino was told: “You cannot expect automatic Indonesian support for ASEAN any more” (cited interview).

Riding high in the world’s press as “the new India”, “a steady democratic light in a dark Southeast Asian tunnel”, and a “regional role model” (Anon, 2009b; Manthorpe, 2009; Wehrfritz & Honorine, 2008), and buoyed by its presence in the G20, its inclusion (along with varying combinations of China, India, Japan, South Korea, Indonesia, Australia, Brazil, and Russia) in putative groups such as an “Asian G6” or “KIA” or “BRIIC”, and its sense of being “increasingly indispensable for Obama” (Emmerson, 2009; Ghosh, 2009; Jemadu, 2009; Parello-Plesner, 2009; Soesastro & Drysdale, 2009; Thee, 2010), Indonesia has experienced an international renaissance that has given relations with its SEA neighbours a very different edge. Leonard Sebastian, head of the Indonesia programme at the S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) in Singapore, explains:

The Philippines and Thailand have had democratic transformations, but it hasn’t affected them as much as it has affected Indonesia. The Indonesians, because of their size and their position, are courted by everyone – the Europeans, the Americans, the Australians, the Japanese. All have found an interesting new democratic friend. So, it’s a completely new ball game. People come to Indonesia now. That gives them a great sense of importance. It’s different, for example, for other countries in the region that have to work harder for that kind of recognition. Indonesia doesn’t have to work that hard (interview, Singapore, January 2010).

This is a very challenging environment in which to be a regional “great power”. Indonesia now feels – entirely understandably – that it has the international prestige and moral authority to advocate its model of democracy and human rights to the other ASEAN countries, and it clearly attempted to do that in negotiations on the ASEAN Charter (Dosch, 2008, 533, 536-537, 543). This investment of diplomatic effort met with difficulties on two fronts, however. On the one hand, Indonesian pressure created resentment among some regional players (interview, Ralf Emmers, coordinator of the Multilateralism and Regionalism Programme, RSIS, Singapore, January 2010). Yet, on the other hand, the final document was still profoundly disappointing to many strands of opinion within Indonesia, leading to calls from prominent commentators for a readjustment of Indonesia’s commitment to ASEAN (Anon, 2009a; Sukma, 2008a, 2008b; Wanandi, 2008).

Foreign Minister Marty Natalegawa has clearly emphasized that “Indonesia’s interests and ASEAN’s interests ... are one and the same” (2010). Nevertheless, Indonesia’s new status still occasions misgivings within the region (Budianto, 2010; Desker, 2010; Noor, 2009), and its international renaissance provokes “both anticipation and unease” (Anwar, 2010). Nor does democratization necessarily equate with easing the regionalization process (Rüland, 2009). As Emmers remarks, ASEAN’s situation is now “messier”. The inevitable complications of democracy may slow down moves toward integration on some fronts, and this is “a very sobering realization” for the region (cited interview).

A highly skilful political balancing act is therefore required is to project into ASEAN the norms and values that voting Indonesians very rightly want to see, while still keeping the ASEAN ship on an even keel. This is the old “policy dilemma” that ASEAN constantly faces in trying to juggle the competing aims of liberalization and unity (Katsumata, 2007, 38). Severino likewise welcomes the multitude of voices coming out of Indonesia, as it “expands the horizon”, but he also notes the need for caution: “Would you try to force things, and run into failure, or try to build brick by brick? There are different notions of that in Indonesia” (cited interview).

Aside from championing new norms, great powers can also, according to Bull, play a role in the promotion of international order (2002, 200). Half-way through its year as ASEAN’s chair, and faced with very elevated expectations and a host of tough problems, Indonesia has arguably been doing a very good job of demonstrating how this role might be played.

It can be a thankless task, especially in the context of low levels of trust. In disputes such as that between Thailand and Cambodia, Indonesia’s status as “regional big power” can count negatively, if it is suspected of “looking for a bigger political leverage within the organization” (Nugroho, 2011). Yet it is difficult to imagine any other ASEAN state that could have weighed in so authoritatively to rein in this conflict. Even if success is still elusive, Indonesia’s determined efforts saved the organization a lot of face in the eyes of the world, showing clearly that “ASEAN no longer sweeps difficult problems under the carpet” (Sukma, 2011).

As a Thai opinion piece also notes, Jakarta’s “ambition to transform ASEAN into a global game-changer” is indeed “something no other ASEAN member has so far dared to think of.”; it is therefore “in the grouping’s common interest to support Indonesia as chair, as ... [a]n Asean that is in tune with global changes and settings will benefit the whole regional community” (Anon, 2011). This is not, however, a function of Indonesia’s role as *chair*, but of Indonesia’s role as regional big power.

Again, on the South China Sea issue, if “ASEAN needs to remind Vietnam and the Philippines that the group as a whole cannot and should not be expected to blindly follow their national interests” (Tay, 2011), then it is arguably only Indonesia that has the diplomatic heft to do this.

Indonesia faces a fearsomely complex challenge. It needs to work for regional order by exerting the much-needed authority that only a regional power can, while avoiding the creation of *disorder* by provoking resentment and fear. It needs to cement the position of an “ASEAN community in a global community of nations”, while avoiding too overtly giving the impression that it is helping ASEAN tackle its problems because it is “hoping to raise its global profile” (Bellman & Vaughn, 2011). But an ES vision of great powers gives it a much broader space within which to develop that difficult role, and much more normative guidance, than a narrowly

neorealist one (Zala, 2010).

Again, however, the ES's conceptions of power can also be much enhanced from continued observation of Indonesia's role not only as a regional power but also as a would-be world power. Ambitions for world-power status have been clearly articulated (Anon, 2010; Bellman & Vaughn, 2011; Yudhoyono, 2011). Yet, at the same time, many Indonesians – very conscious, perhaps, of a range of domestic challenges and of the difficulty of asserting authority within the region – are somewhat ambivalent about their country's global status. The ES clearly recognizes, as noted, the social dimensions of great-power status, but has as yet paid little attention to *self*-conceptualization as a factor in this status. Equally, it has much to learn about the way powers move from a regional to a global stage. Again, there is much scope for a profitable region-theory dialogue.

How useful is an ES interpretation?

The ES has two clear drawbacks. Firstly, it is complex. With its consciousness of multiple dynamics at work in the world, and with its choice of pluralist or solidarist standpoints, it offers not so much *one* alternative lens as a whole range of calibrated options. The counter-argument here, however, is that at least there *is* a lens that fits SEA. Other theoretical viewpoints struggle, as the first section of this article showed, to deal coherently and holistically with the many disparate dynamics that animate the region.

The second drawback, from the point of view of some, is that the ES approach privileges "intentionality" – what is intended by practitioners, and what they understand themselves to be doing – rather than causality (Navari, 2009). It is therefore not equipped to pinpoint the precise circumstances that determine a "me-first" decision as opposed to a more socially responsible one, or predict when these circumstances might next occur. There is little that can be said in response to this objection – it is intrinsic to the nature of the material, and will remain a frustration for those looking for a different type of explanatory leverage.

The ES's chief advantage, on the other hand, lies in opening up conceptual space. Its alternative narrative – combining both power and community impetuses in SEA, and rejecting both realist and liberal verdicts on ASEAN – can contribute to solving some of the discursive polarizations that trouble both analysis and action in SEA. It can also tell a rather different regional story, contesting what is often taken for granted, correcting imbalances, and enabling a different conceptualization of problems.

Its international society label, argues Wæver, symbolizes "a continued effort to keep open a vital thinking space" (1998, 129), and this space characteristically colonizes and defends the "productive middle ground" (Ayson, 2008, 54). Middle ground can bridge polarized discourses and resist hegemonic ones. Because it provides a different, more nuanced narrative, it can also enable a different response. ES perspec-

tives on SEA suggest neither triumphalism nor despair – but rather patience. Whether in diplomacy, opinion-forming, or norm-changing, gradualism is the key.

But a region-theory dialogue does not flow only in one direction. The ES has much to learn from SEA – about the ways in which different levels of international society (from regional to global) interlock; about community-building in a heterogeneous and non-liberal environment; and about power projection in different contexts, and self-conceptualization as a factor in great-power recognition.

The participants in this conversation do not yet know each other very well. Exponents of an ES perspective have only just begun to pay attention to regions in general, and to SEA in particular. IR analysts in SEA, on the other hand, tend to be unfamiliar with the ES. The theories that have tended to be dominant in the region – first realism, then constructivism – are those that have gained traction in the US (Chong & Hamilton-Hart, 2009).

The implication of this article, however, is that it would be extremely useful for both theory and region to continue their dialogue.

This is all the more the case since the ES has already demonstrated cross-cultural appeal. Zhang notes that its ideas, despite their still limited influence, “find keenly receptive and responsive ears” in China, especially among younger scholars (2003, 100).

Ultimately, what is needed to understand SEA is home-grown theorization, evolving from the world-views and lived experiences of scholars born and bred *within* the region (Acharya & Buzan, 2007). But, at risk of sounding presumptuous, the genesis of the ES might also suggest one potential launching-pad for that region-generated theory. The ES evolved because its scholars located a paradox in international life – what we see and experience in the inter-state environment (a high degree of order brought about by states) is logically unexpected (because of an anarchic environment). It then discerned a third element that speaks to that paradox (the ability of states to form an international society, which then generates order). There is surely much that is paradoxical within SEA. But identifying these puzzles, and finding the “third element” that links them, is a task optimally undertaken by Southeast Asian scholars and practitioners.

In the meantime, it has been argued here, the ES can very modestly suggest alternative perspectives that help us to understand and talk about SEA differently and productively.

Conclusion

This article has argued that a pluralist ES perspective offers a number of possibilities that are useful in analysing SEA. Its prime contribution is to help locate the middle ground that is often missing from theoretical debates. Thus, it can bridge parallel discourses, whether they be realist and constructivist, or realist and liberal. It

can encourage a less critical evaluation of ASEAN, by providing a theoretical context for the moderate voices in the ASEAN debate, and by enabling a fresh look at the vexed question of consensus. It can also provide a socially oriented understanding of the role of great powers – an understanding that provides a much more subtle interpretation of what Indonesia offers the region, and the challenges it faces there.

This is not a one-way process, however, and the theory can be substantially refined and extended by remaining in close dialogue with the region.

Commenting on Bull's seminal account of international society, Hoffman writes that it may seem "sketchy" in places, but it inspires a research agenda that makes "all the competing paradigms look like dead-ends, or like short and narrow paths" (2002, xxix). This article sees paradigms as complementary, rather than competing. It is not proposing, as noted in the introduction, a "winner-takes-all" theoretical scenario. But it does maintain, with Hoffmann, that the region-theory dialogue it foregrounds is capable of opening up a range of neglected routes that lead in many new and interesting directions for both the ES and SEA.

Acknowledgments

The author gratefully acknowledges the help of those who participated in the cited interviews.

References

- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. London: Routledge.
- Acharya, A. (2005). Do Norms and Identity Matter? Community and Power in Southeast Asia's Regional Order. *The Pacific Review*, 18(1), 95-118.
- Acharya, A. (2007). Regional Institutions and Security in the Asia-Pacific: Evolution, Adaptation, and Prospects for Transformation. In A. Acharya & E. Goh (Eds.), *Reassessing Security Cooperation in the Asia-Pacific: Competition, Congruence, and Transformation* (pp. 19-40). Cambridge, MA: MIT Press.
- Acharya, A., & Buzan, B. (2007). Why Is There No Non-Western International Relations Theory? An Introduction. *International Relations of the Asia-Pacific*, 7, 287-312.
- Acharya, A., & Stubbs, R. (2006). Theorizing Southeast Asian Relations: An Introduction. *The Pacific Review*, 19(2), 125-134.
- Acharya, A., & Tan, S. S. (2006). Betwixt Balance and Community: America, ASEAN, and the Security of Southeast Asia. *International Relations of the Asia-Pacific*, 6, 37-59.
- Alagappa, M. (Ed.). (2003). *Asian Security Order: Instrumental and Normative Features*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Anon. (2009a). Beggar Thy ASEAN (dated 27 Feb). *The Jakarta Post*.
- Anon. (2009b). The Indonesian Surprise (dated 2 Apr) [Electronic Version]. *The Econo-*

- mist. Retrieved 7 April 2009 from http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=13413966.
- Anon. (2010). Editorial: World Power Status? Never Say Never... (dated 12 Nov) [Electronic Version]. *Jakarta Globe*. Retrieved 1 April 2011 from <http://www.thejakartaglobe.com/editorials/editorial-world-power-status-never-say-never-/406416>.
- Anon. (2011). ASEAN Must Show its Worth as a Regional Authority (dated 27 April) [Electronic Version]. *The Nation*. Retrieved 4 May 2011 from <http://www.nation-multimedia.com/2011/04/27/opinion/Asean-must-show-its-worth-as-a-regional-authority-30154005.html>.
- Anwar, D. F. (2010). Indonesia, the Region and the World (dated 28 May) [Electronic Version]. *East Asia Forum*. Retrieved 30 May 2010 from <http://www.eastasiaforum.org/2010/05/28/indonesia-the-region-and-the-world/>.
- Ayson, R. (2008). 'A Common Interest in Common Interest': Hedley Bull, Thomas Schelling and Collaboration in International Politics. In C. Bell & M. Thatcher (Eds.), *Remembering Hedley* (pp. 53-71). Canberra: ANU E Press.
- Batabyal, A. (2004). ASEAN's Quest for Security: A Theoretical Explanation. *International Studies*, 41(4), 349-369.
- Bell, C. (2007). The End of the Vasco da Gama Era: The Next Landscape of World Politics [Electronic Version]. *Lowy Institute Paper 21*. Retrieved 1 February 2008 from <http://www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=723>.
- Bellamy, A. J. (2005). Introduction: International Society and the English School. In A. Bellamy (Ed.), *International Society and its Critics* (pp. 1-26). Oxford: Oxford University Press.
- Bellman, E., & Vaughn, M. (2011). Indonesia Seeks Larger Role in ASEAN (dated 9 May) [Electronic Version]. *The Wall Street Journal*. Retrieved 14 May 2011 from http://online.wsj.com/article/SB100014240527487038642045763106134419202-14.html?mod=googlenews_wsj.
- Budianto, L. (2010). Rights, Labor To Be Focus When RI Chairs (dated 16 Jun) [Electronic Version]. *The Jakarta Post*. Retrieved 1 August 2010 from <http://www.thejakartapost.com/news/2010/06/16/rights-labor-be-focus-when-ri-chairs.html>.
- Bull, H. (1999). The State's Positive Role in World Affairs. In K. Alderson & A. Hurrell (Eds.), *Hedley Bull on International Society* (pp. 138-156). New York: St Martin's Press.
- Bull, H. (2002). *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* (3rd ed.). New York: Columbia University Press.
- Busse, N., & Maull, H. W. (1999). Enhancing Security in the Asia-Pacific. European Lessons for the ASIAN Regional Forum [Electronic Version]. *International Politics and Society*, 3. Retrieved 21 Jan 2008 from http://www.fes.de/ipg/ipg3_99/artbusse.html.
- Buzan, B. (2001). The English School: An Underexploited Resource in IR. *Review of*

- International Studies*, 27(3), 471-488.
- Buzan, B. (2004). *From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalisation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, B. (2010). Culture and International Society. *International Affairs*, 86(1), 1-26.
- Buzan, B., & Gonzalez-Pelaez, A. (Eds.). (2009). *International Society and the Middle East: English School Theory at the Regional Level*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Chiou, Y.-H. (2010). Unraveling the Logic of ASEAN's Decision-Making: Theoretical Analysis and Case Examination. *Asian Politics & Policy*, 2(3), 371-393.
- Chong, A. (2006). Singapore's Foreign Policy Beliefs as 'Abridged Realism': Pragmatic and Liberal Prefixes in the Foreign Policy Thought of Rajaratnam, Lee, Koh, and Mahbubani.
- Chong, A. (2009). A Society of the Weak, the Medium and the Great? Southeast Asia's Lessons in Building Soft Community (unpublished manuscript).
- Chong, A., & Hamilton-Hart, N. (2009). Teaching International Relations in Southeast Asia: Historical Memory, Academic Context, and Politics – An Introduction. *International Relations of the Asia-Pacific*, 9(1), 1-18.
- Clark, I. (2005). *Legitimacy in International Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Clark, I. (2009). Democracy in International Society: Promotion or Exclusion? *Millennium*, 37(3), 563-581.
- Desker, B. (2010). Is Indonesia Outgrowing ASEAN? [Electronic Version]. *RSIS Commentaries*, No. 125. Retrieved 30 September 2010 from <http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS1252010.pdf>.
- Dosch, J. (2008). ASEAN's Reluctant Liberal Turn and the Thorny Road to Democracy Promotion. *The Pacific Review*, 21(4), 527-545.
- Emmers, R. (2003). *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*. London: RoutledgeCurzon.
- Emmerson, D. K. (2009). Indonesia's Obama, Washington's Indonesia (dated 17 Apr) [Electronic Version]. *East Asia Forum*. Retrieved 20 April 2009 from <http://www.eastasiaforum.org/2009/04/17/indonesias-obama-washingtons-indonesia/>.
- Ganesan, N. (2003). 'Mirror, Mirror, on the Wall': Misplaced Polarities in the Study of Southeast Asian Security. *International Relations of the Asia-Pacific*, 3, 221-240.
- Ghosh, A. (2009). BRIC Should Include Indonesia, Morgan Stanley Says (dated 15 Jun) [Electronic Version]. *Bloomberg.com*. Retrieved 4 March 2010 from <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&sid=a31Sp.fWxG1A>.
- Goh, E. (2007/08). Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies. *International Security*, 32(3), 113-157.
- Halliday, F. (2009). The Middle East and Conceptions of 'International Society'. In B. Buzan & A. Gonzalez-Pelaez (Eds.), *International Society and the Middle East: English School Theory at the Regional Level* (pp. 1-23). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Haywood, H., Kaur, M. J., & Caballero-Anthony, M. (2010). Advancing Protection of

- Civilians Through the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) [Electronic Version]. *NTS Alert*. Retrieved 3 December 2010 from http://www.rsis.edu.sg/nts/HTML-Newsletter/Alert/pdf/NTS_Alert_nov_1002.pdf.
- He, K. (2006). Does ASEAN Matter? International Relations Theories, Institutional Realism, and ASEAN. *Asian Security*, 2(3), 189-214.
- He, K. (2008). Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia. *European Journal of International Relations*, 14(3), 489-518.
- Hoffmann, S. (2002). Foreword to the Second Edition: Revisiting *The Anarchical Society*. In Hedley Bull's *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* (3rd ed.) (pp. xxiv-xxix). New York: Columbia University Press.
- Hurrell, A. (2007). One World? Many Worlds? The Place of Regions in the Study of International Society. *International Affairs*, 83(1), 127-146.
- Jackson, R. (2000). *The Global Covenant: Human Conduct in a World of States*. Oxford: Oxford University Press.
- Jemadu, A. (2009). Secretary Clinton's Visit Boosts RI's Soft Power (dated 19 Feb) [Electronic Version]. *The Jakarta Post*. Retrieved 7 April 2009 from <http://www.thejakartapost.com/news/2009/02/19/secretary-clinton039s-visit-boosts-ri039s-soft-power.html>.
- Katsumata, H. (2007). Human Rights and Democracy: From Big Talk to Concrete Actions? In H. Katsumata & S. S. Tan (Eds.), *People's ASEAN and Governments' ASEAN* (pp. 33-40). Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies.
- Kavi Chongkittavorn. (2009). Burma's Jailing of Suu Kyi Is a Test for Both ASEAN and Surin (dated 18 May) [Electronic Version]. *The Nation*. Retrieved 19 February 2010 from <http://www.nationmultimedia.com/search/read.php?newsid=301028-94&keyword=Chuan+Leekpai>.
- Khong, Y. F. (2005). The Elusiveness of Regional Order: Leifer, the English School and Southeast Asia. *The Pacific Review*, 18(1), 23-41.
- Khoo, N. (2004). Deconstructing the ASEAN Security Community: A Review Essay. *International Relations of the Asia-Pacific*, 4, 35-46.
- Koh, T., Manalo, R. G., & Woon, W. (Eds.). (2009). *The Making of the ASEAN Charter*. Singapore: World Scientific.
- Leifer, M. (2005). ASEAN as a Model of a Security Community? In C. K. Wah & L. Suryadinata (Eds.), *Michael Leifer: Selected Works on Southeast Asia* (pp. 136-144). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Manthorpe, J. (2009). Indonesia: A Steady Democratic Light in a Dark Southeast Asian Tunnel (dated 30 Mar) [Electronic Version]. *The Vancouver Sun*. Retrieved 7 April 2009 from <http://www.vancouversun.com/news/Indonesia+steady+democratic+light+dark+Southeast+Asian+tunnel/1443755/story.html>.
- Miilat, G. (2009). ASEAN Charter Fails a First Test by Abandoning the Rohingya

- (dated 27 Apr) [Electronic Version]. *Jakarta Globe*. Retrieved 19 February 2010 from <http://www.thejakartaglobe.com/justAdded/asean-charter-fails-a-first-test-by-abandoning-the-rohingya/274354>.
- Narine, S. (2006). The English School and ASEAN. *The Pacific Review*, 19(2), 199-218.
- Narine, S. (2008). Forty Years of ASEAN: A Historical Review. *The Pacific Review*, 21(4), 411-429.
- Narine, S. (2009). ASEAN in the Twenty-First Century: A Sceptical Review. *Cambridge Review of International Affairs*, 22(3), 369-386.
- Natalegawa, M. M. (2010). Speech at the Flag Hoisting in Commemorating ASEAN's 43rd Anniversary, Jakarta, 9 August 2010 [Electronic Version]. Retrieved 11 August 2010 from <http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?Name1=Pidato&Name2=Menteri&IDP=671&l=id>.
- Navari, C. (2009). What the Classical English School Was Trying To Explain, and Why its Members Were Not Interested in Causal Explanation. In C. Navari (Ed.), *Theorising International Society: English School Methods* (pp. 39-57). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Nesadurai, H. E. S. (2009). ASEAN and Regional Governance After the Cold War: From Regional Order to Regional Community? *The Pacific Review*, 22(1), 91-118.
- Noor, F. A. (2009). The Implications of Growing Indonesian Assertiveness on ASEAN (dated 18 Sep) [Electronic Version]. Retrieved 1 November 2009 from <http://www.othermalaysia.org/2009/09/18/the-implications-of-growing-indonesian-assertiveness-on-asean/>.
- Northedge, F. S. (1976). *The International Political System*. London: Faber & Faber.
- Nugroho, B. H. (2011). Cambodia-Thailand Border Dispute: Observer That Desperately Seeks Trust (dated 30 May) [Electronic Version]. *The Jakarta Post*. Retrieved 31 May 2011 from <http://www.thejakartapost.com/news/2011/05/30/cambodia-thailand-border-dispute-observer-desperately-seeks-trust.html>.
- Odgaard, L. (2007). *The Balance of Power in Asia-Pacific Security: US-China Policies on Regional Order*. Abingdon: Routledge.
- Parello-Plesner, J. (2009). KIA – Asia's Middle Powers on the Rise? (dated 10 Aug) [Electronic Version]. *East Asia Forum*. Retrieved 20 August 2009 from <http://www.eastasiaforum.org/2009/08/10/kia-asias-middle-powers-on-the-rise/>.
- Peou, S. (2002). Realism and Constructivism in Southeast Asian Security Studies Today: A Review Essay. *The Pacific Review*, 15(1), 119-138.
- Quayle, L. (forthcoming). Bridging the Gap: An 'English School' Perspective on ASEAN and Regional Civil Society *The Pacific Review*.
- Ravenhill, J. (2009). East Asian Regionalism: Much Ado About Nothing? *Review of International Studies*, 35(S1), 215-235.
- Rüland, J. (2009). Deepening ASEAN Cooperation Through Democratization? The Indonesian Legislature and Foreign Policymaking. *International Relations of the Asia-*

- Pacific*, 9(3), 373-402.
- Rüland, J., & Jetschke, A. (2008). 40 Years of ASEAN: Perspectives, Performance, and Lessons for Change. *The Pacific Review*, 21(4), 397-409.
- So, S. (2009). The Cambodia-Thailand Conflict: A Test Case for ASEAN [Electronic Version]. *Asia Pacific Bulletin*, 44. Retrieved 4 January 2010 from <http://hdl.handle.net/10125/14487>.
- Soesastro, H., & Drysdale, P. (2009). East Asia and the New World Economic Order (dated 5 Apr) [Electronic Version]. *East Asia Forum*. Retrieved 6 April 2009 from <http://www.eastasiaforum.org/2009/04/05/east-asia-and-the-new-world-economic-order/>.
- Sukma, R. (2008a). ASEAN Members Should Stop Having Themselves On (dated 2 Dec) [Electronic Version]. *East Asia Forum*. Retrieved 4 December 2008 from <http://www.eastasiaforum.org/2008/12/02/asean-members-should-stop-having-themselves-on/>.
- Sukma, R. (2008b). To Be Responsible, Indonesia Should Not Ratify ASEAN Charter (dated 22 Jul) [Electronic Version]. *The Jakarta Post*. Retrieved 7 April 2009 from <http://www.thejakartapost.com/news/2008/07/22/commentary-to-be-responsible-indonesia-should-not-ratify-asean-charter.html>.
- Sukma, R. (2011). After the 18th ASEAN Summit: Time To Work Harder (dated 12 May) [Electronic Version]. *The Jakarta Post*. Retrieved 13 May 2011 from <http://www.thejakartapost.com/news/2011/05/12/after-18th-asean-summit-time-work-harder.html>.
- Tay, S. (2011). Calming the Seas Between ASEAN, China (dated 13 Jul) [Electronic Version]. *Today*. Retrieved 14 July 2011 from <http://www.todayonline.com/Commentary/EDC110713-0000026/Calming-the-seas-between-ASEAN,-China>.
- Thee, K. W. (2010). Indonesia and the BRICs (dated 12 Dec) [Electronic Version]. *East Asia Forum*. Retrieved 15 December 2010 from <http://www.eastasiaforum.org/2010/12/12/indonesia-and-the-brics>.
- Vincent, R. J. (1990). Order in International Politics. In J. D. B. Miller & R. J. Vincent (Eds.), *Order and Violence: Hedley Bull and International Relations* (pp. 38-64). Oxford: Clarendon Press.
- Wæver, O. (1998). Four Meanings of International Society: A Trans-Atlantic Dialogue. In B. A. Roberson (Ed.), *International Society and the Development of International Relations Theory* (pp. 80-144). London: Continuum.
- Wanandi, J. (2008). The ASEAN Charter and Remodeling Regional Architecture (dated 9 Nov) [Electronic Version]. *East Asia Forum*. Retrieved 10 November 2009 from <http://www.eastasiaforum.org/2008/11/09/the-asean-charter-and-remodeling-regional-architecture/>.
- Wehrfritz, G., & Honorine, S. (2008). Indonesia as the New India (dated 11 Oct) [Electronic Version]. *Newsweek*. Retrieved 7 April 2009 from <http://www.newsweek.com>.

week.com/id/163572.

Wight, M. (1978). *Power Politics*. Leicester: Leicester University Press.

Wight, M. (1991). *International Theory: The Three Traditions*. Leicester: Leicester University Press.

Yudhoyono, S. B. (2011). Keynote Speech at World Economic Forum 2011: The Big Shift and the Imperative of 21st Century Globalism [Electronic Version]. Retrieved 2 June 2011 from <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2011/01/27/1572.html>.

Zala, B. (2010). *Rescuing Polarity Analysis From Neorealism: Rethinking the Role of the Great Powers in International Society*. Paper presented at the The Oceanic Conference on International Studies, Palmerston North, New Zealand.

Zhang, Y. (2003). The 'English School' in China: a Travelogue of Ideas and Their Diffusion. *European Journal of International Relations*, 9(1), 87-114.

Weak State Sebagai Sebuah Ancaman Keamanan: Studi Kasus Kolombia

Abstrak

This paper aims to describe how a weak state can become a threat to the security of other countries, using Colombia as a case study. Colombia showed a weak state characteristics as seen from the lack of control and the existence of government, military capabilities are limited, dysfunctional judicial system and weak law enforcement, as well as a weak tax collection system. The condition was successfully exploited by drug trafficking organizations to operate as well as deploy a security threat not only for the internal region of Colombia, but also for other nations.

The existence of Colombia as a weak state and successfully exploited by drug trafficking organizations causing security threats such as terrorism, weapons proleferasi and environmental degradation.

Keywords: Weak State, security threats, Colombia, drug trafficking

Ratih Herningtyas

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
ratih_herningtyas@umy.ac.id

Pendahuluan

Tragedi *World Trade Center* 11 September 2001 membawa sebuah periode baru dalam studi keamanan internasional. Tragedi ini telah membangun sebuah kesadaran baru bahwa ancaman bagi AS dan keamanan dunia tidak semata-mata bersumber dari ancaman militer dari negara-negara musuh (*rival great powers*) saja, namun juga ancaman transnasional yang berasal dari *the world's most poorly governed countries*.¹ Dari perspektif AS, keberhasilan Al Qaeda yang beroperasi dari Afganistan dalam melancarkan aksi-aksi terorisme terhadap kepentingan-kepentingan AS di berbagai tempat menjadi bukti sebuah keniscayaan bahwa ancaman terhadap stabilitas dan perdamaian saat ini lebih banyak datang dari negara-negara lemah (*weak state*) daripada negara kuat (*strength state*).² Seperti yang disampaikan oleh Richard Haas, Direktur Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri AS berikut ini:

The attack of September 11, 2001 reminded us

*that weak states can threaten our security as much as strong ones, by providing breeding grounds for extremist and heavens for criminals, drug traffickers, and terrorists. Such lawlessness abroad can bring devastation here at home*³

Ancaman dari sebuah *weak state* bersumber dari asumsi bahwa sebuah Negara yang tidak mampu menjalankan *responsible sovereignty* akan mengakibatkan efek limpahan yang berupa terorisme, proliferasi senjata dan berbagai ancaman lain. Sebuah negara lemah atau gagal adalah sumber dari banyak persoalan dunia yang serius, dan perkembangan globalisasi memungkinkan negara lemah atau gagal untuk menjadi pengeksport persoalan bagi wilayah lain di dunia.

Asumsi bahwa ancaman terhadap stabilitas dan perdamaian banyak datang dari negara-negara lemah semakin kuat dengan melihat kenyataan bahwa perkembangan globalisasi memunculkan fenomena transnasional yang tidak semata-mata membawa dampak positif bagi sebuah Negara seperti arus modal asing, investasi, perdagangan maupun teknologi komunikasi yang semakin luas. Namun fenomena globalisasi juga membawa serta aktivitas-aktivitas kriminal seperti terorisme, proleferasi senjata, organisasi kejahatan, bahkan *global pandemic* seperti flu burung, HIV/AIDS dll. Persoalan-persoalan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi sebuah Negara.

Tulisan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana sebuah *weak state* dapat menjadi sumber ancaman keamanan dengan menggunakan kasus Kolombia yang memiliki karakteristik sebagai *weak state* dan keberadaan organisasi *drug trafficking* yang beroperasi di wilayahnya dapat menjadi sebuah ancaman keamanan bagi negara lain bahkan dilingkup global.

Weak State: Kerangka Konseptual

Bagi Negara-negara dunia ketiga, Negara masih menjadi *core concept* dalam ilmu sosial dan aktor utama dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi, meskipun bagi kaum neoliberal di era globalisasi peran Negara haruslah minimal. Kekuasaan Negara yang relatif otonom masih diperlukan untuk mengamankan *civil society*, dimana *civil society* bukan hanya sebagai jaringan kerjasama tetapi juga mengandung konflik yang memerlukan mediasi. Dalam perspektif ini, peran politik Negara adalah memelihara keseimbangan antara kerjasama dan konflik sehingga *civil society* di dalamnya mencapai kohesi minimum yang dibutuhkan bagi keberlangsungannya.

Para akademisi yang *concern* dengan relevansi antara definisi tradisional dari negara bagi berbagai pertanyaan tentang *statehood* dan kaitannya dengan keamanan di negara dunia ketiga, berupaya memperluas *power-base view* dari negara. Buzan adalah salah satu tokoh yang memiliki kontribusi dalam studi ini dengan menawarkan model *state strength/weakness* yang memasukkan unsur instrumental dan non material dalam memahami persoalan kenegaraan. Model yang digunakan untuk menentukan relatif *strength* atau *weakness* sebuah Negara, mempertimbangkan komponen utama negara

yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu pertama, *The idea of the state*, yaitu prinsip yang terorganisasi dalam masyarakat yang fungsinya sebagai pengikat antara pribadi, masyarakat dan negara. Konsensus yang mendasari prinsip dan tujuan negara sangat esensial bagi legitimasi sebagai mekanisme untuk mempengaruhi warga negara untuk tunduk pada otoritas negara. Kedua, *The physical base of the state*, terdiri dari teritori dan populasi yang mendiaminya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. *Physical base of the state* dapat terancam baik dari lingkup domestiknya seperti aksi pemberontakan, separatisme dll, maupun dari negara lain. Dan yang ketiga adalah *The Institutional expression of the state*, terdiri dari seluruh kelengkapan negara, meliputi legislatif, administratif, dan lembaga judisial, termasuk hukum, prosedur dan norma yang dioperasikan. Ketika institusi negara terancam oleh kekuatan tertentu, yang membahayakan adalah institusi negara cenderung menjadi *overpower*, sedang jika terancam oleh ide-ide menentang maka legitimasinya akan menurun dan akan mengalami kolaps karena minimnya dukungan rakyat.⁴

Lain dengan Buzan, Robert Jackson mengukur derajat kenegaraan dengan mengukur antara kemampuan Negara (*state's ability*) dan kemauan Negara (*state's willingness*) untuk menyediakan *political goods* yang dibutuhkan masyarakatnya, seperti keamanan fisik, institusi politik yang *legitimate*, manajemen ekonomi dan kesejahteraan sosial.⁵

Sementara Fukuyama berupaya membedakan antara lingkup aktivitas Negara (*scope*) yang mengacu pada berbagai fungsi dan tujuan berbeda yang dijalankan pemerintah dengan kekuatan kekuasaan Negara (*strength*) atau kemampuan Negara untuk merencanakan dan menjalankan berbagai kebijakan dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan transparan, atau yang selama ini umumnya diacu sebagai kemampuan Negara atau institusional Negara.⁶ *Strength* (sebagai lawan dari *scope*) adalah yang menentukan peran efektif sebuah negara, yaitu kemampuan negara untuk mendesign dan melaksanakan *rule of the game* daripada memperluas fungsi-fungsinya, sehingga negara mampu menjalankannya dan hal ini akan menentukan keberhasilan negara dalam perkembangan dan stabilitas pemerintahannya. Mengutip pendapat Max Weber, sebuah negara yang ideal adalah:

*As the institution which legitimately, monopolizes the production of regulations and the use of force, integrates society, national territory and mediates conflicts*⁷

Senada dengan hal tersebut Fukuyama menyebutkan bahwa *weak state* sebagai oposisi negara ideal dicirikan dengan kelemahan kapasitas institusional untuk membuat dan menjalankan kebijakan. *Weak state* biasanya disebabkan karena lemahnya legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Untuk dapat memerintah secara efektif, negara harus memiliki kemampuan untuk menjalankan enam fungsi esensial, yaitu *monopolize the legitimate use of force, extract resources, shape national identity and mobilize consent, regulate society and the economy, maintain the internal coherence of state institu-*

tions, and redistribute resources.⁸

Kelemahan negara bisa dilihat dari munculnya *capacity gaps*, yaitu kekosongan negara dalam berbagai fungsi dan peranan. Kekosongan ini mengakibatkan *functional hole*, yaitu yaitu kegagalan negara untuk mengisi fungsi-fungsi mendasar sebagaimana layaknya sebuah negara normal dan diharapkan oleh rakyatnya. *Functional holes* inilah yang kemudian dieksploitasi oleh kelompok kriminal dengan beragam cara, dari mengambil keuntungan dari kekosongan peran negara, bahkan menggantikan atau mengkompensasikan kekosongan tersebut. Sebagai contoh, *functional hole* pada sistem peradilan dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk beroperasi dengan *high level of impunity* atau paling tidak dengan resiko minimal. Sebuah negara akan lebih menguntungkan bagi aktivitas kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi terutama yang bersifat transnasional, jika ketidakmampuan untuk mengisi fungsi-fungsi sebagai negara efektif tersebut sekaligus memiliki kecenderungan korupsi tinggi dan *rent seeking* oleh elit-elit politiknya.⁹

***Transnational Organized Crime* di Negara Lemah**

Sebuah *transnational organized crime* (TOC) secara umum didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang menyediakan barang atau jasa secara illegal untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰ Sebuah kejahatan bisa dikatakan sebagai sebuah kejahatan yang transnasional jika memiliki elemen-elemen sebagai berikut:¹¹

1. Lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang (penjahat, kriminal, buronan atau mereka yang sedang melakukan kejahatan atau sebagai korban - seperti dalam kasus penyelundupan manusia), atau oleh benda (senjata api, uang yang akan digunakan dalam pencucian uang, obat-obat terlarang) atau oleh niatan kriminal (seperti penipuan lewat komputer)
2. Pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sesuai dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada serangan, tidak ada sanksi apabila tidak ada hukumnya). Sebuah tindakan anti sosial baru bisa dianggap sebagai tindak kriminal apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya. Pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap kriminal bila dianggap demikian oleh minimal dua Negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya.

Organized Crime difasilitasi oleh globalisasi, yang manifestasi substansialnya terletak pada peningkatan pengaruh korporasi transnasional dalam aspek ekonomi maupun politik, yang memanfaatkan perkembangan komunikasi dan transportasi untuk mentransformasi logika produksi ke dalam arena global. Bersamaan dengan itu, sektor finansial menjadi semakin massif dan terintegrasi lintas batas dan bermuara pada

peningkatan arus kapital transnasional. *Feature* penting lainnya adalah hubungan antar pemerintah maupun aktor-aktor non negara yang terkait satu sama lain dalam sistem internasional melebihi kemampuan pemerintah domestik untuk mengontrolnya. Terkait dengan *organized crime*, globalisasi memunculkan dalam istilah Moises Naime sebagai *The Five Wars of globalization* yang meliputi *illegal trade on drugs, Arms, Intellectual property, people and money*.¹²

Menurut Phil Williams, ada 2 (dua) prasyarat bagi sebuah kelompok kejahatan terorganisasi untuk dapat berkembang.¹³ Pertama, sebuah wilayah/negara yang memiliki resiko rendah (*low risk*) bagi mereka untuk beroperasi. Ada kecenderungan bahwa Negara yang memiliki *low risk* biasanya adalah negara-negara berkembang / dunia ketiga yang dikategorikan sebagai *weak state* yang memiliki beberapa karakteristik yang telah dibahas diatas. Dalam beberapa kasus, kelompok kejahatan terorganisasi ini juga menciptakan hubungan simbiosis dengan elit politik, yang disebut Roy Godson sebagai *political-criminal nexus*, sehingga negara mengalami penetrasi ekstrim, bahkan terkadang mampu “dikuasai” oleh kelompok ini. Dalam skala yang luas, persoalan yang muncul bukan *organized crime*-nya, namun *ineffective, incompetent and inadequate government*, sehingga kejahatan terorganisasi merupakan gejala *malaise* yang dalam daripada persoalan yang berdiri sendiri.¹⁴

Jika kelemahan negara merupakan kondisi yang penting bagi pertumbuhan kejahatan terorganisasi domestik dan internasional, maka sebagai prasyarat yang kedua bagi pertumbuhan kelompok kejahatan terorganisasi adalah prospek bagi keuntungan yang besar (*prospects for large profit*). Seperti yang dinyatakan Phill Williams bahwa *low risk is most attractive when accompanied by prospects for large profits*.¹⁵ Prospek profit tinggi bisa diperoleh dari sebuah *weak state* yang di wilayahnya terdapat semangat regionalisme sempit dalam arti adanya penguasa-penguasa local selain pemerintah pusat. Sehingga upaya kelompok kriminal untuk menyuap pada pemerintah tidak memerlukan biaya besar. Mereka hanya perlu mengeluarkan biaya pelicin untuk aparat pemerintah local saja. Selain itu, ketika pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya sehingga menimbulkan angka pengangguran tinggi. Kondisi ini memungkinkan ketersediaan tenaga kerja murah karena minimnya lapangan pekerjaan. Dengan demikian *weak state* merupakan surga bagi organisasi kriminal ini yang memungkinkan mereka beroperasi dengan keamanan yang maksimum dan minimum campur tangan. Tidak mengherankan jika kemudian para kriminal ini berupaya untuk mempertahankan kondisi *weak state* tersebut bagi keuntungan mereka. Seperti yang dikatakan Robert I. Rotberg berikut ini:

The more anarchic and anomic the nation-state, the more non-state actors and the forces of terror can take opportunistic advantages of a deteriorating internal security situation to mobilize adherents, train insurgents, gain control of resources, launder funds, purchase arms, and ready themselves for assault on world order.¹⁶

Fokus yang sedang tumbuh dan berkembang menyangkut *Weak State* sebagai sebuah ancaman keamanan pada dasarnya dilandasi keyakinan bahwa sebuah/beberapa Negara bertanggungjawab atau terlibat atas terjadinya ancaman transnasional yang kemudian menegaskan agenda keamanan nasional dan keamanan internasional. Hal ini didasari atas 2 (dua) proposisi¹⁷, yaitu pertama, konsep keamanan tradisional sebagai kekerasan/kejahatan internal harus dikembangkan sehingga mencakup juga di dalamnya ancaman lintas batas yang digerakkan oleh *non-state actor* (seperti terorisme), aktivitas (seperti *crime*/kejahatan), maupun *force*/kekuatan (seperti wabah penyakit atau degradasi lingkungan). Proposisi kedua, bahwa beberapa ancaman tersebut sebagian besar bersumber dari *weak governance/weak state* di negara-negara sedang berkembang.¹⁸

Tantangan yang kemudian muncul bagi kalangan analis kebijakan ialah bagaimana melihat dengan lebih hati-hati Negara-negara mana atau Negara-negara seperti apa yang memungkinkan munculnya lahan bagi masalah transnasional. Upaya yang selalu dikejar ialah bagaimana melihat lebih dekat hubungan potensial *weak states* terhadap terorisme (*terrorism*), proliferasi senjata (*weapon proliferation*), kejahatan, wabah penyakit, ketidakamanan energy (*energy insecurity*), dan ketidakstabilan regional (*regional instability*), di mana kesemuanya telah dianggap ancaman global kekinian.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Gabriella Marcella dalam *monographnya* yang menyebutkan sebuah *broken window theory* dalam hubungan internasional.¹⁹ Teori ini berargumen bahwa penurunan *neighbourhood* mengancam komunitas internasional dengan beragam cara yang tidak biasa, seperti organisasi kejahatan internasional, kekerasan dan kekacauan di daerah perbatasan, penyelundupan, senjata illegal, pencucian uang dll. Artinya sebuah Negara yang dikategorikan sebagai *weak state* dapat mempengaruhi stabilitas kawasan yang pada akhirnya akan bermuara pada ancaman terhadap sebuah keamanan global.

Weak state dan drug trafficking di Kolombia sebagai Ancaman Keamanan

Untuk membuktikan argumentasi bahwa sebuah *weak state* dapat menjadi sebuah ancaman keamanan, maka tulisan ini akan menggunakan Kolombia sebagai studi kasus. Kolombia adalah sebuah negara yang sulit sekali melepaskan diri dari aksi kekerasan. Ada dua fenomena sejarah yang bisa membantu menjelaskan konflik yang terjadi di Kolombia, yaitu kegagalan pendistribusian tanah dan proses *state building* yang tidak sempurna.²⁰

Kekerasan politik yang terus terjadi akibat konflik perebutan kekuasaan antar berbagai aktor yang ada di Kolombia menyebabkan pemerintah kehilangan beberapa fungsinya, seperti menjalankan pemerintahan yang efektif, kontrol atas wilayahnya, penegakan hukum, dll. Sebagian wilayah yang berada di pinggiran dan pedalaman Kolombia dikuasai oleh kelompok-kelompok gerilya dan paramiliter. Pemerintah tidak cukup memiliki legitimasi penggunaan kekuasaan dan tidak bisa dan mampu secara

efektif melindungi warganegaranya. Berbagai tindak kejahatan sulit dibawa ke pengadilan (apalagi dipenjarakan), para hakim mendapat beragam ancaman pembunuhan, dan tentara sendiri dicurigai menjadi salah satu aktor pelanggar HAM.

Kolombia merupakan negara demokrasi tertua kedua di *Western Hemisphere* setelah Amerika Serikat, namun konflik dan kekerasan politik telah menodai perjalanan sejarahnya sejak Kolombia memperoleh kemerdekaan.

Alur konflik yang terjadi sejak Kolombia merdeka cenderung membentuk pola yang sama. Meskipun konflik senantiasa memunculkan aktor-aktor baru dalam konstelasi konflik di Kolombia, pola umum yang terdapat pada setiap konflik adalah antara kelompok yang berkuasa dan mencoba mempertahankan *status quo*, dengan kelompok-kelompok yang mencoba melakukan pembaharuan dengan mengakomodasi kelompok lain yang dapat berpengaruh dalam mencapai tujuan tersebut. Sementara bagi masyarakat miskin, konflik menjadi akibat dari upaya mereka untuk terus dapat mempertahankan hidup di tengah pertikaian para kaum penguasa. Seperti yang disampaikan oleh Phillip McLean tentang konflik di Kolombia berikut ini:

...Perhaps the most basic explanation for the high levels of violence in Colombia is the struggle for status, often over the land, and economic advantage (or for the poorest, survival)²¹

Konflik di Kolombia yang berakar kuat sejak masa kolonial membawa pengaruh yang dalam pada dinamika konflik selanjutnya. Konflik yang diawali antara kaum imperialis dengan rakyat yang ingin merdeka melahirkan penguasa baru yang didasarkan atas status sosial dan kepemilikan tanah sebagai pra-kapital. Ada dua fenomena sejarah yang bisa membantu menjelaskan konflik yang terjadi di Kolombia, yaitu kegagalan pendistribusian tanah dan proses *state building* yang tidak sempurna.²²

Persoalan distribusi tanah bermula dari pertumbuhan ekspor komoditi pertanian seperti kopi, pisang dll yang menimbulkan gerakan-gerakan kolonialisasi masyarakat miskin ke tanah-tanah yang tidak berpenghuni, sementara pada saat yang sama muncul upaya privatisasi tanah oleh masyarakat yang memiliki sumber daya dan berhasil mengkonsolidasikan properti privat yang luas. Perebutan atas tanah pertanian untuk produk-produk ekspor seperti pisang dan kopi menjadi sangat umum terjadi antara masyarakat petani dengan pengusaha pendatang. Hal inilah yang memicu terjadinya konflik di pinggiran dan rural area. Bahkan persoalan perebutan tanah antar penduduk, tuan tanah, kelompok-kelompok pemberontak bahkan pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan Kolombia di masa-masa selanjutnya.

Sementara proses *state building* Kolombia sangat dipengaruhi oleh dua partai utama yaitu Liberal dan Konservatif yang bersaing menguasai perpolitikan di Kolombia dan menyebabkan beberapa perang sipil antara para pengikutnya. Yang terbesar dan memberi pengaruh signifikan dalam kehidupan Kolombia selanjutnya adalah tragedi *La Violencia* pada tahun 1947 - 1958, yang dikabarkan mengakibatkan jatuhnya

200.000 orang tewas.²³ Era *La Violencia* ini berakhir setelah kedua partai yang bertikai bersepakat untuk membentuk koalisi dan mengambil kembali pemerintahan dari kaum militer pada tahun 1958. *La Violencia* bagi beberapa kalangan seolah-olah mengukuhkan anggapan bahwa sistem yang ada hanya mungkin diperbaharui dengan jalan kekerasan. Di tahun 1958 elit partai Liberal dan Konservatif mulai merasa khawatir dengan situasi yang berkembang akan lebih sulit dikontrol, sehingga mereka bersepakat untuk membentuk Front Nasional (*Frente Nacional*). Pemimpin kedua partai sepakat untuk membagi sebagian besar posisi pemerintah diantara keduanya dan bergantian dalam menjabat kepresidenan. Dengan begitu, sebuah kartel politik telah terbentuk, di mana hal tersebut tidak hanya berarti membangun monopoli kekuasaan, namun juga telah menutup kemungkinan bagi kelompok-kelompok lain untuk masuk dalam sirkulasi pemerintahan. Situasi seperti ini tidak hanya membentuk sistem politik yang sangat eksklusif akan tetapi telah mewujudkan praktek-praktek klientelisme politik. Setelah kedua partai bersepakat untuk berbagi kekuasaan dengan membentuk koalisi, konflik politik antara kedua partai memang berakhir. Namun dalam perkembangannya, koalisi ini memunculkan konflik baru dengan kelompok-kelompok lain yang tidak menikmati kekuasaan di Kolombia. Represi adalah bentuk jawaban pemerintah terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di luar konteks mereka. Ketika kekuasaan koalisi ini menjadi terlalu kuat untuk ditembus, maka kelompok-kelompok yang termarginalkan mulai mengorganisasikan gerakan perlawanan lengkap dengan pasukan bersenjata yang melakukan aksinya dengan bergerilya, seperti FARC (*The Revolutionary Armed Forces of Colombia*), ELN (*The National Liberation Army*), AUC (*The United Self-Defense Groups of Colombia*) dll.

Konflik kekerasan yang dialami oleh pemerintah dan ancaman yang muncul karena keberadaan kelompok gerilyawan anti pemerintah diatas berkontribusi bagi kelemahan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam masyarakat (*functional holes*) yaitu lemahnya kontrol dan eksistensi pemerintah, kapabilitas militer yang terbatas, disfungsi sistem peradilan dan lemahnya penegakan hukum, serta sistem pungutan pajak yang lemah.²⁴

Lemahnya kontrol dan eksistensi pemerintah tampak dalam jumlah personil, peralatan pendukung, dan infrastruktur yang dimilikinya tidak mampu menjaga garis sepanjang lebih dari 6000 km yang berbatasan dengan 5 (lima) negara. Perbatasan ini meliputi hutan tropis, pegunungan bahkan gurun serta garis pantai sepanjang lebih dari 3000 km di Laut Karibia dan Samudera Pasifik yang merupakan jalur lalu lintas laut yang ramai.²⁵ Kondisi ini memungkinkan bagi para kelompok pemberontak untuk menguasai secara penuh wilayah yang tidak terkontrol ini untuk memmpersar sumber daya yang mereka miliki. Seorang staf pemerintah Ekuador membuktikan minimalnya kehadiran pemerintah di wilayah-wilayah perbatasan berikut ini melalui statementnya berikut ini:

*We dont have a border with Colombia but with the FARC.*²⁶

Kapabilitas militer yang terbatas tampak dalam jumlah personel militer Kolombia yang pada awal tahun 2000 hanya memiliki 60.000 – 80.000 personel²⁷, serta anggaran belanja militer Kolombia (meliputi juga anggaran bagi kepolisian yang berada dibawah menteri pertahanan) rata-rata pertahun di tahun 90-an hanya 1.35 % dari GDP. Jumlah ini sangat rendah bagi sebuah negara yang menghadapi konflik internal. Elit-elit Kolombia dahulu lebih menyukai pemerintahan pusat yang lemah dan militer yang lemah, sebagai wujud kekhawatiran mereka jika militer kuat maka mereka memiliki peluang untuk melakukan kudeta seperti pengalaman yang dialami oleh negara-negara Amerika Latin lainnya.

Disfungsional sistem peradilan dan lemahnya penegakan hukum tampak pada data yang menunjukkan 95 – 98 % tindak kriminal dan pelanggaran hukum tidak diproses dan dijatuhkan hukuman. Ini terjadi sebagai akibat dari minimnya jumlah personil polisi yang hanya ada di 157 kota dari kurang lebih 1000 kota di kolombia, rendahnya kapasitas penegakan hukum, dan ancaman dan tekanan-tekanan yang dilakukan FARC, ELN dan AUC. Tingginya angka kebebasan dari hukuman disebabkan intimidasi, penyuapan para hakim dan saksi-saksi dalam sebuah sidang dan kompleksitas persoalan yang terkait dengan masalah kelembagaan itu sendiri.²⁸ Slogan *Hecha la ley, hecha la trampa* (sekali aturan hukum dibuat, maka bersamaan dengan itu korupsi dimulai) menjadi rahasia umum bagi masyarakat Kolombia dan telah menjadi budaya yang sulit diberantas.

Dua tolok ukur penting efektivitas sebuah negara modern adalah kemampuannya dalam memaksa secara sah masyarakatnya untuk tunduk pada aturan hukum (*monopoly of force*) dan kemampuannya untuk memungut pajak (*extracting resources*) untuk membiayai pemerintahan.²⁹ Keduanya sangat berkait satu sama lain. Pungutan pajak akan menyediakan sumber daya bagi pemerintah untuk memenuhi kontrak sosial dengan masyarakat dan keberhasilannya menyediakan kebutuhan masyarakat akan menjadikan kepatuhan masyarakat akan aturan hukum yang dibuat pemerintah. Namun dalam dua hal tersebut pemerintah Kolombia kurang berhasil.

Kelemahan-kelemahan tersebut (*functional holes*) yang dimiliki pemerintah menjadi sebuah peluang bagi sebuah kejahatan transnasional seperti *drug trafficking* untuk berkembang biak dengan resiko rendah (*low risk*). Perkembangan ini tentunya tidak terlepas dari faktor sejarah Kolombia yang menyisakan banyak persoalan dan peran aktor non-negara seperti kelompok gerilyawan FARC, ELN dan gerakan paramiliter AUC yang “berhasil” mengacaukan perhatian pemerintah.

Peranan Kolombia dalam industri obat bius dunia mengalami sebuah evolusi selama beberapa dekade belakangan ini. Bermula dari eksportir marijuana atau dikenal juga sebagai ganja untuk pasar AS yang merupakan periode yang menjadi tonggak awal tumbuh dan berkembangnya *drug trafficking* Kolombia, kemudian beralih ke pemrosesan koka menjadi kokain dan opium menjadi heroin yang semua bahan bakunya disuplai dari Peru dan Bolivia, hingga menjadi produser sekaligus eksportir

utama dari kokain dan heroin untuk pasar utama Amerika dan Eropa.

TOC yang berkembang di Kolombia mampu memanfaatkan berbagai kelemahan tersebut dan melakukan kerjasama yang menguntungkan dengan kelompok-kelompok pemberontak dan paramiliter untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu mereka juga melakukan penyusupan ke dalam badan-badan pemerintah domestik yang korup. Organisasi Kejahatan Transnasional di Kolombia sangatlah berbeda dengan organisasi kejahatan di negara-negara lain seperti Italia, China dan Jepang. Di Kolombia sebuah organisasi kejahatan transnasional dioperasikan oleh kartel, yaitu semacam kongsi dagang yang usahanya memonopoli perdagangan narkoba internasional. Organisasi-organisasi yang terlibat di dalamnya memiliki fungsi dan peranan yang berbeda, beroperasi melintas batas negara, dan melibatkan struktur transnasional yang kompleks. Struktur tersebut meliputi antara lain kelompok petani (koka, opium, maupun ganja), produsen heroin dan kokain, manufaktur ATS, kelompok penyelundup, pejabat-pejabat korup, distributor, pedagang grosir, dan pedagang kecil di tingkat lokal. Sebuah kartel mendapat keuntungan dari posisinya yang strategis untuk melakukan monopoli pasar, memalsukan kontrol harga dan akses terhadap komoditas khusus dalam perdagangan ilegal. Tokoh-tokoh dalam kartel ini tidak hanya mengontrol persediaan komoditas dagang, juga harga dan kualitas yang sempurna.³⁰

Keuntungan besar yang ditawarkan oleh bisnis obat terlarang ini, memunculkan kartel-kartel obat bius yang kuat di Kolombia seperti Medellin, Cali dan *Caribbean Coast*. Merekalah yang mengembangkan aktivitas total dari bisnis ini. Seluruh produksi, dari penanaman koka, suplai bahan baku, memprosesnya hingga menjadi kokain jadi dan mendistribusikannya baik untuk pasar domestik maupun internasional melalui jaringan-jaringan distribusi yang mereka ciptakan. Aktivitas yang dilakukan kartel-kartel ini –yang biasa disebut sebagai *drug trafficking*– seringkali diindikasikan memiliki kaitan yang erat dengan kategori lain dari kejahatan transnasional seperti pencucian uang, penyelundupan senjata, korupsi, migrasi ilegal dan dalam beberapa kasus terorisme.

Keuntungan miliaran dollar dari *drug trafficking* kartel-kartel di Kolombia telah kembali ke negara. Keuntungan yang dikembalikan diperkirakan untuk pengembangan lebih lanjut produksi narkoba di dalam negeri.³¹ Sebelumnya modal dari aktivitas organisasi kejahatan tidak ditujukan untuk mengembangkan industri maupun sektor-sektor ekonomi yang lain, karena bagian penting dari sisa pendapatan kartel dilarikan ke luar negeri, dicuci di bank, saham di perusahaan real estate asing, keamanan, dan bisnis di seluruh dunia. Aktivitas *money laundering* umumnya terjadi di Kepulauan Karibia, bank-bank sentral seperti London, Switzerland, dan Hongkong.³² Pada akhir tahun 1980-an Sindikat Medellin direputasikan memiliki kekayaan dipastikan kira-kira 10 miliar dollar beserta aset cair di Eropa, Asia, dan Amerika Utara.³³

Di bagian lain, beberapa negara Eropa dan terutama AS mengalami persoalan besar akibat bisnis ilegal para kartel Kolombia. Beberapa kota metropolitan di AS seperti Los Angeles, New York, Chicago, Washington dan Miami mengalami berbagai persoalan terkait dengan penyalahgunaan obat bius asal Kolombia. Di tahun 1990an 7,7 juta penduduk AS menderita kecanduan obat bius, meskipun angka ini mengalami penurunan di tahun 1995 sebanyak 6,6 juta orang, namun tetap saja angka –angka tersebut sangat mengkhawatirkan. Selain masalah kecanduan obat bius, peredaran obat bius juga menyebabkan persoalan sosial terutama peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di jalan-jalan AS. Setiap tahun Pemerintah AS harus menyediakan dana tak kurang dari US \$ 57,7 milyar untuk penegakan hukum, interdiksi, pendidikan rehabilitasi dan program-program kesehatan yang terkait dengan penyalahgunaan obat bius.³⁴ Tidak hanya persoalan penyalahgunaan obat bius yang menjadi persoalan, aktivitas *drug trafficking* pun menimbulkan sebuah isu keamanan baru yang melibatkan lebih banyak negara. *Drug trafficking* yang bekerjasama dengan kelompok-kelompok penantang negara menjadi semakin kuat membawa angin ancaman keamanan yang lebih mengglobal.

Isu-isu keamanan yang muncul sebagai akibat perkembangan *drug trafficking* antara lain yaitu terorisme sebagai akibat kolaborasi yang dikembangkan antara kelompok pemberontak, paramiliter dan *drug trafficker* yang menyebabkan persoalan lain diantaranya yaitu meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya angka pengungsian, tersendatnya suplai energi. Di tahun 1998, Pemerintah Kolombia memperkirakan uang yang dihasilkan dari industri obat bius merupakan sumber terbesar bagi kelompok-kelompok teroris Kolombia untuk menjalankan operasinya. Dilaporkan bahwa uang yang dihasilkan kelompok ini dari industri obat bius sebanyak \$ 551 juta, \$ 311 juta dari pemerasan, dan \$ 236 juta dari penculikan.³⁵ Uang-uang tersebut digunakan untuk kebutuhan survival mereka termasuk membeli persenjataan. Perbatasan yang “terbuka” antara Kolombia dengan negara-negara tetangga, menyebabkan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata, *drug traffickers* dan aktivitas-aktivitas ilegal lainnya keluar masuk wilayah Kolombia semau mereka. Bahkan kelompok pemberontak seperti FARC dan ELN dan *drug traffickers* menggunakan wilayah negara lain sebagai jalur lalu lintas narkotika dan senjata. Aktivitas mereka tidak jarang menimbulkan kekacauan dan kerusakan di wilayah negara tetangga. Seperti di Januari 2003, paramiliter menyerang dua desa di Panama dan membunuh tiga orang, serta menculik tiga orang jurnalis AS. Pada bulan April 2002 FARC membangun *base camp* di wilayah Venezuela. FARC menculik dan memeras para petani Venezuela. Bahkan ditemukan indikasi bahwa Paramiliter Kolombia dan Venezuela telah bekerjasama dalam menjalankan operasinya.³⁶

Selain terorisme ancaman keamanan yang lain adalah proleferasi senjata yang diakibatkan oleh adanya konflik bersenjata, kejahatan terorganisir dan angka kejahatan dan kriminalitas. Kolombia merupakan Negara paling berkonflik di

kawasan Amerika Latin, yang memiliki peringkat angka kematian tertinggi dunia dengan rata-rata 77,5 kematian per 100.000 orang di tahun 1995. Angka ini hampir mencapai 5 kali rata-rata angka kematian di negara-negara Amerika Latin atau sekitar 16,7 per 100.000 orang. Berdasarkan data kepolisian nasional 85 % kematian tersebut disebabkan oleh penggunaan senjata ringan.³⁷ Kolombia diperkirakan memiliki lebih dari 3 juta senjata ilegal yang beredar diluar senjata legal sejumlah kurang lebih satu juta. Hampir 70 % senjata ilegal berasal dari Amerika Tengah yang diselundupkan melalui Gurun Uraba, Morrosquilo di laut Karibia, Jurado di Laut Pasifik atau melalui Tapon del Darien di perbatasan Kolombia dan Venezuela. Secara langsung maupun tidak, kondisi tersebut menyebabkan Kolombia menjadi negara importer senjata terbesar terutama bagi *small arms* dan *light weapons* di *Western Hemisphere*.

Ancaman yang ketiga adalah degradasi lingkungan sebagai akibat penebangan hutan besar-besaran dan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam industri obat bius yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Kolombia telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Hutan tropis di Kolombia terutama yang terletak di lembah sungai Amazon, telah digunduli untuk digunakan sebagai areal penanaman koka dan laboratorium pengolahan koka rahasia. Beberapa wilayah di Kolombia seperti Putumayo, Guaviare, Caquetá, Nariño, Tolima, Sur de Bolivar, Norte de Santander, Boyacá dan Antioquia yang merupakan paru-paru dunia, telah rusak sebagai akibat praktek pembukaan lahan untuk tanaman ilegal tersebut serta aliran sungai-sungai di wilayah tersebut tercemar oleh limbah buangan laboratorium pengolahan koka. Selama periode lima belas tahun dimulai tahun 1970, 700.000 hektar hutan hujan di lembah sungai Amazon rusak karena pembersihan lahan untuk penanaman koka dan pemrosesannya. Untuk satu hektar ladang koka membutuhkan kurang lebih empat hektar hutan harus dibersihkan.³⁸ Metode yang digunakan dalam pembersihan lahan lebih banyak dilakukan dengan cara tebang dan bakar. Metode ini dianggap paling efektif dan efisien, meskipun metode ini menyebabkan polusi udara akibat asap, yang dirasakan langsung akibatnya oleh beberapa negara tetangga Kolombia.

Dari penjelasan tersebut diatas, tampak bahwa kelemahan Kolombia sebagai negara dimanfaatkan oleh organisasi *drug trafficking* untuk beroperasi dengan resiko rendah, sehingga mengakibatkan setidaknya ketiga ancaman keamanan tersebut memiliki potensi untuk berkembang dan mengancam negara-negara lain khususnya yang berbatasan langsung dengan Kolombia.

Kesimpulan

Kesadaran tentang munculnya ancaman baru bagi keamanan dunia yang bersumber dari *the world's most poorly governed countries*, membawa sebuah konsekuensi untuk mengkaji lebih dalam, bagaimana fenomena *weak state* dapat menjadi ancaman keamanan dunia. Sebuah Negara yang memiliki *functional holes* membuka peluang

bagi kejahatan transnasional untuk berkembang biak dengan resiko rendah (*low risk*) dan menjanjikan keuntungan besar (*high profit*).

Kasus Kolombia telah menunjukkan bahwa *weak state* berpotensi besar menjadi ancaman ketika terjadi infiltrasi *transnasional organized crime* – dalam hal ini *drug trafficking* – ke dalam wilayah teritorialnya dan Negara sebagai institusi yang paling bertanggung jawab atas keamanan Negara, tidak memiliki kapabilitas dan keinginan untuk menghadapinya. Sementara itu, *drug trafficking* sebagai bentuk ancaman baru sekaligus mendorong timbulnya ancaman-ancaman baru lainnya seperti terorisme, proleferasi senjata dan degradasi lingkungan. Hal tersebut menjadikan persoalan keamanan yang lebih kompleks dan ruang lingkupnya menjadi lebih luas dan terdistribusi.

Endnotes

- ¹ Steward Patrick, *Weak State and Global Threats: Assessing Evidence of Spillovers*, Working Paper No.73 Januari 2006, dalam www.cgdev.org
- ² Richard L.Millet, *Colombia's Conflicts: The Spillover Effects of A Wider War*, dalam <http://www.carlisle.army.mil/ssi/pubs/2002/colomcon/colomcon.pdf> diakses 30 Juni 2005
- ³ *ibid*
- ⁴ Barry Buzan, *People, State and Fear: The National Security Problem In International Relations*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, England, 1983, p.36 - 72
- ⁵ Lihat dalam Robert Jackson, *Quasi State, Sovereignty, Internastional Relations and The third World*, Cambridge, CUP, 1990
- ⁶ Salah satu yang seringkali menimbulkan kebingungan dalam memahami apa yang seharusnya disebut sebagai lingkup, kekuatan atau kemampuan. Lihat dalam Francis Fukuyama, *op.cit*, p.9
- ⁷ Max Weber, *Economy and Society*, Bedminster Press, New York, 1968
- ⁸ Lihat tulisan Shaoguang Wang, "The Problem of State Weakness", dalam *Journal of Democracy*, Vol.14, No. 1 Januari 2003
- ⁹ Phil Williams, "Transnational Criminal Enterprises, Conflict and Instability", dalam Chester A.Croaker, Fen Osler Hampson dan Pamela Aall (ed), *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict* (ed), United State Institute of Peace, Washington DC, 2001, p.99 - 100
- ¹⁰ Dengan definisi semacam ini, cakupan *organized crime* menjadi sangat luas, di mana di dalamnya bisa termasuk penyelundupan senjata, perdagangan narkoba, benda-benda antic, perdagangan organ tubuh manusia dll. Lihat dalam Rohan Gunaratna, *Organized Crime Component in Terrorist Network*, bahan presentasi dalam 10th Meeting of CSCAP Working Group on Transnational Crime, CSIS, Jakarta 8-9 November 11

- 11 Suchit Bubbongkarn, Carolina Hernandez, dan John Mc Farlane, "introduction" dalam C Hernandez dan G Pattugalan (eds), *Transnational Crime and Regional Security in The asia Pacific*, Manila, ISDS dan CSCAP
- 12 Moises Naim, *The Five Wars of Globalization*, Foreign Policy, January/February 2003, p.28
- 13 Phil Williams, "Transnational Criminal Enterprises, Conflict and Instability", dalam *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict* (ed), United State Institute of Peace, Washington DC, 2001, p.99 - 100
- 14 Phil Williams, *Threats from Non State Actors / Criminal Networks*, dalam http://www.un-globalsecurity.org/pdf/Williams_paper_nonstate_actors_crime.pdf#search='Threats%20from%20non%20state%20actors%20criminal%20networks' diakses 5 April 2006
- 15 Phil Williams, *op.cit*, p.100
- 16 Robert I. Rotberg, *op.cit*
- 17 Steward Patrick, *op.cit*, p.12
- 18 Stewart Patrick, dalam artikel "Weak States and Global Threats: Fact or Fiction?", *The Center for Strategic and International Studies and the Maddachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly*, 2006, p.33
- 19 Gabriel Marcella, *The United States and Colombia: The Journey from Ambiguity to Strategic Clarit*, SSI Monograph, Mei 2003
- 20 Lihat dalam tulisan Fernan E. Gonzalez, *The Colombian Conflict in Historical Perspective*, dalam <http://www.c-r.org/accord/col/accord14/historicalperspective.shtml>. diakses Desember 2006
- 21 Phillip McLean, "Colombia: Failed, Failing or Just Week? ", *The Washington Quarterly*, Summer 2002, p.123-134
- 22 Lihat dalam tulisan Fernan E. Gonzalez, *The Colombian Conflict in Historical Perspective*, dalam <http://www.c-r.org/accord/col/accord14/historicalperspective.shtml>. diakses Desember 2006
- 23 *Comission de studios sobre la violencia, Colombia: Violencia y Democracia:Informe presentado al Ministerio de Gobierno*, Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 1988 dalam *Colombia's Conflicts: The Spillover Effects of A Wider War*, <http://www.carlisle.army.mil/ssi/pubs/2002/colomcon/colomcon.pdf> diakses 30 Juni 2005
- 24 Lihat dalam Laporan Penelitian Ratih Herningtyas, *Weak State dan Ancaman Global: Kasus Kolombia*, Program Hibah Kompetensi A3, Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, UMY, 2007
- 25 Sebagai bahan perbandingan, perbatasan AS-Mexico sepanjang 3.600 km saja sangat sulit untuk dikontrol bahkan oleh aparat pemerintah AS sekalipun
- 26 Gabriel Marcella, *op.cit*, p.16,
- 27 Gabriel Marcella, *The United State and Colombia: The Journey from Ambiguity*

- to Strategic Clarity, working paper No. 13 dalam <http://www.miami.edu/nsc/publications/NSCPublicationsIndex.html#WP>
- ²⁸ Edmundo Jarquin dan Fernando Carrillo, *Justice Delayed: Judicial Reform in The Americas*, Washington: Inter-American Development Bank, 1998, p.11
- ²⁹ Shaoguang Wang, "The Problem of State Weakness", dalam *Journal of Democracy*, Vol.14, No. 1 Januari 2003
- ³⁰ Labrousse dan Wallon, *La planète des drogues*, p.32
- ³¹ *ibid.*, p.3.
- ³² Lihat Savona dan DeFeo, *Money Trails*, p.65.
- ³³ Lihat Lee, *The White Labyrinth*, p.3.
- ³⁴ Office of Drug Control Policy, *National control Strategy*, 2000 dalam <http://www.whitehousedrugpolicy.gov> 1 Maret 2000
- ³⁵ Angel Rabasa and Peter Chalk, *Colombia Labyrinth: The Sinergy of Drugs and Insurgency and its Implications for Regional Stability*, RAND, Pittsburg, 2001, p.32
- ³⁶ International Crisis Group, *Colombia and its Neighbours: The tentacles of Instability*, ICG Latin America Report, 8 April 2003
- ³⁷ Lihat dalam Kim Cragin dan Bruce Hoffman, *Arms Trafficking and Colombia*, RAND Corporation, 2003
- ³⁸ Drug Enforcement Agency

Referensi

- Bubbongkarn, Suchit, Carolina Hernandez, dan John Mc Farlane, "introduction" dalam C Hernandez dan G Pattugalan (eds), *Transnational Crime and Regional Security in The asia Pacific*, Manila, ISDS dan CSCAP
- Buzan, Barry, *People, State and Fear: The National Security Problem In International Relations*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, England, 1983
- Croaker, Chester A., Fen Osler Hampson dan Pamela Aall (ed), *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict* (ed), United State Institute of Peace, Washington DC, 2001
- Comission de studios sobre la violencia, "Colombia: Violencia y Democracia":Informe presentado al Ministerio de Gobierno, Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 1988 dalam *Colombia's Conflicts: The Spillover Effects of A Wider War*, <http://www.carlisle.army.mil/ssi/pubs/2002/colomcon/colomcon.pdf> diakses 30 Juni 2005
- Gonzalez, Fernan E., *The Colombian Conflict in Historical Perspective*, dalam <http://www.c-r.org/accord/col/accord14/historicalperspective.shtml>. diakses Desember 2006
- Gunaratna, Rohan, *Organized Crime Component in Terrorist Network*, bahan presentasi dalam 10th Meeting of CSCAP Working Group on Transnational Crime, CSIS,

- Jakarta 8-9 November
- Herningtyas, Ratih, *Weak State dan Ancaman Global: Kasus Kolombia*, Laporan Penelitian Program Hibah Kompetisi A3, Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, UMY, 2007
- Jackson, Robert, *Quasi State, Sovereignty, Internastional Relations and The third World*, Cambridge, CUP, 1990
- LeGrand, Catherine C, "The Colombian Crisis in Historical Perspective", dalam *Colombia in Contex*, April 2001, http://www.clas.berkeley.edu.7001/colombia/working_papers/working_paper_legrans.html
- Marcella, Gabriel, *The United States and Colombia: The Journey from Ambiguity to Strategic Clarit*, SSI Monograph, Mei 2003
- McLean, Phillip, "Colombia: Failed, Failing or Just Week ?", *The Washington Quarterly*, Summer 2002
- Millet, Richard L., *Colombia's Conflicts: The Spillover Effects of A Wider War*, dalam <http://www.carlisle.army.mil/ssi/pubs/2002/colomcon/colomcon.pdf> diakses 30 Juni 2005
- Naim, Moises, *The Five Wars of Globalization*, Foreign Policy, January/February 2003
- Ovalle, Carlos Alberto Osvinan, "Insights of Colombia's Prolonged War" dalam, *JFQ. Issue*, No. 42 3rd Quarter 2006, www.ndupress.ndu.edu
- Patrick, Stewart, *Weak State and Global Threats: Assessing Evidence of Spillovers*, Working Paper No.73 Januari 2006, dalam www.cgdev.org
- Patrick, Stewart, dalam artikel "Weak States and Global Threats: Fact or Fiction?", The Center for Strategic and International Studies and the Maddachusetts Institute of Technology, *The Washington Quarterly*, 2006
- Wang, Shaoguang, "The Problem of State Weakness", dalam *Journal of Democracy*, Vol.14, No. 1 Januari 2003
- Weber, Max, *Economy and Society*, Bedminster Press, New York, 1968
- Williams, Phil, *Threats from Non State Actors / Criminal Networks*, dalam http://www.un-globalsecurity.org/pdf/Williams_paper_nonstate_actors_crime.pdf#search='Threats%20from%20non%20state%20actors%20criminal%20networks' diakses 5 April 2006

Disharmoni Negara dan Pasar dalam Rezim Neoliberal

ABSTRACT

This article tries to explain that the neoliberal regime has created an unequal relationship between state and market, especially in developing countries. The relationship between state and markets in developed countries have a different mode than similar relationship in developing countries. In developed countries, the mode of the state and market relations is "state make market". By contrast, in developing countries, the mode is "market make-state" relation. As a result of two different modes that is, neo-liberalism gave birth to the patterns of disharmony in developing countries. It brings disharmony due to domestic political life, and in the context of the struggle of the state in international political-economy.

Ade Marup Wirasenjaya

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas ISIPOL, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Arsitektur ekonomi-politik neoliberal saat ini ditandai dengan munculnya fase konsolidasi antara kekuatan negara (*state*) dan korporasi. Konsolidasi ini terutama berlangsung antara negara-negara yang termasuk ke dalam negara industri utama yang memiliki hubungan langsung dengan korporasi raksasa internasional. Bagi negara-negara ini, hubungan antara negara dan korporasi berlangsung secara harmonis. Sementara bagi negara-negara yang lemah dari sisi industri, hubungan negara dan rezim ekonomi internasional berlangsung secara tidak harmonis. Tulisan ini terutama ingin memaparkan bagaimana rezim neoliberal yang memberi ruang harmonis bagi relasi negara dan pasar di negara-negara industri utama melahirkan hubungan yang tidak harmonis di negara-negara berkembang. Lebih jauh, tulisan ini akan melihat munculnya fase pendiplinan negara-negara berkembang oleh rezim pasar internasional. Pendisiplinan itu tidak semata-mata dalam konteks ekonomi, namun juga berlangsung dalam espek politik. Agenda-agenda politik domestik seperti demokratisasi merupakan risiko dari pendiplinan tersebut.

PERTEMUAN KEMBALI NEGARA DAN PASAR DALAM STRUKTUR PASCA-FORDISME

Fase kolonialisme telah menumbuhkan kapitalisme di negara-negara Eropa melalui arus modal yang bergerak secara langsung melalui relasi *state qua state*. Pertumbuhan rejim kapitalis di negara-negara Eropa seperti Belanda, Jerman, Inggris dan Prancis, Italia berlangsung dalam hubungan masing-masing negara tersebut dengan negara jajahan mereka di Asia maupun Afrika. Di kemudian hari, negara-negara Eropa yang disebutkan tersebut menjadi kampium negara kapitalis di dunia. Kolonialisme memompakkan pertumbuhan modal di dunia kapitalis. Transformasi kapitalisme pada level global berlangsung dalam transformasi negara-kolonial pada level domestik. Artinya, ketika negara-negara kapitalis utama mulai menggeser ruang kedaulatan negara ke lanskap yang lebih luas dan melampaui teritori mereka, pada saat yang sama di negara pasca-kolonial berlangsung resurgensi peran negara untuk mengatasi hambatan modal. Peran negara diperluas di negara-negara yang kuat secara ekonomi, namun mengalami reduksi pada negara-negara yang ekonominya sangat lemah.

Konsolidasi kapitalisme dibaca secara berbeda oleh sejumlah ahli. Imanuel Wallerstein menyebut istilah kapitalisme yang menyejarah (*historical capitalism*) untuk melihat tahap konsolidasi ini. Dengan menyebut kapitalisme sebagai “...the first and foremost a historical social system”¹, Wallerstein melihat pengorganisasian kapitalisme sebagai struktur ekonomi yang semakin solid, menjadi sistem dunia (*world system*). Sistem dunia dibayangkan Wallerstein sebagai sistem ekonomi global yang memberi kemungkinan sirkulasi aktor dan pusat pertumbuhan ekonomi. Gagasan Wallerstein tentang sistem dunia secara teoritis ingin mencoba keluar dari gagasan dependensia yang melihat relasi negara pasca-kolonial dan rejim pasar dalam logika yang statis, terutama ketika mengajukan kategori *center* dan *periphery* atau metropolis dan satelit.² Bagi Wallerstein, status yang diberikan kalangan dependensia tidak menjelaskan apapun atas perkembangan dunia kapitalis, terutama pengabaianya atas negara-negara yang pernah menjadi aktor kapitalisme yang pernah ada dalam sejarah. Dalam gagasan Wallerstein, sistem dunia adalah “a unit with a single division of labor and multiple cultural system”³ Kapitalisme berkembang dari sistem mini, sistem kekaisaran dunia dan kemudian menjadi sistem ekonomi dunia. Inti dari perkembangan ini, menurut Wallerstein, adalah munculnya proses pembagian kerja (*division of labor*) yang terus menerus dan lebih canggih. Dalam perkembangan itulah Wallerstein melihat ruang bagi tampilnya negara berkembang atau pinggiran untuk terlibat dalam pembagian kerja dunia kapitalis. Negara pinggiran atau *periphery*, jika berhasil terlibat dalam pembagian kerja itu, akan mengalami kenaikan kelas menjadi negara *semi-periphery*, dan bukan tidak mungkin akan menjadi negara *center* atau pusat. Itulah yang berlangsung dalam pembangunan kapitalis di negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan China dimana integrasi dengan rejim pasar global tidak selalu harus berakhir dengan eksploitasi, dominasi dan juga dependensi negara pasca-

kolonial atas negara maju.⁴

Sementara itu pandangan lain dikemukakan Robert W Cox yang melihat proses strukturisasi kapitalisme menjadi sangat solid setelah melewati tahap yang disebutnya *competitive capitalism* yang berlangsung pada pertengahan abad ke-19 dan berkembang menjadi fase *monopoly capitalism* sejak akhir abad ke-19. Perkembangan dunia kapitalis, bagi Cox, banyak ditentukan oleh apa yang disebut *new modes of social relations of production*.⁵

Setelah fase kolonialisme berakhir di negara-negara Asia-Afrika tahun 1950-an, pola konsolidasi modal mengalami perubahan penting. Perubahan tersebut memberi jejak signifikan bagi transformasi dunia kapitalis yang semula sangat dipimpin oleh negara (*state-led capitalism*) menjadi kapitalisme yang terkooordiansi dalam kelahiran rejim ekonomi dunia (*organized capitalism*). Perlu ditambahkan, bahwa bersamaan dengan itu pusat kapitalisme mulai bergeser dari Eropa ke Amerika. Transformasi ini bukan semata-mata perubahan kiblat kapitalisme, namun juga membawa implikasi bagi proses regimentasi ekonomi dunia. Para pengkaji ekonomi-politik dan studi pembangunan, menyebut fase konsolidasi pertama dunia kapitalis ini dengan istilah fordisme.⁶

Fordisme menandai konsolidasi kapitalisme sekaligus dianggap sebagai *golden age of capitalism* pasca perpindahannya dari Eropa ke Amerika. Istilah ini sekaligus menjadi awal dari logika kapitalisme baru dalam upaya melakukan akumulasi modal. Pada fase pra-fordisme, negara mencipta pasar – yang direpresentasikan oleh korporasi – sebagaimana sejarah kapitalisme Eropa. Namun, fase fordisme menyajikan lanskap yang memutar logika itu, dimana korporasi lah yang membawa negara ke luar dari wilayahnya, melakukan ekspansi, dan dalam banyak hal, menggerakkan negara untuk memerankan dirinya sebagai *regulatory power* untuk menjaga pertumbuhan pasar atau akumulasi modal.⁷

Fordisme menjadi perhatian para pengkaji teori pembangunan internasional dan hubungan internasional karena memiliki dampak pada penciptaan arsitektur ekonomi di negara kapitalis, yang selanjutnya memberi dampak bagi perluasan pasar sebagai arena ekonomi-politik. Setidaknya terdapat empat karakteristik fordisme yang dianggap menjadi panorama baru kapitalisme antara lain. *Pertama*, produksi bersifat masal yang didasarkan pada pembagian kerja yang rigid dan mengandalkan aliran produksi melalui jaringan distribusi (*conveyor belt*). *Kedua*, konsumsi tingkat tinggi yang didasarkan pada upah pekerja serta kehadiran organisasi pekerja sebagai bagian penting unit produksi. *Ketiga*, jaminan sosial (*social security*) sebagai bagian penting dari dunia korporasi. Dan *keempat*, scope perdagangan berada pada level yang lebih luas, perluasan arena ekonomi yang ditopang oleh kehadiran rejim perdagangan maupun regulasi oleh negara untuk memberi jaminan stabilitas moneter.⁸

Fordisme dianggap merepresentasikan modernisasi Amerika, dan menjadi “blue print” bagi model pembangunan di banyak negara. Fordisme menjadi presentasi pal-

ing nyata dari gagasan Rostow tentang tahap paling puncak pembangunan⁹, yakni konsumsi tingkat tinggi (*high-mass consumption*). Inilah tahap yang antara lain ditandai *sectors of consumer durables and service take the lead*.

Bagi para pengkritik kapitalisme, fordisme menjadi awal bagi proses penundukkan (*subjection*) yang dilakukan oleh kalangan pemilik modal atas kaum pekerja. Fordisme dianggap sebagai momentum dimana “pasar mencari negara” untuk keperluan ekspansi modal. Kaum neo-marxis seperti Antonio Gramsci bahkan memandang fordisme sebagai sebuah formasi ekonomi dan perdagangan monopolistik, atau apa yang kemudian disebut Gramsci sebagai hegemoni. Gramsci, seperti yang dikutip Salamini, memandang Amerikanisasi dalam fordisme sebagai: “.....requires a particular environment, a particular social structure (or least a determined intention to create it) and a certain type of State. This State is the liberal State, not in the sense of free-trade liberalism of of effective political liberty, but in the more fundamental sense of free initiative and economic individualism which, with its own means, on the level of ‘civil society’, through historical development, itself arrives at a regime of industrial concentration and monopoly¹⁰.

Hadirnya fordisme berlangsung bersamaan dengan mulai munculnya institusionalisasi ekonomi dunia. Seperti sudah disinggung di bagian awal bab ini, fordisme disebut-sebut sebagai penanda dari “the golden age capitalism” yang berlangsung kurang lebih selama tiga dasawarsa (1944-71). Pada saat yang bersamaan, proyek institusionalisasi pasar dan negara berlangsung dengan hadirnya sistem Bretton Wood.

Kehadiran fordisme yang membuat persebaran kekuatan korporasi di satu sisi, dan proses institusionalisasi yang menjadi awal bagi proses internasionalisasi negara pada sisi yang lain, merupakan momentum baru bagi kapitalisme untuk mengembangkan jaringnya dalam tatanan dunia. Robert W Cox, seorang neo-Gramscian dalam studi hubungan internasional, menyebut periode ini sebagai periode hegemonik (*hegemonic period*).¹¹ Bagi Cox, hegemoni kapitalisme yang menggunakan pintu masuk dunia industri fordistik, semakin lama mendapat dukungan dari proses institusionalisasi pasar. Hegemoni berlangsung karena yang lahir dari proses ini adalah kepemimpinan moral dan intelektual, bukan semata-mata kepemimpinan ekonomi.¹² Mulai periode ini jalur internasionalisasi bagi mode produksi fordisme diproyeksikan pada lembaga-lembaga internasional yang didirikan pada periode yang sama. Seperti ditulis Sussane Soederberg, periode ini menjadi:*one way universal norms of a hegemonic state like the US are transmitted to other subordinat state it through international organizations, such as the United Nations, the IMF and the World Bank*.¹³

Intinya, fordisme merupakan kapitalisme yang dikendalikan oleh kekuatan terpusat meskipun pusat-pusat pertumbuhan dan kekuatan pendukungnya disebar ke berbagai wilayah. Pola ini kemudian direplikasi oleh banyak perusahaan raksasa maupun oleh negara-negara maju ketika merelokasi industri mereka di negara-negara berkembang.

Pada perkembangan mutakhir, logika fordisme bisa kita simak dalam bentuk bisnis franchise yang akhir-akhir ini menjadi trend dunia. Secara singkat, kapitalisme fordisme memperlihatkan industri yang seolah-olah menyebarkan kekuasaan dan pertumbuhan, namun sebenarnya semua unit bekerja untuk menyalurkan akumulasi modal pada kekuatan sentral.

Fordisme kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, seperti ke Asia. Perluasan arena negara dalam gelanggang pasar internasional banyak ditentukan oleh munculnya kekuatan korporasi dari suatu negara. Meluasnya peran negara, dengan kata lain, banyak ditentukan oleh munculnya kekuatan korporasi dari suatu negara. Negara seperti Korea Selatan, misalnya, akan memperluas peran dan posisinya sebagai *liberal state* seiring dengan perluasan peran yang dimainkan oleh korporasi raksasa yang lahir dari negeri ini seperti berbagai produk elektronika (Samsung, LG) maupun otomotif (KIA, Hyundai). Hal yang sama berlaku bagi Finlandia, sebuah negara kecil di Eropa, namun sejak tahun 90-an bisa memperluas arena negara ke dalam rejim internasional karena “didorong” oleh raksasa perusahaan seluler Nokia.

Sementara itu, negara-negara yang lemah secara ekonomi, yang gagal memunculkan kekuatan korporasi yang kompetitif dari negaranya, mengalami reduksi atas peran negara. Konstruksi tentang peran negara bahkan banyak ditentukan oleh posisi ekonominya dalam kelindan korporasi dan negara secara eksternal. Negara-negara yang berkuat dengan pilihan ideology, negara yang dilanda konflik etnik dan memiliki banyak kelompok politik di level domestik, dan negara yang memiliki sumberdaya alam melimpah namun gagal memunculkan korporasi, adalah gugusan negara yang lebih banyak mengalami liberalisasi dari luar dirinya. Iklim demokratisasi yang menjadi lini politik dari proses neoliberalisasi memunculkan gelombang partisipasi politik public baik melalui saluran kekuatan politik konvensional seperti partai politik maupun melalui saluran non-konvensional seperti munculnya gerakan-gerakan resistensi massa yang sporadis.

Dalam arus konsolidasi rejim neoliberal, relokasi industri merupakan salah satu bentuk paling nyata dari upaya integrasi negara berkembang ke arena pasar global. Di negara pasca-kolonial seperti Indonesia, relokasi industri ini menempatkan Indonesia sebagai basis produksi bagi sejumlah merek dunia seperti dalam kasus pendirian pabrik otomotif dan elektronik dari Jepang dan Korea di Indonesia, pabrik sepatu dan konveksi milik korporasi besar seperti Nike dan GAP dan lain-lain. Indonesia memberi tempat yang layak bagi ekspansi korporasi tersebut dengan menyediakan para pekerja, yang dalam standar negara pusat kapitalisme, diupah sangat murah.

Berubahnya pola-pola produksi membuat segregasi negara oleh pasar sebagaimana diajukan oleh pandangan liberalisme, berakhir. Perubahan ini juga memberi ruang konstruksi baru tentang relasi negara dan pasar. Gagasan tentang pasar mengalami perubahan penting dalam fase ini. Bagi kalangan neoliberal, pasar tidak lagi dipahami sebagai sebuah tatanan atau struktur ekonomi, tetapi merupakan struktur sosial.

Pemahaman ini mengandaikan bahwa dunia sosial, termasuk sistem politik, tidak lagi hadir dalam arena terpisah dari pasar, namun juga memberi proteksi dan mengawal pasar agar bisa bekerja menurut hukum-hukumnya.

Lebih jauh, Bonano dkk membuat konstruksi negara pada fase pasca Fordisme di Asia.¹⁴ Pada fase ini, negara merupakan entitas yang hidup dalam kontrol sosial. Argumen ini mengemukakan bahwa arena kedaulatan dan peran negara akan diperluas oleh kehadiran struktur ekonomi global, terutama karena kehadiran perusahaan trans-nasional. Peran negara-negara maju diperluas bersamaan dengan tumbuhnya perusahaan dan korporasi raksasa yang memiliki hubungan dengan mereka. Intrusi rejim pasar di level domestik, di sisi negara pasca-kolonial, justru semakin menciptakan kelas sosial baru yang kehadirannya menuntut peran negara untuk memberi perlindungan bagi akumulasi modal. Negara juga menjadi mitra korporasi internasional yang operasinya menuntut perluasan peran negara, sepanjang perluasan itu memberi perlindungan bagi arus akumulasi capital.

Konsolidasi pasar dan negara seperti yang dilakukan oleh rejim neoliberal tidak banyak menyebarkan pendapatan ke berbagai belahan dunia. Kenyataannya, konsentrasi modal berlangsung hanya di negara-negara yang memiliki hubungan langsung dengan berbagai perusahaan raksasa. Salah satu kecenderungan praktik neoliberalisme dalam mengkonsolidasi negara dan pasar adalah munculnya institusi yang bisa menjembatani bekerjanya pasar dan negara.

Hadirnya institusi-institusi ini pada satu sisi memberi persuasi kepada masyarakat internasional tentang globalisasi dunia dimana semua aktor memiliki posisi, peluang dan kesempatan yang sama untuk terlibat di dalamnya. Argumen ini memang khas kalangan hiperglobalis yang melihat bahwa globalisasi dibayangkan akan memberi “berkah” bagi semua negara dan semua negara berposisi setara dalam konstelasi ekonomi-politik dunia.¹⁵ Eksponen yang mendukung pandangan ini antara lain kalangan multi-nasional dan negara-negara industri. Namun demikian, institusi internasional yang menopang neoliberalisme sesungguhnya merupakan korporasi. Kalangan *pessimist globalist* seperti Hist dan Thompson¹⁶ menyebut bahwa globalisasi yang fair dan memberi ruang setara bagi semua negara sebenarnya tak pernah ada. Keduanya juga menyangsikan tentang kiprah *trans-national corporations* (TNC) dalam kontribusinya bagi keadilan ekonomi dunia. Perusahaan transnasional yang benar-benar murni tidak pernah ada. Hampir semua TNC besar dunia pada umumnya berbasis negara nasional dan kegiatan perdagangan mereka di seluruh dunia bertumpu pada kekuatan produksi dan pemasaran di lokasi nasional. Selain itu, keduanya juga menunjukkan sejumlah temuan bahwa lalu-lintas modal tidak mengakibatkan berpindahannya penanaman modal dan kesempatan kerja secara besar-besaran dari negara maju ke negara berkembang. Sebaliknya, penanaman modal asing (*foreign direct investment*) justru banyak terpusat di negara-negara industri maju, sementara mayoritas Dunia Ketiga tetap menempati posisi di pinggiran baik dari sisi investasi

dan perdagangan.¹⁷

Perusahaan multi-nasional, negara-negara industri utama dan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral telah membentuk pakta dominasi dalam arsitektur ekonomi global. Bagi para pengkritiknya, tiga gugus globalisasi tersebut membangun koordinasi, baik yang secara laten maupun secara manifest, untuk mengatur pasar dan aspek-aspek ekonomi lainnya. Pasar yang murni, yang menjalankan modus *invisible hands* – sebagaimana keyakinan kaum Smithian, sebenarnya tak pernah berlangsung. Pasar, seperti ditegaskan kembali oleh Hirst dan Thompson,¹⁸ bukanlah entitas yang tidak bisa dikendalikan dan sama sekali tidak punya imunitas dari kepentingan pakta dominasi. Pasar selaku punya jejak dan afinitas struktural dengan lembaga-lembaga dominan yang hadir pada fase neoliberal saat ini.

NEOLIBERALISME DAN MITOS *INVISIBLE HANDS*

Argumen tentang bekerjanya pasar secara swatata (*self-regulating*) dalam kapitalisme membuat diyakini oleh Karl Polanyi dalam *Great Transformation*. Bayangan tentang kapitalisme yang “akan bekerja secara alamiah” sebagaimana keyakinan kaum liberal nampaknya kian tidak bisa dilacak pada fase neoliberalisme atau globalisasi. Sementara bayangan kaum marxis yang melihat ada kontradiksi internal yang akan menghentikan laju kapitalisme, juga tidak kunjung terwujud. Soliditas kapitalisme dalam struktur keuangan dan perdagangan internasional memunculkan konstruksi yang mencerminkan bahwa pasar terlalu politis untuk dilihat sebagai gejala ekonomi dan terlalu ekonomik untuk dilihat secara politis. Baik kekuatan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan korporasi internasional maupun entitas politik seperti negara pada gilirannya menjadi dua entitas paling penting dalam mengkonstruksi rejim pasar global.

Karl Polanyi menyebut kapitalisme sebagai sebuah transformasi besar dalam ekonomi dunia. Transformasi itu berlangsung ketika negara hadir sebagai institusi yang menjembatani kepentingan pasar dan masyarakat industri. Meski demikian, Bagi Polanyi, kapitalisme memiliki ciri utama yakni sifatnya yang swatata (*self-regulate*). Ekonomi pasar atau kapitalisme, adalah ekonomi yang dikendalikan, diatur dan diarahkan oleh pasar sendiri dimana tatanan produksi dan distribusi barang-barang dipercayakan kepada mekanisme swatata tersebut.¹⁹

Gagasan dan konstruksi tentang kapitalisme Polanyi sebenarnya merupakan tafsir ulang atas gagasan pasar yang dipahami kaum liberalism klasik seperti Adam Smith. Bagi Polanyi, tak ada satupun entitas di luar pasar yang bisa campur tangan untuk mengendalikan proses berlangsungnya hukum pasar, termasuk di dalamnya negara. Swatata atau *self-regulating market* dipahami sebagai, semua produksi akan dijual di pasar dan semua pendapatan berasal dari penjualan-penjualan semacam itu Polanyi pada akhirnya menegaskan bahwa intitusionalisasi pasar hanya tumbuh dalam masyarakat pasar.²⁰ Meskipun demikian, Polanyi melihat bahwa kaum liberal dan

juga pengkritiknya dari kaum marxis sama-sama memberi postulasi yang menghambat bekerjanya pasar swatata. Dalam pandangan Polanyi, baik kaum liberal maupun marxis: “tidak lebih hanya menghalangi sebuah pandangan menyeluruh tentang masyarakat pasar.” Dengan cara pandang seperti itu, kaum liberal dan kaum marxis sebenarnya berada pada level analisis yang sama ketika kedua pandangan tersebut menempatkan kelas sosial sebagai pembentuk pasar. Kepentingan kelas, bagi Polanyi, hanya menawarkan penjelasan yang terbatas tentang gerakan-gerakan yang panjang di masyarakat. Polanyi bahkan menggunakan logika Marxian untuk mengkritik pandangan kaum marxis: nasib kelas sebenarnya lebih sering ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat ketimbang nasib masyarakat ditentukan oleh kebutuhan kelas.²¹

Gagasan tentang pasar swatata sebenarnya lebih banyak didasarkan pada harapan Polanyi tentang pasar yang seharusnya bekerja dan mengkonsolidasikan dirinya dilihat dari evolusi pasar sejak Revolusi Industri. Berbagai momentum sejarah dimana perdagangan dunia mencapai pada bentuknya yang mampu mengakomodasi semua aktor perdagangan seperti pada abad ke 18 dan 19, dibayangkan Polanyi sebagai gugusan sejarah yang kelak akan membentuk pasar swatata. Namun, kekuatan ekonomi dunia yang semula bersumber dari negara-negara pasca-kolonial, justru mengalami strukturalisasi yang amat rigid dan timpang pada abad ke 20 hingga sekarang. Dengan kata lain, pasar swatata yang dibayangkan Polanyi mengalami keruntuhan ketika pelaku-pelaku ekonomi dunia dari bekas negara penjajah menjadi kekuatan ekonomi raksasa dan serangkaian kebijakan penyesuaian terhadap struktur kapitalisme tersebut semakin menciptakan hadirnya aspek non-ekonomi dalam integrasi negara pasca-kolonial terhadap rejim pasar global.

Kegagalan imajinasi Polanyi tentang pasar yang “bekerja untuk dirinya sendiri”, serta absennya kekuatan revolusi sebagaimana dibayangkan kalangan marxis, membuat agenda rejim neoliberal semakin kuat. Ekspansi pasar dalam rejim neoliberal ditandai dengan posisi yang berubah dari status negara dan pasar di negara-negara yang ekonominya sangat kuat di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa Barat disbanding dengan relasi pasar dan negara yang berlangsung di negara pasca-kolonial. Di negara-negara yang ekonominya sangat kuat, terjadi gejala negara mencipta pasar (*state make market*), sedang di negara pasca colonial, berlaku sebaliknya dimana pasar mencipta negara (*market make state*).

Momentum *state make market* bisa ditelusuri pada rentang fase kolonialisme ketika bangsa-bangsa Eropa mengirimkan utusan dagangnya untuk mengambil barang-barang mentah dan hasil bumi dari tanah jajahan mereka di Asia, Afrika dan juga Amerika Latin. Setelah negara-negara berkembang tersebut menjadi negara merdeka secara formal, momentum *state make market* tersebut berlanjut dalam pembentukan lembaga-lembaga pemberi bantuan, supervisi maupun asistensi proyek-proyek pembangunan negara-negara pasca-kolonial. Negara-negara bekas penjajah terlibat dalam

evolusi rejim ekonomi internasional seperti IMF, Bank Dunia dan WTO yang kemudian menjadi pilar penting bagi hubungan baru negara-negara maju dan berkembang. Prinsip pengambilan suara yang didasarkan pada besarnya jumlah donasi pada lembaga-lembaga tersebut semakin memperkuat bahwa pasar *swatata* sebenarnya tak pernah ada.

Sebaliknya, gejala kedua – dimana pasar mencipta negara – bisa ditelusuri dalam serangkaian operasi maupun regulasi yang dihasilkan rejim ekonomi global yang kemudian menjadi *blue-print* politik di banyak negara pasca-kolonial. Seperti yang ingin dibuktikan tesis ini, fenomena *market make state* begitu kuat dalam agenda-agenda politik dari rejim pasar bebas di negara pasca-kolonial seperti Indonesia.

PENISIPLINAN NEGARA OLEH PASAR

Susan Strange, seorang neo-strukturalis dalam studi hubungan internasional mengajukan konsep *structural power* saat mengkaji hubungan negara dan pasar pada era globalisasi. Dalam karyanya yang berpengaruh, *State and Market*²², Strange melihat pola kekuasaan pada masa rejim neoliberal adalah kekuasaan yang tidak langsung, yakni kekuasaan yang didasarkan pada pembagian kerja antar institusi-institusi internasional yang ada, khususnya institusi ekonomi internasional. Susan Strange memberikan pengertian tentang kekuasaan struktural yang berbeda dengan pandangan kaum realis dalam studi hubungan internasional yang memandang kekuasaan dalam konteks relasional. Perbedaan penting dari gagasan kekuasaan tersebut terletak pada implikasi dari pola-pola hubungan yang tercipta antara aktor yang ada. Dalam pandangan realis, kekuasaan dipahami dalam evidensi material yang didapat. Sementara kekuasaan struktural lebih menakankan bentuk pendisiplinan yang berjangka panjang, sebuah upaya sistematis untuk menciptakan ketergantungan-esok (*future dependency*) bagi aktor-aktor sub-ordinat dalam struktur yang ada. Karena sifatnya yang struktural dan skope-nya yang mendunia, integrasi dengan struktur-struktur ekonomi dan politik dunia adalah jalan rasional, namun ada banyak pertaruhan bagi negara-negara pinggiran yang ekonominya sangat lemah untuk mendapatkan berbagai keuntungan.

Pada masa Pemerintahan George Bush, dunia gagasan Amerika Serikat dalam memandang dunia dipengaruhi oleh jaringan neo-konservatif²³ yang kurang lebih memiliki empat pandangan (doktrin) utama. *Pertama*, mereka memandang dunia secara hitam-putih dengan kategori moral yang amat absolut. *Kedua*, mereka fokus pada Amerika sebagai kekuatan unipolar dunia, yang juga memberi rekomendasi bagi penggunaan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan global Amerika. *Ketiga*, juga mengemukakan slogan (watchword) “global unilateralism” yang memberi rekomendasi Amerika untuk berkiprah dan menentukan dalam lembaga multilateral. Dan *keempat*, mereka melihat fase Reagen sebagai sebuah warisan (*legacy*) penting yang harus dilanjutkan oleh Amerika (saat ini) untuk mengambil peran lebih besar dalam institusi global.²⁴

Seperti dicatat dalam sejarah, era Ronald Reagan (1981-1989) disebut-sebut sebagai era penguatan paham neoliberalisme global. Bersama komplotannya Margareth Thatcher di Inggris waktu itu, keduanya mengembangkan mazhab *Reaganomics* dan *Thatcheromics*, yang membawa dunia pada fase neoliberal selama satu dasawarsa. Kedua mazhab tersebut percaya pada kompetisi sebeb-bebasnya dalam bidang ekonomi, namun pada saat yang sama negara hadir sebagai kekuatan yang sangat kuat untuk mengontrol ekonomi. Dengan kebijakannya itu, Presiden Reagan berfokus pada penyegaran stagnasi kondisi ekonomi, inflasi dan pengangguran. Pemotongan pajak juga bergabung dengan pengeluaran militer yang besar sebagai akibat yang amat tinggi dan pertambahan dramatis dalam utang nasional. Utang bertambah dengan sekitar 200% (3 kali lipat) antara saat Reagan menjabat dan saat penggantinya George H. W. Bush, menduduki jabatan. Kebijakan ekonomi Reagan tersebut membawa ketimpangan pada masyarakat Amerika dimana 10 persen teratas penduduk Amerika meningkat pendapatannya 16 persen, 5 persen teratas meningkat pendapatannya 23 persen, dan 1 persen teratas meningkat pendapatannya sejumlah 50%. Ini kontras jika dilihat dari sisi sebaliknya, dimana 80 persen terbawah kehilangan pendapatan dan yang terbawah (10% terbawah) kehilangan pendapatan 15%.²⁵

Pendisiplinan negara oleh pasar segera terlihat ketika negara-negara berkembang seperti Indonesia menyetujui Letter of Intent (LoI) bersama IMF. Bahkan, pengaruh struktur ekonomi neoliberal semakin besar ketika lembaga keuangan tersebut turut menentukan penyusunan Repelita dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di tahun 1998.²⁶ Padahal, Repelita dan GBHN merupakan *blue print* kebijakan pembangunan domestik yang mencerminkan kedaulatan negara dan menjadi representasi dari bekerjanya pemerintahan. Maka, ketika intrusi IMF berlangsung pada penyusunan Repelita dan GBHN, hal ini akan membawa implikasi yang hebat pada posisi negara, kapasitas pemerintahan, juga pada makna keterlibatan kekuatan politik domestik. Dengan pembacaan ini pula, momentum campur tangan IMF dalam penyusunan Repelita dan GBHN, sebenarnya merupakan reduksi atas peran-peran aktor politik, sebuah “kudeta struktural” yang amat nyata yang akan mempengaruhi relasi negara dan masyarakat di Indonesia saat ini. *****

Endnotes

- ¹ Lihat Immanuel Wallerstein, *Historical Capitalism*, Verso, London, 1983, hal.13.
- ² Dalam gagasan Paul Baran, seorang eksponen dari pandangan dependensia, perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat sangat berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran. Di negara pusat, kapitalisme bisa berkembang antara lain karena surplus yang ada di tangan pedagang dan tuan tanah diinvestasikan ke bidang industry. Sementara di negara kapitalis pinggiran yang terjadi justru sebaliknya dimana munculnya kekuatan ekonomi asing dalam bentuk penetrasi modal dari negara maju membuat surplus yang terjadi di kawasan

pinggiran diambil kembali oleh kekuatan eksternal atau kaum pendatang. Lihat misalnya Paul Baran, *The Political Economy of Growth*, Penguin Books, Australia, 1957. Juga review atas pemikiran Baran oleh Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Jakarta, hal, 57-58.

- ³ Wallerstein, seperti dikutip Roland H Chilcote, *Theories of Development and Under-development*, Westview Press, Colorado, 1994, hal.96.
- ⁴ Soewarsono dan Alvin S Yo, *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, LP3ES Jakarta, 1991, hal.177-204.
- ⁵ Robert W Cox, *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History*, Columbia University Press, 1987.
- ⁶ Fordisme adalah istilah yang dikemukakan oleh sebuah mazhab dalam teori pembangunan internasional, yakni mazhab regulation theory. Fordisme merujuk pada jaman emas kapitalisme tahun 1945-1973 atau sering disebut fase finance-led growth regime dimana Amerika menjadi tipikal kesuksesan dunia kapitalis. Fordisme mengacu pada pola-pola produksi baru kapitalisme yang mengikuti cara perusahaan otomotif Ford dari Amerika dalam mengakumulasi modal. Secara singkat, fordisme mengacu pada sistem produksi massal dan konsumsi tingkat tinggi, ekspansi bisnis namun tetap dikontrol oleh si pemilik modal. Untuk elaborasi fordisme, lihat misalnya Bonano et.al, "Global Post-Fordisme and Concept of The State", dimuat dalam *International Journal of Sociology of Agriculture and Food*, volume 4 tahun 1994. Juga artikel Gert Schmidt, "Globalization and Asian Fordism", dalam jurnal *Globality Studies*, No.11, tahun 2008.
- ⁷ Bonano, et.al, *ibid*
- ⁸ Schmidt, *ibid*, hal 5
- ⁹ Gagasan Rostow tentang lima tahap pembangunan yang ditulis dalam bukunya, *The Stage of Economic Growth* (1968) telah dianggap "kredo" dan prototype modernisasi di banyak negara. Menurut Rostow, lima tahap pembangunan tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap pra kondisi tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap kematangan dan tahap konsumsi massa tingkat tinggi. Lihat Richard Peet dan Elanie Hartwick, *Theories of Development*, The Guilford Press, New York, 1999.
- ¹⁰ Lihat Leonardo Salamini, *The Sociology of Political Praxis: An Introduction to Gramsci's Theory*, Routledge and Kegan Paul, London, 1981, hal. 149.
- ¹¹ Cox, *ibid*
- ¹² Cox, *ibid*
- ¹³ Lihat Susanne Soederberg, *Global Governance in Question: Empire, Class and New Common Sense in Managing North-South Relations*, Pluto Press, London, 2006, hal 6.
- ¹⁴ Uraian ini didasarkan pada artikel Bonano, et.al, *ibid*
- ¹⁵ Lihat David Held, et.al., *Global Transformation: Politic, Economic and Culture*,

Stanford University Press, 1999.

- ¹⁶ Lihat buku Paul Hirst dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos* (terj.), diterbitkan dalam versi Indonesia oleh Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- ¹⁷ Hirst dan Thompson, *ibid.*
- ¹⁸ *ibid*
- ¹⁹ Lihat Karl Polanyi. *Transformasi Besar: Asal-usul, Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang* (terj.), edisi Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 92.
- ²⁰ *Ibid*, hal 93.
- ²¹ *Ibid*, hal. 206.
- ²² Lihat Susan Strange, *State and Market*, Pinter Publisher, London, 1988.
- ²³ Neo-konservatisme adalah paham yang memadukan gagasan moral, politik dan ekonomi sekaligus. Ia adalah bentuk ortodoksi atas gagasan kapitalisme dan liberalisme. Buku menarik yang mengupas pengaruh neo-konservatif dalam pemerintahan Amerika di bawah Bush misalnya adalah *America Alone: The Neo-Conservatives and The Global Order* karya Stefan Halper dan Jonathan Clarke, Cambridge University Press, 2004. Dalam buku itu, keduanya melihat neokonservatif sebagai sebuah jaringan dan gerakan tanpa kartu nama, tanpa sekretariat, namun cukup memiliki pengaruh dalam administrasi pemerintahan Bush. Dalam bahasa keduanya, neo-konservatisme merupakan: “...not a-card-carrying organization. They do not hold meeting or convention. There in no absolute dividing line between who is and who is not a neo-concervatives...”, *ibid*, hal.10.
- ²⁴ *Ibid*, hal.11.
- ²⁵ Bonny Setiawan, “Neoliberalisme sebagai Kejahatan Rezim Global”, dalam *Jurnal Global Justice Update*, diterbitkan oleh Institute for Global Justice, Jakarta, edisi khusus, 2009.
- ²⁶ Bonny Setiawan, *ibid*, hal.20.

BIBLIOGRAFI

- Alvin S Yo dan Soewarsono, *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, LP3ES Jakarta, 1991.
- Paul Baran, Paul *The Political Economy of Growth*, Penguin Books, Australia, 1957.
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Jakarta, 1992.
- Bonano et.al, “Global Post-Fordisme and Concept of The State”, dimuat dalam *International Journal of Sociology of Agriculture and Food*, volume 4 tahun 1994. Juga artikel Gert Schmidt, “Globalization and Asian Fordism”, dalam *jurnal Globality Studies*, No.11, tahun 2008
- Cox, Robert W., *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History*, Columbia University Press, 1987.
- Chilcote, Roland *Theories of Development and Under-development*, Westview Press, Colo-

- rado, 1994.
- Halper, Stefan dan Jonathan Clarke, *America Alone: The Neo-Conservatives and The Global Order* Cambridge University Press, 2004.
- Hisrt, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos (terj)*, diterbitkan dalam versi Indonesia oleh Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Polanyi., Karl *Transformasi Besar: Asal-usul, Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang (terj.)*, edisi Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Strange, Susan, *State and Market*, Pinter Publisher, London, 1988.
- Salamini, Leonardo, *The Sociology of Political Praxis: An Introduction to Gramsci's Theory*, Routledge and Kegan Paul, London, 1981.
- Setiawan, Bonny "Neoliberalisme sebagai Kejahatan Rezim Global", dalam Jurnal Global Justice Update, diterbitkan oleh *Institute for Global Justice*, Jakarta, edisi khusus, 2009.
- Soederberg, Susanne *Global Governance in Question: Empire, Class and New Common Sense in Managing North-South Relations*, Pluto Press, London, 2006.
- Wallerstein, Immanuel *Historical Capitalism*, Verso, London, 1983.

Islamic Civil Society and Conflict Resolution Muhammadiyah Challenges Towards The Dynamics of Malaysia-Indonesia Relation

Abstract

This paper explains why Muhammadiyah, as the biggest Islamic movement in Indonesia, seems to be “silent” organization dealing with tension between Indonesia and Malaysia. There are several potential factors of conflict: boundary, culture and migrant workers. Furthermore, migrant worker and boundary may cause casualties. In this regard, Muhammadiyah with its developed and extended membership, organizational structure and international network should take major part in the conflict resolution. However, conflict resolution capacity to respond the tension is becoming problem for Muhammadiyah itself. This paper uses a theory put forward by Becky Nesbitt on the role of INGOs and NGOs in three levels of conflict, namely, latent conflict, escalating hostilities conflict and peace building. The first and second level of conflict require advocacy and the third level employs people empowerment in reducing further conflict. To enhance the capacity, Muhammadiyah needs to transform and formulate a strategic action. In addition, it also needs to improve cooperation, research and network with the international leader and community.

Keywords: Muhammadiyah, Islamic Civil Society, Conflict Resolution, NGO

Muhammad Zahrul Anam

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
zahrul@umy.ac.id

Introduction

Social and political instability problem faced by ASEAN members tend to weaken the regional ties. Following this, their foreign investors will withdraw the investment and move it to China.¹ In response to this issue, ASEAN Foreign Minister Meeting on July 2001, Hanoi, agreed to set up the Supreme Committee to mediate, investigate and overcome the conflicts taking place in Southeast Asian region such as South Chinese Sea and other boundary conflicts². Although the existence of the Supreme Committee is necessary, the most important actor of conflict is the state or group. According to the International Relations references recently, the non-state actors, such as Multinational Corporations (MNCs), International Governmen-

tal Organizations (IGOs) and International Non-Governmental Organizations (INGOs) also transnational groups, play a significantly role in the international issues like world peace, refugees, climate change, human trafficking, Human Right, culture and tourism³. Therefore, it should be taken into account since it deals with the conflict resolution.

In ASEAN, in spite of having more similarities than differences in language, religion, and ethnicity, Malaysia and Indonesia are prone to conflicts in terms of political and economic areas such as boundaries⁴ and migrant workers. As quoted by Anak Agung Banyu Perwita from the Indonesian Defense White Paper 2003, Malaysia is one of ten neighboring countries having border problem with Indonesia and other nine countries, namely, Singapore, Australia, Philippine, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste and the Republic of Pulau.⁵ Without serious concern, Indonesian's security and sovereignty will be in the critical circumstances due to possible annexation of the neighboring countries⁶. Given the ignoring territorial difficulties, it is clearly understandable why *Ambalat* as well as *Sipadan* and *Ligitan* Island conflict occurred between Malaysia and Indonesia.

Meanwhile, Indonesian migrant labor working in Malaysia is particularly an essential matter as it is discussed in the issue of global people mobility. Labor migration is affected by two structural factors. The first factor relates to "wage zone" or "wage differential" because differential level of wages and social benefits and thus standards of living, can have a major impact on migration between countries. The second factor is concerned with the demand for labor and the levels of unemployment. The combination of divergent wage and unemployment levels in different countries creates a powerful impetus for migration⁷. More Indonesian labors living in Malaysia are interested in high salary than knowledge improvement and skill enrichment. The other reason why they have been in Malaysia is the Indonesian unemployment rates.

Since economic turmoil in 1997, the Indonesian economy has increased slowly while the poverty has decreased gradually. In addition, the birth population has been likely to rise up. As a result, the huge unskilled rural people depart to the big cities in Indonesia to seek alternative job. Staying at home and being a farmer or fisherman is not the best way anymore for income generating of villagers. Farmers have no much budget to pay expenses in cost of production and operation. They, then, prefer to sell their land and be monthly-paid farmer. Moreover, Free Trade Agreement ratified by the government requires the state to withdraw subsidy and reduce tariff for imported good and services. It assumes that the cheapest product and the most efficient services will monopolize marketplace, whereas Indonesian product with high production cost will be hard to compete. For instance, a number of food supplies come from neighbors and China such as rice, powder and corn. The food price of local production is more expensive than the imported goods. Consequently, despite their insufficient knowledge, the majority of people attempt to change their job in

manufacture industry. In doing so, they go to business areas located both in home and abroad. Malaysia becomes a favorite destination to work in.

Like Saudi Arabia, a number of Indonesian female labors working for Malaysian family at home are suffered from bullying and violence like sexual abuse and torture. Indeed, they have contributed indirectly to Malaysian productivity⁸ at the family or community level. The question why this violence arises is probably because of gap between an expectation and reality. Malaysian families paying the agent find that their workers are unskillful people. It, then, triggers misunderstanding and misperception each other. Furthermore, they also are victims of human trafficking practiced by the international syndicate. Shortly, they need the government assistance in legal protection and training program in cultural matters and technical skill. These efforts are urgent to avoid latent conflict among societies. Similarly, Malaysian government should actively supervise and warn the employers for respecting human right. This violence causes critical injuries of Indonesian female workers.

To solve boundary and migrant disputes comprehensively, formal meeting between both governments is no longer enough. They represent their own state's economic interest as well as the citizen. For instance, to boost productivity and economic competitiveness, Malaysia will invite the great number of migrant labors who are ready at the first time with low income. Obviously, the economic interest and its citizen is the highest priority. Similarly, falling the rates of unemployment is Indonesian government's top agenda so that it encourages people to go abroad to work. Without strong commitment to implement the treaty, workplace violence remains unchanged. In contrast, informal meeting among communities is likely to be neutral endeavor from the political interest. Thus, it is a prospective way to precede peaceful negotiation both sides.

In politics and democracy, a civil society is third power after political party and market in which the people may control the decision-making process and evaluate its implementation. For instance, Muhammadiyah, the largest Islamic movement in Indonesia, proposed the presidency succession in 1998. It was a memorable experience for the Indonesian people when Soeharto, 30-year Indonesian President, resigned from his office because of People Power movement called Reform Movement (Reformasi). During Soeharto's administration, there was a pseudo democracy that the government strictly limited the freedom of expression and press. By Anti Subversion Bill, it allowed to capture anyone who was suspected to threat national security without any jurisdiction process. Meanwhile, the rate of economic growth was about 7% per year. National security is the main component to support the economy. It is evident that Soeharto allocated much more money to purchase the weapons in the National Budget Plan. Obviously, at that time, Indonesian arm force was very strong. It is not only for defense purposes but also for Soeharto's power sustainability. He created "Dwi Fungsi ABRI" (Arm Forces Dual Function), meaning that arm forces

havedouble functions: politics and security. For this reason, he appointed the elite arm force to be governors and mayors at local governance. As a result, they used repressive political communication to the public. It is widely believed that such a situation was a dominant factor to flourish the corruption, collusion and nepotism. This condition destroyed the Indonesian fundamental economy.

Since Indonesian reform, Indonesian political system has changed to be more democratic. *First*, people are free to establish the political party as long as it meets all requirements. *Second*, president and vice president will be voted directly. Third, there is bicameral system: House of Representative and Regional Representative (Dewan Perwakilan Daerah). Fourth, it is very difficult to impeach president and the president has two-year maximum period in the office. Amien Rais, one of the prominent figures of Muhammadiyah, contributed this political change. He also encourages the parliament members of the Partai Amanat Nasional (the National Mandate Party) to continue his reform agenda. Two ways communication of Muhammadiyah and political parties will achieve the positive impact for future politics.

Relatingto fluctuating relationship betweenMalaysia and Indonesia, Muhammadiyah as the Islamic civil society of Indonesia has opportunity to enhance cooperation among societies and reconcile the conflict possibilities. This paper will be divided into three parts. The first part will highlight the Malaysia-Indonesia Relations conflict in the historical perspective. It discusses the time frame of cooperation and confrontation between them. The second part of this research willdescribeCivil Societyand Conflict Resolution theoretical framework. Finally, the research will explain how Muhammadiyah should become a strategic institution in building harmonic relationship between Malaysia and Indonesia and what challenges it faces.

History of Malaysia-Indonesia Relations

In 1960s, conflict arose between Malaysia and Indonesia. Soekarno, the first President of Indonesia, had met Tengku Abdul Rahman, the Prime Minister of Malaysia, to discuss the refusal ofthe British's proposal for the Federation of Malaya from 13th to 1st June 1963. Soekarno then signed the proposal with the British government on July 9th, 1963 in London.He agreed to the British's plan to establish the Federation of Malaya on August 31st1963.⁹

Indonesia and Philippine would accept Federal of Malaysia as long as the majority of Malaysian citizen voted in referendum. To do so, between July and August 1963, there was a Summit of tripartite consisting of Malaysia, Indonesia and Philippine to identify Malaysian's aspiration included in the Manila Accord. After that, UN Secretary General appointed the representative to investigate the aspiration. However, Federation of Malaysia had officially been declared on September 16th, 1963 beforethe mission wascompleted.¹⁰

The Federation of Malaya sponsored by the United Kingdom separated the Borneo

island into two groups: Sabah and Sarawak at the north belonged to Malaysia and the provinces located in the south belonged to Indonesia. According to Soekarno, this federation threatened the regional stability. Following this, he took aggressive response in the foreign policy. Soekarno announced the axis of New Emerging Force and Old Established Force that illustrated the ex-colonialized country and the colonialist power. Soekarno strengthened the relationship with China and its communist allies. Furthermore, he attacked the Western Blok. In 1965, Indonesia resigned from the United Nations because it accepted Malaysia as member of the Security Council. In this regard, Indonesia was internationally isolated and should fight the Indonesian Communist Party that would take over the power.¹¹

In comparison, in the Soeharto's period, the second President of Indonesia, conflict between Malaysia and Indonesia was at minimum level. According to Zainudin Maidin, the former Minister of Information Affairs of Malaysia, Soeharto completely solved the bilateral conflict of Malaysia-Indonesia which was started in 1960s. He and Tun Razak, the former Prime Minister of Malaysia, developed peaceful relationship. Despite harmonic relationship between Soeharto and Tun Razak, Mahatir Mohamad disagreed for Soeharto's charges of the Human Right abuse. Maidin said that Malaysian people built the Village of Soeharto in Selangor to admire him.¹²

Since Soeharto's resignation in 1998, Indonesia and Malaysia relationship deteriorated due to conflicts. There are ten cases of Malaysia and Indonesia conflict:

1. Islamic terrorism leaders came from Malaysia, namely, Dr. Azahari and Noordin M. Top. They were already killed in gunfire with the Indonesian Police.
2. Malaysia's claim on Sipadan and Ligitan islands were successfully approved by the International Court and rejected Indonesian's ownership.
3. Malaysian would like to expand its boundary by claiming the Ambalat Block that is located in the East Kalimantan. In 2005, it worsened when Malaysian Marine captured 17 Indonesian workers and ousted fisherman from the Ambalat Block.
4. Malaysia takes part in the illegal logging of Kalimantan forest. There is a route founded by the Indonesian government to smuggle the trees from Kalimantan.
5. The protection for the Indonesian workers in Malaysia is inappropriate. Thus, torture, canceled payment of salary and deportation are worse experiences of the labor work for Malaysian. Malaysia may claim the art performance practiced by the Indonesian labors.
6. In Kalimantan, Sulawesi and Sumatera, Malaysian fisherman has disobeyed the boundary by arriving illegally in the Indonesian territory.
7. Malaysian Police hit Donald Pieter Luther, the karate judge from Indonesia on August 2007 without any reason.
8. Malaysia would like to register the copyright of the Parang Batik from Yogyakarta, the culinary of Indonesia and its handicraft. The reason why Malaysia does so is because Indonesia had not registered them yet.

9. Malaysia claims that the Angklung, the Reog Ponorogo and Kuda Lumping belong to Malaysia.
10. The majority of Malaysian Blog called Indonesian as the *indon*, the term used by Malaysian to discriminate people coming from Indonesia.¹³

Military presence in to solve the boundary dispute will endanger the stability of ASEAN region. It inspires other states to strengthen military device and personnel in the future. According to Rochdi Mohan Nazala, in this situation, Malaysia and Indonesia should play a significant role to ensure that the development of military posture in each country in Southeast Asia would not put regional stability in danger.¹⁴

Theoretical Framework of Civil Society and Conflict Resolution

Civil Society was originated from a movement of Latin America that opposed two repressive powers: the government and the exploitative international financial interest. In addition, it does not associate with the political party (the governance body) or the market.¹⁵ From 1980s to 1990s of political transition after the dismantlement of the communist block in particular, civil society was introduced by multilateral agencies as a tool for democracy assistance program¹⁶ It has flourished into several non-state actors: formal organization, informal network and social movement. In the globalization era, it is part of democratic freedom of the society sharing particular interest, purpose and value¹⁷. UNDP defines civil society as:

*"All associations or organizations that are private, voluntary, not-for-profit, at least partly independent or autonomous of the state and are pursuing a common interest, protecting a common value or advocating a common cause"*¹⁸

It meets conflict with the government, market or an international force in completing its mission for promoting democracy and justice. Conflict, according to Bernard Mayer, may be viewed as occurring along cognitive (perception), emotional (feeling) and behavioral (action) dimension.¹⁹ He says that conflict, as a set of perceptions, is a belief or understanding that one's own needs, interests, wants or values are incompatible with someone's else. There are both objective and subjective elements to this cognitive dimension. Objective element relates to perception of the public domain such as bill or regulation of public policy. Subjective element is dealing with perception of private matter²⁰. For instance the western lifestyle is incompatible with the eastern people philosophy of life.

He continues that conflict also involves an emotional reaction to a situation or interaction that signals a disagreement of some kind. The emotions felt might be fear, sadness, bitterness, anger, or hopelessness, or to amalgam of these. These feelings are the indicators that conflict occurs among individuals or groups. Then, conflict, seen as the behavior, consists of the actions to express the feeling, articulation of

the perception and obtaining the need. The certain way of someone expression may interfere with someone else's ability to obtain her or his needs. This conflict causes something happen at someone else's expense.²¹

He classified five sources of conflict. The first source is the imperfect communication. Humans are very imperfect communicator. This imperfection generates conflict, whether or not there is a significant incompatibility of interest, and it almost always makes conflict harder to solve. The main problem that should be taken into consideration is how hard it is for individuals to communicate about complex matters, particularly under emotionally difficult circumstances. Conflict frequently escalates because people act on the assumption that they have communicated accurately when they have not.

The second is the emotion. Emotions are the energy that fuel conflict. They contribute to the energy, strength, courage and perseverance that allow people to participate forcefully in conflict. However, they are also a key to deescalating it. Many emotions can prevent, moderate, or control conflict. Although emotional reaction of conflict is spontaneous, it should not release it so much to escalate the conflict. The important point is how to express an adequate emotional response in conflict. The third source of conflict is the value. Values are the beliefs each society has about what is important, what distinguishes right from wrong and good from evil, and what principles should govern how to lead the life. People who define themselves in part by their core beliefs defend totally when their values are under attack. In comparison, it is a source of commonality and a restraint on conflict escalation. Normally, the disputants can find the "meeting point" on which they share values, and they often have values about interpersonal relations that support collaborative effort.

The fourth source of conflict is structure. The elements of a structure may consist of resources, decision-making procedures, time constraints, communication procedures and physical settings. Other structural elements that affect conflict include proximity of the disputants, distribution of resources, access to information, legal parameters, organizational structure and political pressure. The example is voting. It is used to resolve differences about an issue; the issue tends to be polarized and constructive communication can become difficult. These structural realities can be changed through a conflict resolution process, whereas it is very hard. Fifth is history. Conflict cannot be separated from its historical context. The history of conflict tells about the actors of conflict, issues and systems. It provides the momentum for the development of conflict. Furthermore, it affects other sources of conflict: values, communication style, emotional reaction and the structure that people operate.²²

In term of the international relations discourses, conflict, as quoted by Surwandono from Jhon Spanier, are divided into two types: the first is high-politics conflict that consist of security, ideology issues and competition among countries taking place globally, regionally and nationally. This kind of conflict employs "zero-sum" game in

which the absolute winner and loser is clearly shown. The second type is low-politics that consist of economic, social and cultural issues, technology and environment. This second type of conflict employs “non-zero-sum” game in which the disputants compromise each other to find out the best solution. So, there is no absolute winner or loser in the non-zero-sum game.²³

There is variety of NGOs role in conflict resolution. It can be involved in giving basic services refugee camps, providing trauma counseling for victims, providing food and medical services or facilitating dialogue for warring factions.²⁴ Further, discussing NGOs’ involvement in conflict resolution, Becky Nesbitt examines two theories to see its role: the first is a model of peace process presented by Jhon Lederach and the second is Kalypso Nicolaïdis strategic framework of international preventive action in situations of conflict²⁵.

According to Lederach, there are three levels of actors in the peace building process and each level of actors engages in different peace building task. The first level is top leader such as military, religious and political leaders who have high visibility. They engage in high-level negotiation, mediation and ceasefire. The second level is the middle range leader such as ethnic and religious leaders, leaders of humanitarian NGOs, scholars and other respected leaders. They provide problem-solving workshop, training in conflict resolution, peace commission and insider-partial team. Lastly, the third level is the grassroots leader such as local leader, indigenous NGOs, community developer and local health official. They emphasize on local peace commission, grassroots training, prejudice reduction and the psychosocial work in post-war trauma. He argues that the true peace building is the social, economic, socio-psychological and spiritual changes in lives of the people involved. Lederachs’ theory does not analyze the preventive action whereas Kalypso Nicolaïdis does.

Kalypso Nicolaïdis’s strategic framework delivers the pattern of preventive action of the international community that can occur during the various stage of conflict. She divides into a timeline with three main stages. The first stage is a latent conflict that needs early diplomacy to prevent the eruption of conflict. The second stage is hostile explosion that requires late preventive diplomacy to prevent further escalation of conflict. The final stage is the post-conflict peace building and this stage continuing preventive diplomacy is required to prevent a recurrence of the conflict. She formulates a typology of international preventive diplomacy. There are two kinds of preventive action: the first is based on method (hands-on or hands-off) and the second is based on the scope (ad hoc or systemic). Hands-off methods would be constructed by incentives or signaling actions such as threats. Hands-on method includes capacity building and addressing root causes of conflict. The systemic actions are more long-term strategies embedded in norm and institutions while ad hoc actions are for short-term period. She, then, delivers four kinds of possibility action as method-scope combination: coercive diplomacy (hands-off, ad hoc), institutional inducement (hands-

off, systemic), cooperative management (hands-on, ad hoc) and systemic transformation (hands-on, systemic).²⁶

Becky Nesbitt explains more about NGOs activities dealing with three stages of conflict: latent conflict, escalating hostilities and peace-building endeavor. During in the latent conflict, the primary work of NGOs is advocacy. In this regard, NGOs or INGOs have a task to observe the local populace and the relations among various religious, ethnic and political group. This observation would like to objectively notice what is exactly going on. It is very useful for NGOs working with grassroots people in warning national and international leaders before the conflict breaks out.

Then, in escalating hostilities stage, it remains providing advocacy. For INGOs in cooperation with media, it collects data and evidences about violence and abuse to drive the international community action. In term of advocacy, NGOs also mediates and encourages leaders to engage in peace negotiation or ceasefire. In addition, NGOs provides assistance in food supply, medicines and refugee camps. Finally, for peace-building stage, it empowers people and helps them transform the attitudes and institutions in order to help reduce tension and prevent further violence conflict.²⁷

Strategic Political Position and Challenge of Muhammadiyah in Conflict Resolution

In 1912, Muhammadiyah founded by K.H.Ahmad Dahlan was the first well-organized Islamic movement of Indonesia. Inspired by the Islamic revivalists from Middle East, he initiated the independent Islamic organization to reform the Javanese Muslims from syncretism²⁸ practice, poor health and education access and colonialism. At the same time, according to Alfian, Muhammadiyah plays three main roles: religious reform, social and cultural changing and political forces.²⁹

For Muhammadiyah, purifying the Islamic teaching is crucial issue. It does not mean every Muslim should imitate literally the Arabic custom of what The Last Prophet did without any rational thinking. It announces the Tajdid concept that means using Quran and The Last Prophet's tradition as a guideline for worship and interpreting them by critical method to figure out the answer dealing with contemporary problem. It welcomes a new invasion in modern science and technology as long as it is in line with the Islamic principle. At the first time, the idea of purification is rejected by majority of Javanese Muslims. However, Muhammadiyah is successful to convince the people through dialogue and to proof the modern Islam.

Health and education are the priorities in building a qualified and skillful human resource. During colonialism period, the citizens divided into three levels: the highest level was Europeans or Dutch and Indonesian noble. The middle level was Chinese and the third level was Indonesian (native). Western education is for expatriates, Chinese, the Indonesian noble and a few people of third level spending much money to pay the tuition. Like the education, the Indonesian Muslims in particular had a

little opportunity to use the hospital owned by the Dutch. As a result, Muhammadiyah has started to provide as modern education system as the Western style with the additional religious subject. Nowadays, Muhammadiyah has hundreds of kindergartens, schools from elementary to junior and high school, vocational school and universities as well as colleges. In addition, it has hundreds hospitals and house of health service.

Muhammadiyah is a significant political force and concerns on fighting colonialism in particular. Alfian said that there are two important reasons why Muhammadiyah has been seen as a major political entity of Indonesia. First, It refers to Muhammadiyah's point of view about Islam-state unity. Islam and state cannot be separated like the Western secularism. Second, it is an interest group that has encouraged the political Islam in Indonesia. In 1927, after The Indonesian Communist Party failed to take over the power, Muhammadiyah succeeded to gain huge members in Minangkabau. It, then, fought against the Dutch openly. After that, in 1950s, it was an influential group in political completion between the national party represented by the Partai Nasional Indonesia (the Indonesian National Party), the Partai Komunis Indonesia (the Indonesian Communist Party) and the Islamic Parties (Masyumi and the Nadhatul Ulama).³⁰

In 1990s, emerging new wave of democracy in Indonesia post New Order era was a result of the critical thought and action of Muhammadiyah. From 1960s to 1990s, the Soeharto regime seemed to be dictator leader. Freedom of expression and press was strictly ignored. Nepotism and collusion flourished because of minimum control of the government. Soeharto had the "ultimate power" like a king without check and balances from the public representative. Despite being dictator, political stability leads Indonesia to reach the economic growth 7% per year. Unfortunately, the corruption was growing rapidly. Hence, Muhammadiyah moved forward to eradicate those political deviances. Overall, Muhammadiyah as the Islamic civil society movement has a strategic position to be a pressure group to deliver the public interest and to control the process of democracy.

Its important position is an advantage for Muhammadiyah to have active role in conflict resolution between Indonesia and Malaysia. Furthermore, its social capital has extended the membership, international network and institutional structure. Its wing organizations are the stations to attract the new members consisting of women, students and youths. It also develops successfully the international branches in Egypt, Malaysia and the United States of America. This advance of its membership and branches would be positive impact for enlarging the institutional structure. Although Muhammadiyah center is located in Indonesia, its potentials are the indicators that Muhammadiyah would be close to the International Non-government Organization operated in different states and followed by the international member. Therefore, it should encourage and initiate the peaceful relationship before, during and after the

conflict. Muhammadiyah has experience in humanitarian aid for the recovery agenda of both disaster and conflict victims. In doing this, it develops MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) that prepares for tackling casualties of natural disaster and conflict. In spite of being invited by MILF to mediate with the government of Philippine, Muhammadiyah's track record in resolving conflict is still in moderate level because of its minimum peace paradigm.

Discussing Muhammadiyah contribution in Malaysia-Indonesia tension of migrant workers, culture and border, it, as mentioned by Becky Nesbitt, delivers advocacy in two levels of conflict: latent conflict and escalating hostilities stage. At the latent of conflict, Muhammadiyah in cooperation with local community should observe the changing relations process among believers, ethnic group and political party including regulation as well. This observation aims to understand the cause of possible conflict and warn national and international leader before conflict occurs.

In escalating hostilities stage, Muhammadiyah must be available in providing advocacy. It should investigate to find out fact and data relating to abuse, violence and harassment. After that, it issues those finding through the media it works with. It would invite international leaders and communities to assist in conflict resolution. Meanwhile, Muhammadiyah mediate leaders to engage peace negotiation. Lastly, Muhammadiyah has also role in empowering people to transform the attitudes in order to reduce tension and more terrible conflict.

To implement conflict resolution as noted by Nesbitt, Muhammadiyah in particular and other NGOs in general faces a number of challenges as follows:

1. Conflict prevention is no longer effective because of short-term and reactive approach than proactive. It also emphasize on post-conflict effect rather than roots of conflict.
2. Lack of coordination and cooperation between NGOs and government or among NGOs itself is a reason why conflict prevention is fragile.
3. NGOs have insufficient capacity and capability in conflict resolution. In term of conflict resolution, NGOs have been fragmented partially in its core competence and focused partially on the problem relating to the competence.³¹

To answer those challenges, Muhammadiyah should transform and strengthen its capability as practitioner in conflict resolution. Transformation means a changing process from weakness to the capacity for creating a strategic and effective action. Improving Muhammadiyah's capacity is important thing to equip it in regional conflict resolution. Additionally, Muhammadiyah also needs to enhance its international cooperation, research and network³². Capacity building of civil society is one of proposals issued by the participants representing civil society from ten ASEAN countries at the ASEAN Civil Society Conference to the 11th ASEAN Summit. They propose the state to help civil society in building capacity to address regional issue. In this

respect, the following suggestion is that

“Civil society wishes to state its willingness to work towards strengthening of civil society organizations in countries where there is such a need. Civil society for its part also realizes that it must act in concert, with courage and integrity, and ensure it does not become a rubber stamp for any predetermined decisions. At the same time, civil society appreciates the importance of adopting a balanced, rational and principled approach to challenges confronting ASEAN³³.”

What Muhammadiyah has done to reduce the conflict is that it initially creates an international interfaith-dialog forum namely World Peace Forum and invites the religious leaders worldwide to discuss a resolution for the religious-based conflict. This forum is necessary to extend with the number of expertise and the conflict resolution practitioner as well as the world and community leaders to prevent various conflicts in the world in general and Southeast Asia in particular.

Conclusion

To summarize this paper, the Islamic civil society of Indonesia namely Muhammadiyah is that the prominent Islamic movement, established in 1912, has important role in religious reform, social and cultural changing and encouraging political dynamics. As a non-state actor, Muhammadiyah has also responsibility to take part in conflict resolution occurring in Southeast Asia. Development of Muhammadiyah's membership, institution and network lead Muhammadiyah to increase its level from middle NGOs to the International NGOs.

International Non-governmental Organizations (INGOs), as written by Becky Nesbitt, involve in three kinds of conflict: latent conflict, escalating hostilities and peace building by implementing advocacy and people empowerment. The main problem of Muhammadiyah to do so is lack of capacity. To solve this, Muhammadiyah needs to transform itself and elevate cooperation, research and network with international community and institution. In addition, the state should pay more attention and concern on the capacity building for NGOs. Therefore, in term of Malaysia-Indonesia relationship and conflict, Muhammadiyah should contribute to be an agent of peace.

Endnotes

- ¹ Faustinus Andrea, “Pertemuan Menlu ASEAN ke-34 dan Stabilitas Kawasan Asia Tenggara” in Analisis CSIS Journal XXX/21 No 3/2001, p 363.
- ² Ibid. page 365.
- ³ Banyu Agung Perwita and Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Bandung: PT. Remaja Rosadkarya, 2006), p 11
- ⁴ Boundaries are divided into four parts: 1) Natural separators as in the case of

- rivers and mountain. 2) Cultural differences, such as the communal distinction that served as the basis for drawing the boundaries between India and Pakistan. 3) Historical and political considerations, as in the case of many of the African states, whose boundaries were originally drawn by European colonial powers; and 4) those established by military equilibrium, as between Israel and her Arab neighbors, or between North and South Korea. See: Jack C Plano and Roy Olton *The International Relations Dictionary* (Michigan: Western Michigan University, 1969), p 1
- ⁵ Anak Agung Banyu Perwita, "The Impact of Territorial Border Problems on Indonesia's Security", *The Indonesian Quarterly Journal*. Vol.34 No.3/2006, p.203.
- ⁶ *Ibid.* p. 202.
- ⁷ Sita Bali, "Migration and Refugees" in *Issues in World Politics* edited by Brian White, Richard Little and Michael Smith (2001). (New York: Palgrave, 2001) p. 178.
- ⁸ National productivity of host country is an advantage of migrant worker. At the same time, the sending country like Indonesia has benefit from its migrant workers: 1) Decreasing the unemployment problem. 2) Declining the demand for consumption and facilities. See Bali Sita, *Op cit.* 180.
- ⁹ Jhon B Sijanto, *Gayang Malaysia, Politik Konfrontasi Bung Karno*. (Yogyakarta: InterpreBook, 2010), p. 29
- ¹⁰ *Ibid.* p. 30
- ¹¹ Syafaruddin Usman and Din Isnawita, *Ancaman Negeri Jiran: Dari "Gayang Malaysia" sampai Konflik Ambalat* (Yogyakarta: MedPress, 2009), p. 32-33
- ¹² Fadilla, Ramadhian, "Pak Harto, Untold Story", (<http://www.tribunnews.com/2011/06/14/kampong-soeharto-bukti-hubungan-baik-indonesia-malaysia>). See also: (www.detik.com/read/2011/06/08/121412/1655724/10/hubungan-indonesia-malaysia-gemilang-di-era-soeharto)
- ¹³ Wawan H. Purwanto, *Panas Dingin Hubungan Indonesia-Malaysia* (Jakarta: CMB Press, 2010), p. 16-18
- ¹⁴ Rochdi Mohan Nazala, "Malaysia-Indonesia Relationships and the Future of Southeast Asia Stability", *Multiversa* Vol. I No. 2/10/2010, p. 219
- ¹⁵ Affan Ghafar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), p. 178
- ¹⁶ Julliete Van Wassenhove, "Civil Society, Religious Affiliation and Political Participation East Asia", *ICAS News*. Singapore 19-22 August 2003
- ¹⁷ Jhon W, Meyer, Gilli S. Drori and Hokyu Hwang, "World Society and the Proliferation of Formal Organization" in *Globalization and Organization, World Society and Organizational Change*, (Oxford University Press: New York, 2006), p. 25
- ¹⁸ Oussama Safa, *Conflict Resolution and Reconciliation in the Arab World, The Work of Civil Society Organizations in Lebanon and Morocco*, www.berghof-handbook.net, p. 3
- ¹⁹ Bernard Mayer, *The Dynamics of Conflict Resolution; A Practitioner's Guide*

- San Francisco: Jossey-Bass. Inc Publisher, 2000), p. 3
- ²⁰ Bernard Mayer, Op.Cit. p. 4
- ²¹ Ibid. p. 5
- ²² Bernard Mayer, Op.Cit. p. 12-14.
- ²³ Surwandono, Resolusi Konflik Dunia Islam (manuscript), p. 11
- ²⁴ Becky Nesbitt, The Role of NGOs in Conflict Resolution in Africa: an Institutional Analysis paper presented at the Institutional Analysis and Development Mini-Conference, May 3rd and 5th, 2003, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA, p. 2.
- ²⁵ Ibid. p. 5
- ²⁶ Becky Nesbitt, Op.Cit, p. 6-7
- ²⁷ Ibid., p. 14-15
- ²⁸ Javanese people living in Yogyakarta where Muhammadiyah was established is illustrated by Sutiyono as a cow eating all vegetables at the day and then bringing it back into the mouth at the night. It means that Javanese people might swallow all imported cultures and religious teaching. After that, they adjust it to their own culture. Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis* (Jakarta: Kompas, 2010), p. 42
- ²⁹ Alfian, *Politik Kaum Modernitas; Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1989), p. 5
- ³⁰ Alfian, Op.Cit. p. 8
- ³¹ Center for Security and Peace Studies (CSPS) of Universitas Gadjah Mada, *Masyarakat Sipil dan Pencegahan Konflik Bersenjata* (Hasil Lokakarya di Solo 1-2 Desember 2005) (Yogyakarta: CSPS Book, 2006), p. 23
- ³² Ibid. p. 54
- ³³ Document of Statement of The ASEAN Civil Society Conference To The 11th ASEAN Summit, p. 3.

References

Books

- Alfian. 1989, *Politik Kaum Modernitas; Perlawanan Muhammadiyah terhadap Kolonialisme Belanda*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Bali, Sita, "Migration and Refugees" in *Issues in World Politics* edited by Brian White, Richard Little and Michael Smith. 2001, Palgrave, New York
- Center for Security and Peace Studies (CSPS) of Universitas Gadjah Mada. 2006, *Masyarakat Sipil dan Pencegahan Konflik Bersenjata* (Hasil Lokakarya di Solo 1-2 Desember 2005), CSPS Book, Yogyakarta
- Ghafar, Affan. 1999, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mayer, Bernard. 2000, *The Dynamics of Conflict Resolution; A Practitioner's Guide* Jossey-

Bass. Inc Publisher, San Fransisco

- Meyer, Jhon W, Drori, Gilli S. and Hwang, Hokyu. 2006, "World Society and the Proliferation of Formal Organization" in *Globalization and Organization, World Society and Organizational Change*, Oxford University Press, New York
- Perwita, Anak Agung Banyu Perwita and Yani, Yanyan Mochammad. 2006, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT. Remaja Rosadkarya, Bandung
- Plano, Jack C and Olton, Roy. 1969, *The International Relations Dictionary*, Western Michigan University, Michigan
- Purwanto, Wawan H. 2010, *Panas Dingin Hubungan Indonesia-Malaysia*, CMB Press, Jakarta
- Sijanto, Jhon B. 2010, *Gayang Malaysia, Politik Konfrontasi Bung Karno*, InterpreBook, Yogyakarta
- Surwandono, *Resolusi Konflik Dunia Islam* (manuscript)
- Sutiyono. 2010, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*, Kompas, Jakarta
- Usman, Syafaruddin Usman and Isnawita, Din. 2009, *Ancaman Negeri Jiran: Dari "Gayang Malaysia" sampai Konflik Ambalat*, MedPress, Yogyakarta

Website, News and Document

- <http://www.detik.com/read/2011/06/08/121412/1655724/10/hubungan-indonesia-malaysia-gemilang-di-era-soeharto>
- Document of Statement of The ASEAN Civil Society Conference To The 11th ASEAN Summit
- <http://www.tribunnews.com/2011/06/14/kampoeng-soeharto-bukti-hubungan-baik-indonesia-malaysia>

Journals

- Andrea, Faustinus "Pertemuan Menlu ASEAN ke-34 dan Stabilitas Kawasan Asia Tenggara" in Analisis CSIS Journal XXX/21 No 3/2001
- Becky Nesbitt, *The Role of NGOs in Conflict Resolution in Africa: an Institutional Analysis* paper presented at the Institutional Analysis and Development Mini-Conference, May 3rd and 5th, 2003, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, Indiana
- Nazala, Rochdi Mohan, "Malaysia-Indonesia Relationships and the Future of South-east Asia Stability", *Multiversa* Vol. I No. 2/10/2010
- Perwita, Anak Agung, Banyu, "The Impact of Territorial Border Problems on Indonesia's Security", *The Indonesian Quarterly Journal*. Vol.34 No.3/2006
- Safa, Oussama *Conflict Resolution and Reconciliation in the Arab World, The Work of Civil Society Organizations in Lebanon and Morocco*, www.berghof-handbook.net
- Wassenove, Julliete Van, "Civil Society, Religious Affiliation and Political Participation East Asia", *ICAS News*. Singapore 19-22 August 2003

Tipologi Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi

ABSTRACT

As a nation that gained its independence with the involvement of people power, Indonesian nationalism was awakened by the spirit of populism. In the limited capacity of post-independence economic and military, various implementation of Indonesia's foreign policies also be welcomed and got strong support from the power of the masses. But in the course of history, due to elitism in the Soeharto era, made foreign policy to be elitized. Influence from people muted. The policies were run almost personally by President Suharto so that Indonesia's foreign policy became uninstitutionalized. Changes of political system in the Reformasi era (reforms) since the fall of President Suharto created opportunities to reformulate and to institutionalize Indonesia's foreign policy.

Meanwhile, during the first decade of Reform era in Indonesia (1998-2008) world political scene has undergone many changes and dynamics that presents opportunities and challenges toward Indonesia's foreign policy, particularly the transformation of economic globalization and international issues. Ambiguity of Indonesia's foreign policy profile at the beginning of the Reformasi era became an intellectual challenge, namely how to explain the "profile" that often be simplified as just "no-profile". Reforms provides an opportunity to the spirit of populism to back in, however the implementation of Indonesia's foreign policy sometimes seems elitist. It's a challenge for scientific analysis. Therefore, this work also specifically describes the factors forming the profile of implementation of RI's foreign policy in the era of the Reform.

Three frames of analysis that will be used in this work namely the balance of threat theory, balance of interest argument, and political mobilization model. The three approaches are referred to as neoclassical realism approach that tries to improve the structural realism approach. Based on the frame of analysis, it formulates two independent variables namely the intensity of international pressure and alignment between the interests of domestic elites and the public. Based on this argument, a typology can be constructed which shows the four variants of PLNRI profile, namely active populism, reactive populism, pseudo populism, and non-populism.

Using text and discourse analysis methods, this work will proof that such two variables influence to RI's foreign policy implementation. In the strong international pressure, the less aligned the interests of elites and masses, the foreign policy increasingly populist, and in a weak international pressure, the less aligned the interests of elites and masses, the populism increasingly apparent.

Keywords: *free and active foreign policy, neoclassical realism, elitism, populism, international pressure, domestic alignment.*

Bambang Wahyu Nugroho

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

Pendahuluan

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, politik luar negeri Republik Indonesia (PLNRI) berprinsip bebas-aktif. Namun implementasi praktisnya mengalami perkembangan dari masa ke masa. Suatu kali tampak sangat *low profile*, lain waktu menjadi sangat *assertive* atau *high profile*, bahkan memasuki era Reformasi pasca lengsernya Presiden Soeharti tahun 1988, profil PLNRI

dipertanyakan kembali oleh para ahli. Dewi Fortuna Anwar secara normatif menguraikan apa yang *seharusnya* dilakukan oleh PLNRI setelah memasuki era Reformasi.¹ Namun dalam *kenyataannya*, bertahun-tahun setelah itu PLNRI masih banyak dipersoalkan kembali. Mohtar Mas'oeed menyebut PLNRI tak konsisten.² Budiarto Shambazy menyebutkan bahwa PLNRI menunjukkan profil yang tidak jelas, bahkan disebut tak berprofil (*no profile*).³ Orientasinya pun dipertanyakan⁴ alias mengalami disorientasi.⁵

Bahkan hingga tahun 2008 profil PLNRI masih dianggap tidak jelas sebagaimana pendapat berikut ini:

“Gaya politik luar negeri ‘no profile’ berpola acak mewarnai di semua periode kepemimpinan era Reformasi (sejak Habibie sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono [SBY]),” bahkan di masa presiden Abdurrahman Wahid disebut “menabrak semua karang” dan di masa SBY didoktrinasi “mengarungi semua samudera”⁶ yang sampai saat ini belum jelas konseptualisasinya, lebih-lebih implementasinya.”

Di era Orde Baru, PLNRI dikembangkan secara perlahan dari awalnya yang *low profile* menjadi lebih *assertive* sejak pertengahan tahun 1980-an seiring dengan meningkatnya kemakmuran ekonomi serta pergeseran penentu kebijakan dari militer ke presiden Soeharto sendiri,⁷ sekalipun krisis ekonomi akut sejak akhir tahun 1988 berkembang menjadi krisis multidimensi yang melengserkan Soeharto. Bangsa Indonesia pun kemudian menata kembali sistem politiknya dengan gerakan Reformasi.

Krisis ekonomi dan perubahan besar-besaran dalam tatanan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia pasca Orde Baru menjadikan politik luar negeri RI kembali *inward looking*.⁸ Artinya, pemerintah RI lebih memprioritaskan penyelesaian masalah domestik, terutama krisis ekonomi beserta dampaknya. Oleh karena itu urusan genting yang berkaitan dengan kekuatan asing cenderung “dilepaskan.” Peristiwa terlepasnya Timor Timur dan pulau Sipadan-Ligitan, misalnya, merupakan contoh efek dari *inward looking* tersebut.

Sementara itu dalam kurun satu dasawarsa era Reformasi di Indonesia (1998-2008) panggung politik dunia telah mengalami banyak perubahan dan dinamika yang menghadirkan peluang serta tantangan bagi politik luar negeri Republik Indonesia. Kebangkitan ekonomi dan militer Cina menghadirkan tantangan baru bagi konstelasi ekonomi politik dunia yang semakin mengglobal. Kemudian, kasus-kasus terorisme internasional/transnasional yang salah satu puncaknya adalah peledakan gedung World Trade Center di New York tanggal 11 September 2001 (dikenal dengan istilah peristiwa 9/11) menimbulkan isu baru perang melawan terorisme. Disusul kemudian dengan pecahnya peperangan di Afghanistan dan Irak, tentu mengguncangkan kembali isu keamanan di kawasan Timur Tengah yang berimplikasi global. Demikian pula isu perubahan iklim mulai mencuat dan menjadi perhatian global. Semua itu merupakan isu-isu yang berkembang dan mengemuka berbarengan dengan proses reformasi In-

donesia menyongsong awal abad ke-21.

Gerakan Reformasi tahun 1998 yang mengakhiri kekuasaan otoritarian presiden Soeharto selama 32 tahun itu membangkitkan kembali demokrasi liberal di Indonesia dalam format pemerintahan presidensial.⁹ Gerakan reformasi juga menuntut politik kenegaraan yang lebih demokratis dalam arti semakin kompetitif dan partisipatif, terutama untuk menghadapi situasi dunia yang berubah sebagaimana keterangan di atas. Kompetitif, maksudnya adalah memberikan ruang kontestasi politik yang bebas dan partisipatif berarti peningkatan peran serta warga yang semakin luas dan semakin leluasa untuk mendukung demokratisasi politik dan berkontribusi mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik, termasuk politik luar negeri.

Dengan demikian tugas ilmiah dalam karya ini adalah memaparkan bagaimana ragam profil implementasi politik luar negeri Republik Indonesia di era Reformasi dengan menggunakan kerangka berpikir yang memadai agar identifikasinya tidak lagi berakhir dengan sebuah negasi.

Tiga bingkai analisis yang akan digunakan dalam menjelaskan sebab dan proses sebagaimana dijadikan rumusan permasalahan di atas, yakni:

- a) Teori perimbangan ancaman (*balance of threat theory*) oleh Stephen Walt;¹⁰
- b) Argumen perimbangan kepentingan (*balance of interest argument*) menurut Randall L. Schweller;¹¹ dan,
- c) Model mobilisasi politik (*political mobilization model*) oleh Thomas Christensen.¹²

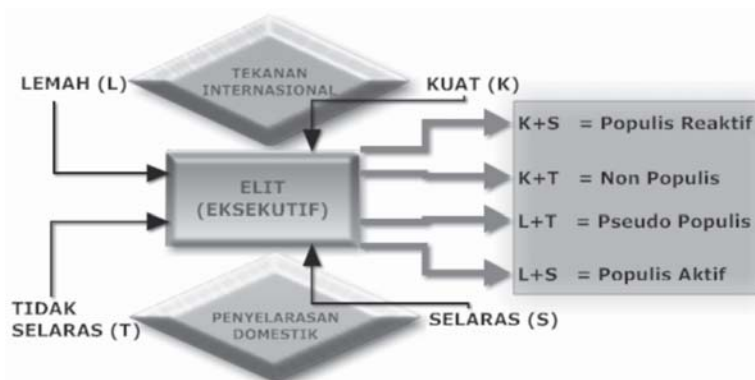
Menurut Walt, niat agresif suatu negara terhadap negara lain tentu bertingkat-tingkat, mulai dari sekadar interferensi (komentar negatif, campur tangan atau tekanan diplomatik terhadap kebijakan domestik), intervensi (embargo, boikot atau ancaman penggunaan kekerasan), hingga invasi (serbuan militer sesungguhnya). Sekalipun berbeda tingkatannya namun ketiganya dapat digolongkan sebagai tekanan internasional. Namun reaksi terhadap tekanan tersebut dapat dijelaskan lebih baik dengan model perimbangan kepentingan karya Schweller dengan mempertimbangkan aspek-aspek non struktural seperti karakter kepemimpinan elit maupun tanggapan publik terhadap kebijakan luar negeri. Pada gilirannya, penyelarasan antara kepentingan elit dan kepentingan publik akan menjadi variabel yang berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri setelah elit mempertimbangkan kepentingannya vis a vis tekanan internasional.

Untuk memperjelas posisi penyelarasan antara kepentingan elit dan publik, digunakan model mobilisasi politik yang dikemukakan oleh Christensen. Pada intinya model ini mengasumsikan adanya keperluan elit pemimpin suatu negara untuk memobilisasi warganya dengan maksud mencari dukungan bagi kebijakannya yang tidak populer (non populis).

Ketiga alat bantu teoritik tersebut termasuk dalam kluster pendekatan realisme neoklasik yang dalam satu dasawarsa ini mengemuka sejak tulisan Gideon Rose¹³

hingga yang mutakhir oleh Steven Lobell dkk. (eds.) di awal tahun 2009.¹⁴ Pendekatan realisme neoklasik dipandang cukup mumpuni untuk menjawab kritik terhadap kekurangan realisme klasik maupun neorealisme.

Persoalan penyalarsan domestik lebih relevan diterapkan di dalam rezim demokrasi atau yang tengah melakukan demokratisasi, sebab peluang bagi diserapnya aspirasi dan partisipasi massa menjadi penting untuk dipertimbangkan. Di dalam rezim otoritarian, biasanya penguasa tidak memiliki saluran protes massa dalam merumuskan atau menanggapi kebijakan luar negeri, kecuali dalam hal sang pemimpin memerlukan mobilisasi dukungan massa. Di samping itu, penyalarsan domestik menjadi signifikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut: (1) intensitas tekanan internasional lemah atau tidak ada; dan (2) tekanan internasional tidak kompatibel dengan kepentingan elit pemerintah, namun selaras (kompatibel) dengan tuntutan atau reaksi massa. Tentu saja apabila faktor internasional selaras dengan kepentingan elit domestik, maka tekanan internasional menjadi tidak diperlukan. Sedangkan penyalarsan juga tidak diperlukan dalam hal kepentingan elit sudah selaras dengan kepentingan massa. Hasilnya, profil politik luar negeri yang dihasilkan dari kombinasi tersebut akan disebut populis dan non-populis.



Gambar 1. Bagan alir proses pembentukan profil PLNRI di era Reformasi.

Tekanan internasional disebut kuat apabila terdapat teks yang muatan atau *content*-nya bermakna interferensi, intervensi, atau bahkan invasi yang dapat diinterpretasikan sebagai tuntutan internasional agar Indonesia melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini disebut tekanan struktural. Tekanan internasional juga dapat ditunjukkan dengan adanya kebijakan atau perubahan kebijakan negara asing atau sistem internasional yang konsekuensinya menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Ini disebut tekanan sistemik.

Secara fragmentatif, tekanan internasional digolongkan lemah apabila kebijakan luar negeri RI tidak mendapatkan tanggapan negatif yang spesifik atau justru mendapatkan dukungan dari pemerintah negara asing.¹⁵ Dari keterangan di atas, intensitas tekanan internasional dapat menjadi variabel independen yang menentukan

profil PLNRI, dikontrol oleh variabel *intervening* berupa keselarasan antara elit dengan kepentingan massa.

Kerangka konseptual pembentuk ragam profil PLNRI dapat diilustrasikan seperti bisa dilihat pada gambar 1.

Sedangkan skema tipologisnya sebagai berikut:

Tabel 1. Tipologi PLNRI

		Hasil penyeselarasan antara kepentingan elit dan tuntutan/reaksi massa	
		Selaras (kompatibel)	Tak Selaras (inkompatibel)
Intensitas tekanan internasional	Kuat	POPULIS REAKTIF	NON POPULIS
	Lemah	POPULIS AKTIF	PSEUDO POPULIS

Artinya, dalam tekanan internasional yang kuat, semakin tidak selaras kepentingan elit dan massa, PLNRI semakin tidak populis; dan dalam tekanan internasional yang lemah, semakin tidak selaras kepentingan elit dan massa, populisma PLNRI semakin semu.

Metode analisis yang digunakan dalam karya ini yakni analisis teks dan wacana.¹⁶ Salah satu metodenya ialah analisis isi (*content analysis*).¹⁷ Di sini, opini massa dipandang merupakan produk wacana dalam masyarakat yang dikomunikasikan dan dipancarluaskan melalui sarana publik.¹⁸ Saya memilahnya menjadi dua hal, yakni: tuntutan dan reaksi massa. Tuntutan massa adalah aspirasi yang disampaikan secara terbuka dalam berbagai bentuk ungkapan “unjuk rasa” dengan agenda yang jelas untuk memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri pemerintah (elit). Sedangkan reaksi atau respons massa adalah tanggapan *post facto*, setelah pemerintah melakukan sebuah kebijakan luar negeri. Data mengenai kedua hal tersebut diperoleh dari eksposenya di media massa sebagai sarana refleksi maupun konstruksi kepentingan massa.

Implementasi Tipologi Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi

Tipologi populisme dan elitisme di dalam karya ini akan diterapkan dalam konteks reformasi Indonesia yang membawa pelembagaan dan reinterpretasi terhadap PLNRI bebas aktif. Berdasarkan pendekatan realisme neoklasik, maka variabel-variabel yang akan terlibat di dalamnya yakni: (1) intensitas tekanan internasional sebagai variabel independen, dan (2) tingkat keselarasan antara kepentingan elit dan tuntutan dan/atau reaksi massa sebagai variabel *intervening*-nya. Kemudian kedua variabel independen tersebut akan dielaborasi sehingga parameter-parameternya kemudian dapat ditentukan.

Intensitas tekanan internasional akan diukur dari analisis terhadap (a) muatan (*content*) pembicaraan langsung dalam pertemuan antarpemimpin pemerintahan atau pernyataan eksplisit maupun implisit dari pemimpin negara asing tentang suatu kebijakan yang harus dilakukan atau harus tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia; dan (b) kebijakan luar negeri negara asing atau lembaga asing yang berpotensi merugikan Indonesia apabila Indonesia melakukan sesuatu yang ditentang oleh negara atau lembaga tersebut atau tidak melakukan sesuatu yang dituntut oleh negara atau lembaga tersebut.

Sedangkan keselarasan (*kompatibilitas*) antara kepentingan elit dan kepentingan massa akan diukur dari dua aspek yakni (a) tuntutan massa untuk memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri, dan (b) respons/reaksi massa terhadap kebijakan luar negeri. Kedua aspek tersebut tercermin di dalam ekspose di media massa yang dipandang dapat mewakili refleksi maupun konstruksi kepentingan massa.

Kedua variabel independen di atas dalam kombinasi kualitatif tertentu akan mempengaruhi profil populis politik luar negeri Republik Indonesia yang beragam, yakni populis-aktif, populis-reaktif, pseudo-populis, atau non-populis. Penjelasan atas faktor-faktor tersebut akan diaplikasikan pada kasus-kasus kebijakan luar negeri RI di bawah kepemimpinan presiden-presiden RI di dalam dasawarsa pertama era Reformasi, masing-masing dipilih lima kasus yang signifikan dan relevan.

Mundurnya Soeharto dari panggung kekuasaan Indonesia di tahun 1998 tidak dengan serta-merta menghentikan karakter elitis PLNRI. Meskipun sistem politik berubah dengan adanya tuntutan reformasi, pada masa kepresidenan B.J. Habibie salah satu kasus yang dapat menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara seperti DPR-MPR maupun TNI tidak dilibatkan, yakni ketika Presiden B.J. Habibie mengambil keputusan memberikan opsi kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur. Kebijakan ini mengejutkan hampir semua pemangku kepentingan PLNRI, termasuk Deplu sendiri. Hal semacam itu juga dilakukan oleh presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid. Gagasannya untuk segera membuka hubungan dagang langsung dengan Israel tanpa mempertimbangkan opini para tokoh Muslim menjadikannya menuai protes keras dari kalangan ummat Islam dan tidak satupun yang membela gagasan tersebut. Bahkan gagasan pembentukan aliansi baru antara RRC, India, dan Indonesia dengan dukungan finansial dari Jepang dan Singapura ditengarai oleh Jusuf Wanandi sebagai ketidakpahaman Presiden Abdurrahman Wahid terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di bidang hubungan internasional, regional, serta “jelas tidak memakai keahlian dari Departemen Luar Negeri.”¹⁹

Tidak diikutsertakannya Deplu memunculkan pertanyaan apakah gagasan tersebut akan dapat dilaksanakan. Meskipun tidak terungkap secara terbuka, namun orang-orang yang dekat dengan sumber keputusan itu menyiratkan adanya suasana frustrasi yang cukup besar. Sebagai sosok pemimpin yang demokratis sudah seharusnya presiden Abdurrahman Wahid juga meminta pendapat DPR, namun hal itu pun tidak

dilakukannya. Ketiadaan atau sangat minimnya kerja sama dengan DPR berkonsekuensi pada minimnya dukungan DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Apalagi protes massa yang diekspose oleh media massa, menjadi sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah Abdurrahman Wahid tersebut.²⁰

Di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, misalnya, interpretasinya terhadap situasi internasional lebih intuitif / instinktif ketimbang berdasarkan keahlian. Menurut Ben Perkasa Drajat, Presiden Abdurrahman Wahid maupun Menlu Alwi Shihab bukanlah ahli di bidang politik luar negeri. Sekalipun begitu, keduanya tetap saja dipuji karena “keduanya memiliki instink yang akurat tentang peran potensial komunitas internasional dalam mendukung solusi krisis dan masalah nasional.”²¹

Akibat menuruti naluri itu pula tampaknya Presiden Abdurrahman Wahid seperti semasanya sendiri melakukan kunjungan luar negeri ke berbagai negara tanpa didasarkan pada perencanaan yang matang. Kemudian melalui Menteri Pertahanan Mahfud M.D. mengusulkan pembentukan pakta pertahanan. Pelaksanaan PLNRI seperti itu mencerminkan ketiadaan kebijakan yang jelas karena apa yang hendak dicapai juga tidak jelas. Trias Kuncahyono mengomentari kondisi seperti itu dengan menyatakan bahwa PLNRI waktu itu sebagai *policy of nonpolicy*.²²

Walaupun tidak semencolok presiden Abdurrahman Wahid, namun presiden Megawati Soekarnoputri yang melanjutkan kepemimpinan Abdurrahman Wahid juga masih mengesankan elitisma perorangan tersebut. Sikapnya yang secara umum lebih banyak berdiam diri terhadap berbagai masalah negara yang penting, tiba-tiba Presiden Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk melakukan kunjungan ke Korea Utara dengan maksud untuk membantu penyatuan kembali (reunifikasi) kedua Korea. Seperti bernostalgia atas keberhasilan ayahnya, presiden Soekarno, yang telah sukses menyelenggarakan KTT Asia Afrika tahun 1955, presiden Megawati Soekarnoputri juga sangat akrab dengan pemimpin RRC hingga membuahkan keputusan untuk menjual gas bumi blok Natuna secara jangka panjang dengan harga yang sangat murah kepada pemerintah RRC. Namun demikian, semua presiden tentunya kalau ditanyai tentang cara mereka menempuh kebijakan yang otoritarian itu, pasti mengatakan bahwa itu semua demi kepentingan nasional, kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Artinya, mereka tetap menganggap diri mereka adalah tokoh yang populis dan PLNRI yang mereka bawakan juga berwajah populis. Padahal, elitisma PLNRI di era reformasi, sejauh itu, bukan sekedar elitisma oligarkis saja, namun bahkan didominasi oleh pemimpin tertinggi, yakni presiden. Semangat reformasi yang menuntut demokratisasi berubah arah kembali menjadi sekadar “penggantian sosok penguasa” atau “transplacement” sementara prosesnya sama saja dengan otoritarianisme Demokrasi Terpimpin di bawah presiden Soekarno maupun Orde Baru di bawah presiden Soeharto.²³

Dengan demikian jelaslah pada bagian ini bahwa setiap presiden sebagai *top executive* senantiasa memiliki kecenderungan pribadi dalam menafsirkan sekaligus

keinginan mengimplementasikan PLNRI, apakah itu didasarkan pada ideologi, sejarah kehidupannya, maupun kepentingan-kepentingannya sendiri. Variabel inilah yang dirumuskan sebagai variabel kepentingan elit dalam proses pembentukan profil PLNRI. Dan dalam kasus Indonesia, hingga masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri, dominasi selera pribadi presiden sebagai “penafsir tunggal” kebijakan luar negeri masih terasa begitu jelas. Sementara pada periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, PLNRI lebih terlembaga, sekalipun tidak dapat benar-benar populis aktif sepenuhnya.

Ringkasnya, tindakan politik luar negeri sangat berpengaruh terhadap popularitas seorang presiden. Lepas dari prosentase kuantitatifnya, kebijakan luar negeri yang non populis akan mengakibatkan kemerosotan citra dan legitimasi seorang presiden. Dan oleh karena bagaimanapun politik luar negeri merupakan aktivitas elitis dan dilaksanakan oleh segelintir elit pemerintahan, maka kebijakan yang non populis akan segera menimbulkan kesan elitis bagi pelakunya karena dipandang tidak peduli dengan kepentingan rakyat banyak di lingkungan domestik. Tiga presiden sebelum Susilo Bambang Yudhoyono tidak berhasil mempertahankan popularitasnya di mata publik, sebagian karena pernah melakukan kebijakan luar negeri yang dipandang non populis. Sementara itu, sekalipun sering kali masih melakukan kebijakan pseudo populis, kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap legitimated hingga ketika Pilpres 2009 tiba, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih secara meyakinkan sebagai presiden RI untuk masa jabatan kedua (2009-2014).

Signifikansi

Berdasarkan pendekatan realisme neoklasik yang dioperasionalkan ke dalam bingkai tipologi profil politik luar negeri, maka PLNRI di era Reformasi yang semula sekadar dicap no-profile, inkonsisten, atau disoriented, dapat dipetakan menjadi empat varian, yakni populis aktif, populis pasif, pseudo-populis (populis semu), dan non-populis.

Di era Reformasi, masa kepresidenan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan kemudian Megawati Soekarnoputri (1999-2004) merupakan era transisi demokrasi, dari otoriterisme di masa Orde Baru menuju situasi politik yang semakin demokratis. Di masa tersebut, upaya pelebagaan PLNRI masih sering bersimpangan dengan sikap pribadi para presiden tersebut. Hal itu dicirikan dengan masih besarnya selera personal sang presiden dalam urusan luar negeri, padahal sistem dan iklim politik reformasi telah mengalami perluasan elit pengambil keputusan dengan siapa presiden harus melakukan koordinasi, terutama DPR dan Deplu. Ajang politik yang kompetitif, kebebasan pers, dan meningkatnya peran lembaga-lembaga non pemerintah juga menuntut kepala pemerintahan untuk senantiasa menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan opini massa yang tercermin dalam sorotan dan ekspose oleh media massa.

Akibat dari situasi transisional tersebut maka seringkali presiden “terperangkap”

melakukan kebijakan luar negeri dan aktivitas hubungan luar negeri yang populis reaktif atau non populis. Hal ini diakibatkan oleh kerumitan yang mereka alami karena menghadapi dua front, yakni intensitas tekanan internasional yang masih sangat kuat dan/atau front politik domestik dari mana kerap kali tuntutan atau reaksi massa bertentangan dengan kepentingan presiden. Di luar itu sering juga presiden melakukan kebijakan luar negeri yang berprofil pseudo populis, yang di permukaan tampak populis namun sesungguhnya menyembunyikan kepentingan elitisnya sendiri.

Sementara itu di masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2009), dalam kondisi tekanan internasional tidak begitu kuat, maka peluang SBY-JK untuk melakukan inisiatif yang menghasilkan profil PLNRI populis aktif lebih besar, sementara apabila intensitas tekanan internasional menguat, maka penyesuaian terhadap *gap* antara kepentingan elit dan dan kepentingan massa akan dikemas dengan sebuah penampilan kebijakan luar negeri berprofil populis semu (*pseudo populis*).

Aksi-aksi populisma politik luar negeri seperti pembelaan terhadap hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja wanita (TKW) memang tampak lebih nyata dan koordinatif. Tetapi yang harus dicermati yakni bahwa masalah TKI dan TKW hanyalah permukaan dari keterbatasan lapangan kerja dan di tanah air. Maka kebijakan “populis” itu akan menjadi sebuah populisme semu apabila persoalan yang lebih substansial, yakni hegemoni korporatokrasi penghasung kapitalisme liberal masih terus menguasai jantung perekonomian Indonesia.

Endnotes

- ¹ Dewi Fortuna Anwar, *Menggagas Politik Luar Negeri Indonesia Baru*, Orasi Ilmiah Pengukuhan sebagai Ahli Peneliti Utama Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, makalah terbitkan, Jakarta, 22 Juni 2000.
- ² Wawancara dengan Mohtar Mas’oed, *The Jakarta Post*, 26 Oktober 2000.
- ³ Budiarto Shambazy, “Politik luar negeri ‘No Profile’,” *Kompas*, 1 Juli 2001, hal. 25.
- ⁴ M. Riza Sihbudi, “Politik Luar Negeri RI Mau Ke Mana?” *Sinar Harapan*, 12 Oktober 2002.
- ⁵ Lihat <http://beritasore.com/2007/07/10/indonesia-dengan-politik-luar-negeri-bebas-aktif-sedang-kehilangan-orientasi/> diunduh 20 Juli 2009.
- ⁶ Diringkaskan dari tabel yang ada dalam Ganewati Wuryandari (ed.), *ibid.*
- ⁷ Riza Sihbudi, *op. cit.*
- ⁸ Dewi Fortuna Anwar, *op. cit.*, hal. 17.
- ⁹ bukan parlementer sebagaimana demokrasi liberal pasca kemerdekaan RI 1945-1959.
- ¹⁰ Stephen Walt, *The Origin of Alliances* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1987).

- ¹¹ Randall L. Schweller, *Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest* (New York: Columbia University Press, 1998).
- ¹² Thomas Christensen, *Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino-American Conflict, 1947-1958* (Princeton: Princeton University Press, 1996).
- ¹³ Gideon Rose, "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy," *World Politics*, 51.1 (1998).
- ¹⁴ Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman dan Jeffrey W. Taliaferro (eds), *Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
- ¹⁵ Contoh kajian tentang tekanan internasional terdapat dalam Bambang Cipto, *Tekanan Amerika terhadap Indonesia, Kajian atas Kebijakan Clinton terhadap Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 284-306.
- ¹⁶ Stefan Titscher, Michael Mayer, Ruth Wodak, dan Eva Vetter, *Metode Analisis Teks dan Wacana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- ¹⁷ Earl Babbie, *The Practice of Social Research* (Belmont, Calif.: Wodsworth Publishing Co., 1983), bab 11, hal. 272-302.
- ¹⁸ Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Public_opinion diunduh 12 Maret 2009.
- ¹⁹ *Kompas*, 1 Juli 2001
- ²⁰ Beberapa seminar dan di banyak tulisan para pengamat politik menyimpulkan PLNRI pada masa presiden Abdurrahman Wahid sebagai bukan high-profile maupun low-profile, melainkan no-profile.
- ²¹ Ben Perkasa Drajat, "Politik Luar Negeri Indonesia Baru," *Kompas*, 27 April 2000.
- ²² Trias Kuncahyono, "Politik 'Bebas Tanpa Kendali'," *Kompas*, 1 Juli 2001.
- ²³ Mengenai "transplacement," baca Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Grafiti, 1995), Bab III.

Daftar Referensi

Buku

- Albertazzi, Daniele dan Duncan McDonnell. (2008). *Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy*. New York and London: Palgrave Macmillan.
- Anderson, Benedict. (2001). *Imagined Communities, Komunitas-komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press.
- Aspinall, E., Van Klinken, G., Feith, H. (eds). (1999). *The Last Days of President Suharto*. Monash University: Monash Asia Institute.
- Babbie, Earl. (1983). *The Practice of Social Research*. Belmont, Calif.: Wodsworth Publishing Co.
- Bambang Cipto. (2003). *Tekanan Amerika terhadap Indonesia, Kajian atas Kebijakan*

- Clinton terhadap Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bantarto Bandoro (ed.). (1994). *Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru*. Jakarta: CSIS.
- Betz, Hans-Georg. (1994). *Radical Right-wing Populism in Western Europe*. New York: St. Martin's Press.
- Buku Putih Politik Luar Negeri Indonesia. (2003). Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.
- Canovan, Margaret. (1981). *Populism*, New York and London: Harcourt Brace Jovanovich.
- Charles F. Hermann, Charles W. Kegley, Jr., dan James N. Rosenau. (eds.). (1987). *New Direction in the Study of Foreign Policy*. Boston: Allen & Unwin.
- Christensen, Thomas. (1996). *Useful Adversaries: Grand Strategy, Domestic Mobilization, and Sino-American Conflict, 1947-1958*. Princeton, Princeton University Press.
- Danielle Albertazzi dan Duncan McDonnell. (2008). *Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western European Democracy*. New York & London: Palgrave Macmillan, 2008.
- Dewi Fortuna Anwar. (2000). *Menggagas Politik Luar Negeri Indonesia Baru*. Makalah tak diterbitkan. Jakarta.
- Eddy Damian dan Budiono Kusumohamidjojo (eds.). (1983). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini, Kumpulan Karangan dan Pidato Mochtar Kusumaatmadja*. Bandung: Alumni.
- Efantino dan Arifin S.N. (2009). *Ganyang Malaysia*, Yogyakarta: Distributor Bukukita.
- Europa World Year Book 2004*. Edisi ke-45. (2006). Taylor & Francis Group, Europa Publication.
- Evans, Graham dan Jeffrey Newnham. (1998). *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books.
- Forrester, G. (ed.). (1999) *Post Suharto Indonesia: Renewal or Chaos?* Bathurst: Crawford House Publishing.
- Ganewati Wuryandari (ed.). (2008). *Politik Luar Negeri Republik Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamengku Buwono X. (2007). *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*. Jakarta: Gramedia.
- Heywood, Andrew. (2007). *Foundations Politics*. London: Macmilan.
- Hilsman, Roger. (2000). *The Politics of Policy Making in Defense and Foreign Affairs, Conceptual Models and Bureaucratic Politics*. Edisi ke-3. New Jersey: A Pearson Education Co.
- Huntington, Samuel P. (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Penerbit Pustaka Grafiti.
- I Made Andi Arsana. (2007). *Batas Maritim Antar Negara, sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- I Wangsa Wijaya dan Meutia F. Swasono (eds.). (1981). *Mohammad Hatta: Kumpulan Pidato dari tahun 1942 s.d 1949*. Jakarta: Yayasan Idayu.

- Ide Anak Agung Gde Agung. (1990). *Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945-1965*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Ikrar Nusa Bakti. (1998) "Kendala Internal dan Eksternal Diplomasi RI Soal Timor Timur," makalah Seminar tak diterbitkan. Jakarta.
- Jackson, Robert dan George Sorensen. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. (2005). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kazin, Michael. (1995). *The Populist Persuasion: An American History*. New York: Basic Books.
- Kegley, Charles W. dan Eugene R. Wittkopf. Edisi ke-10. (2008). *World Politics Trend and Transformations*, Boston, Massachusetts: Thompson Wadsworth.
- _____, *World Politics, Trend and Transformations*. Edisi ke-7. (1999). Boston: Bedford/St. Martin's.
- Keohane, Robert O. (ed.), (1986). *Neorealism and its Critics*. New York: Columbia University Press.
- King, Gary, Robert O. Keohane dan Sidney Verba. (1994). *Designing Qualitative Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kitschelt, Herbert dan Anthony McGunn. (1995). *The Radical Right in Western Europe. A Comparative Analysis*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Kusnanto Anggoro. (2000). *Visi dan Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Abdurrahman Wahid*. Makalah tak diterbitkan. Jakarta.
- Kwik Kian Gie. (2009). *Indonesia Menggugat Jilid II*. Jakarta: Gramedia.
- Laclau, Ernesto. (1985). *On Populist Reason*. London: Verso.
- Leifer, Michael. (1983). *Indonesia's Foreign Policy*. London: Allen & Unwin.
- Leo Suryadinata. (1996). *Indonesia's Foreign Policy under Soeharto*. Singapore: Times Academic Press.
- Lobell, Steven E., Norrin M. Ripsman dan Jeffrey W. Taliaferro (eds). (2009). *Neoclassical Realism, The State, and Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meny, Yves dan Yves Surel. (2002). *Democracies and the Populist Challenge*. London: Palgrave Macmillan.
- Merriam Websters' Collegiate Dictionary*. Edisi ke-10(2002). Springfield, Mass.: Merriam-Webster's Inc.
- Mohammad Hatta. (1981) *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Mohammad Sabir. (1987). *Politik Bebas Aktif*. Jakarta: Haji Masagung.
- Mohtar Mas'oeid. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad Amien Rais. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Neuman, Stephanie G. (ed.). (1998). *International Relations Theory and the Third World*

- (Hampshire & London: Macmillan.
- Plano, Jack C., dan Roy Olton. (1978). *The International Relations Dictionary*. New York: Holt, Rhinehart and Winston.
- Purwadi. *Kamus Jawa-Indonesia Indonesia-Jawa*. (2005). Yogyakarta: Bina Media.
- Restrukturisasi Departemen Luar Negeri ke arah Peningkatan Efektivitas Diplomasi Global di Abad XXI*. Jakarta: Balitbang Departemen Luar Negeri RI.
- Rizal Sukma. *Indonesia and China: The Politics of Troubled Relationship*. (1999). London and New York: Routledge.
- Rosenau, James N. (ed.). *International Politics and Foreign Policy*. (1969). New York: Free Press.
- Russett, Bruce dan Harvey Starr, *World Politics, the Menu for Choice*. Edisi ke-5. (1996). New York: Freeman & Co.
- Schwarz, Adam. (1999). *A Nation in Waiting*. Edisi ke-2. New South Wales: Allen-Unwin.
- Schweller, Randall L. (1998). *Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest*. New York: Columbia University Press.
- Snyder, Richard C., H.W. Bruck dan Burton Sapin (eds.). (1963). *Foreign Policy Decision Making*. New York: The Free Press.
- Solingen, Etel. (2007). *Nuclear Logics: Contrasting Paths in East Asia and the Middle East*. Princeton: Princeton University Press.
- Stiglitz, Joseph E. (2006). *Making Globalization Work*. New York: W.W. Norton & Company Inc.
- Stoessinger, John G. (1990). *The Might of Nations: World Politics in Our Time*. Edisi ke-9. New York: McGraw-Hill.
- Tabrani Rab. *Menuju Riau Merdeka: Pilihan Kongres Rakyat Riau II*. (2000). Pekanbaru: Dewan Perjuangan Kedaulatan Riau.
- Taguieff, Pierre-Andre. (2002). *L'illusion populiste*, Paris: Berg International.
- Titscher, Stefan, Michael Mayer, Ruth Wodak, dan Eva Vetter, *Metode Analisis Teks dan Wacana*. (2009). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Vasquez, John A. (ed.). (1990). *Classics of International Relations*. Edisi ke-2. New Jersey: Prentice-Hall.
- Walt, Stephen. (1987). *The Origin of Alliances*. Itacha and London: Cornell University Press.
- Waltz, Kenneth N. (1958). *Man, The State, and War*. New York: Columbia University Press.

Factors Influencing Indonesian Women Becomes Migrant Workers

Abstract

This paper describes how the Indonesian women, despite the fact that some migrant workers are economically and politically poorly protected by the state, kept the desire to try their luck as migrant workers abroad. In almost all economic sectors, both formal and non-formal, many of the Indonesian Female Migrant Workers (FMW/TKW) living and working abroad did not receive their full rights as workers and sometimes even lost their basic rights such as that to minimum wage, not having their wages, withheld or not paid at all as well as refusal to have their passports returned. Many of the Indonesian TKWs were even physically and sexually abused by their employers while many female workers were victimized into becoming forced prostitutes by their sponsors. In addition, some of the TKW had to face serious problems of protection; many as victims of corrupt practices such as the imposition of illegal levy by the Indonesian and the receiving country police and immigration staffs; demands for payments, extortion of money and confiscation of valuables. Noting that, despite all the sufferings, the numbers of migrant workers are constantly increasing, this paper analyzes the causal mechanism of female migration from the socio-economic and political context in Indonesia.

Keywords: TKW problems, the State, reasons to migrate remittance.

Mutia Hariati Hussin

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

Introduction

Women or female are often constructed from the view point of patriarchal community as opposite of men or male. The differences in biological structures and (sometimes) behavior (feminine / masculine) complete the differences in the way they are treated in every society. Women are considered not equal to men or worst as lower than men. Women are seen as irrational because they tend to rely on their feelings to deal with problems. Opinion difference led to various discriminations and injustice to women such as marginalization, subordination, harassment and even double burden to women's roles. Those discriminations and injustice to women happen everywhere and raise problems in almost every country in the world.

Instead of escaping from the suffering at home, some women might get entrapped to worst situation when working out of their traditional concept of duty around their family to seek more opportunity as migrant workers abroad.

This paper provides a review of existing studies about how migration alters women's position in the course of social change. First, on the conceptual and methodological issues from the existing literatures that shows the changing gender relations. Second, selective reviews of case studies are outlined illustrating some problems for Indonesian female migrant workers. The objective is to illustrate how the problem starts, in part, at home and how the government addressed it. The concluding discussion summarize, in country-specific major findings, an attempt to distinguish issues that put the reason of increasing numbers of Indonesian female migrant workers.

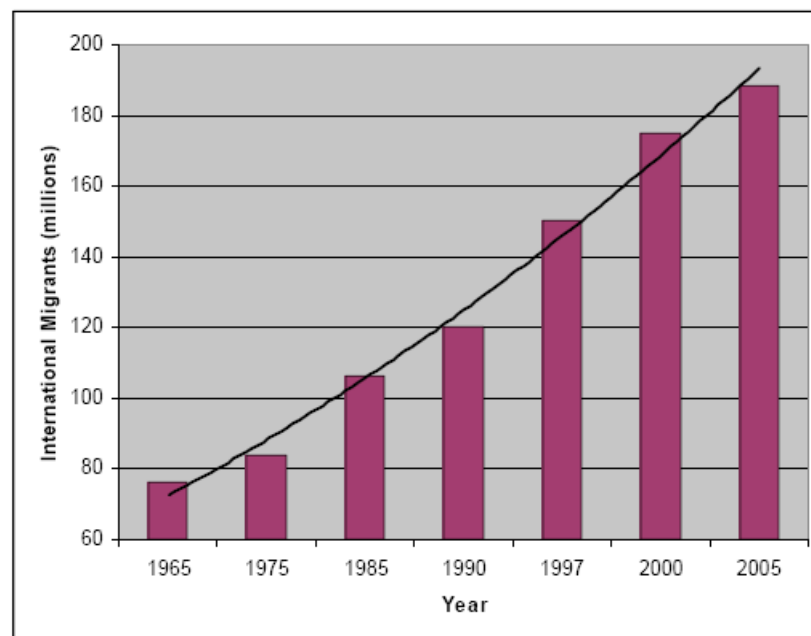
Indonesia is a quintessential labor-surplus nation. At the end of 2006, an estimated 11 percent of Indonesian workers (11.6 million) were unemployed, and underemployment was over 20 percent (45 million workers). Not surprisingly, the two types of migration that most affect Indonesia involve emigration. First is an increasing level of migration to more developed nations, particularly those belonging to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); here the flow is predominantly permanent and consists mainly of skilled migrants. Second is the better-known, temporary movement of largely unskilled workers to the Middle East and elsewhere in Asia. Many of these migrants are women who work as domestics and are vulnerable to exploitation. Quantifying the scale of the movement, however, is rendered difficult by the limited collection of stock and flow information on movements to and from the nation, and the fact that there are substantial undocumented flows out of Indonesia.

The international migration of labor is an important component of globalization and economic development in many less developed countries (LDCs). When productions are driven to fulfill the demand to put saving for export, farmers got the least of income with limited means to fulfill their family basic needs. The cycles goes on and on that finally lead to poverty that lead the affected community to try find a better alternative jobs in country and even abroad. The global development model with the emphasis on liberal and capitalistic economy move man and woman out with every possible job available to them. As mention before, different kind of jobs can be obtained for men and woman. The groupings somehow formalize women's position as mere commodity (Wibowo 2005). The number of international migrants, or people residing in a country other than their country of birth, has increased more or less linearly over the past 40 years, from an estimated 76 million in 1965 to 188 million in 2005, as illustrated in Figure 1. International migration raises both hopes and concerns for and is critical to how globalization and economic development are experienced by many LDCs from which international migrants come. About one half of the world's international migrants are women (IOM 2005). However, some interna-

tional migrant flows are dominated by males, others by females. For example, more Indonesian men migrate to the United States, but more female find place to migrate to Malaysia and the Gulf Countries.

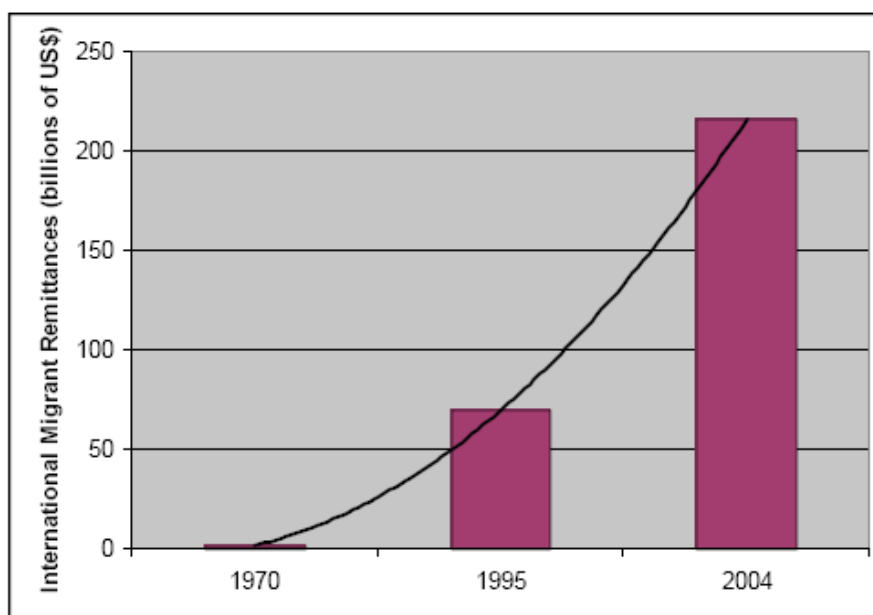
The numbers of migrant workers increase significantly especially the number of female migrant workers. In the period of 20 years (1974-1994), female migrant workers increase by 116 times. More recent data from the ministry of Man Power of Indonesia and World Bank shows that 76% from 480.393 are female and around 94% work as domestic helpers in the Middle East, East Asia and South East Asia.

Figure 1. Upward Trend in Total International Migration, 1965-2005.



International migration creates both losses and gains for the LDCs from which international migrants originate. LDCs lose millions of highly educated people where human capital often is already scarce. LDCs also lose significant numbers of relatively low skilled workers whose productivity and wages are far higher abroad than at home. International migrants send substantial amounts of remittances back to their countries of origin. The flow of international migrant remittances has increased more rapidly than the number of international migrants, themselves: from an estimated US\$2 billion in 1970 to US\$216 billion in 2004. Part of this sharp increase is probably due to an improved accounting of migrant remittances; however, the actual amount of remittances probably is higher than these numbers indicate. While the growth in international migration has been linear, the growth in remittances has been nonlinear, as one can see in Figure 2.

Figure 2. Growth in Total International Migrant Remittances, 1970-2004



In other words, on average, each of the world's international migrants is sending home more remittances today than in the past. There is not a single convincing explanation for this phenomenon. Nearly 70% of all remittances go to LDCs. It is likely that remittance figures understate true international remittance flows, which include an unknown amount of cash that does not enter countries through formal banking channels as well as goods that migrants send or carry home. Remittances make people the most important "export" of many LDCs in terms of the foreign exchange that they generate.

The Scope of Research

This paper will examine temporary labor migration of women from Indonesia since Indonesia belongs to three major sending countries along with the Philippines and Sri Lanka. This is because temporary migration comprises a significant component of global migration flows due to the "closed-door" policy in many industrialized countries. The focus will be on the migration of "unskilled women" because the majority of Indonesian migrant women fall under this category. The scope of this paper is also limited to available study related to Indonesia Female Migrant Workers (IFMW) since there is not sufficient data available for illegal (irregular, undocumented) migration. The paper will also mainly examine the mechanism of the "sending side" or "emigration side" in this paper because a relatively small number of researches have been done from developing countries' perspectives.

Research Questions

The research question is concerning the patterns and mechanisms of women's migration in Asia. The majority of the flows of female migrant workers originate from three major sending countries (Philippines, Sri Lanka, and Indonesia) while men migrate from all developing countries. Why is there such a pattern? What factors drive women in these countries to emigrate? Many case studies have been conducted on female migration in developing countries that mostly attribute international migration of female to poverty. The explanations does not go beyond it to explain why woman from poor countries do not migrate,

Methodology

This paper is based on library research about Indonesian female migrant workers in both Malaysia and Saudi Arabia. A major challenge has been reconciling data and information from different sources, which tend to differ significantly due to different methods of collection or calculation. The data presented in this report represents the best estimates based on significant research of all different sources.

This paper is organized under four chapters where theoretical framework being the second chapter after the introduction. Chapter three will outline the discussion on the reasons behind female workers to decide to migrate and leave their nest behind looking for better livelihood using integrative approach. The fourth chapter is the conclusion and recommendations based on network theory found in Nana Oishi work and her elaborate findings about "social legitimacy" (Nana Oishi, 2002).

Theoretical Framework

In her productive writing about migrant workers, Nana Oishi (2002) presented some valuable frameworks to deal with the issues. One alternative, the Network Theory, and her research findings: Integrative Approach to International Female Migration, which can be used to analyzed factors influencing Indonesia women to become migrant workers are presented in this paper.

Network Concept

Network concept attributes migration process to personal, cultural, and/or other social ties. In migrant-sending countries, information about jobs and living standards abroad is most efficiently transmitted through personal networks such as friends and neighbors who emigrated. In receiving countries, immigrant communities often help their fellow men and women to immigrate, find a job, and adjust to a new environment. These networks reduce the costs of migration for newcomers, further inducing potential migrants to leave their countries.

Network concept is indeed applicable to the case of female migration in Asia. Women tend to rely on their personal networks more than men do. The literature

and my own field research also suggest that many migrant women found jobs through their friends and relatives. The density and geographical extent of personal and institutional networks between migrant receiving countries and sending countries would certainly help explain how migration has expanded.

However, social networks cannot explain why and how such networks were developed between one country and another to start with. The web of network does not seem to be evenly spread across countries and regions. The migration system theorists argue that the development of such networks is dependent on historical, geographical, and political ties which existed before large-scale migration started (Kritz et al, 1992). However, there is no convincing evidence indicating the preexistence of such close ties between major migrant-sending and receiving countries in Asia; e.g., the Philippines and Saudi Arabia, or Sri Lanka and Kuwait. Social networks alone cannot explain the patterns of international female (and male) migration either. But, on the story of Indonesia and the Gulf Country, especially Saudi Arabia, and between Indonesia and Malaysia there are strong evident that network theory can be applied.

An Integrative Approach to International Female Migration

Immigration policies and labor demand/supply do affect the overall volumes and patterns of international female migration. The general assumption is that if there is a large demand for migrant women and if the immigration policy is more open for unskilled female labor, the more migrant women will enter the particular country. Also, there is a process of selectivity among employers. For example, many employers in Southeast Asia and Europe prefer to hire Filipinas as domestic helpers because of their high education level, language (English) ability, and friendliness. In fact, the wage level of Filipino is higher than that of any other nationalities.

However, the demand level and selectivity on the employers' side cannot entirely explain the patterns of female migration. For instance, Arab households are said to prefer to hire Muslim maids because Christian maids (most Filipino maids are Christian) teach wrong values to children. Statistics shows that many Muslim women from Indonesia fill the vacancies as well as balancing the demand/supply labor scale. In this case, questions arise concerning the influence of immigration policies in Indonesia. Is there any or non existence?

Factors Influencing Indonesian Women Becoming Migrant Worker

As the largest Muslim populated country, Indonesia has a long history of cooperation and ties with Saudi Arabia. As Hajj Pilgrimage is dutiful for all Muslim that have enough resources to go, the city of Mecca where the Ka'bah located is the final destination for Hajj. Every year thousands of Indonesian Muslim visit Mecca. Some of them stay longer and sometimes end up being illegal workers in any of the Gulf

Countries after their Hajj visa expires. Better wages, some expecting to be paid the equivalent of \$800 per month, lured Indonesian migrant worker to endure the working condition in the Gulf Countries. In that way, Saudi Arabia is very attractive to Indonesian Muslim that gives reasons to them to be there. How can we use this fact to explain the ever increasing numbers of female migrant workers to choose Saudi Arabia? The following framework offers some explanations.

Transnational Network

One way of establishing an analytical link between migration and the politicization of migrants concerns through non-governmental institutions is via the concept of governance. Governance issues have in previous studies typically been approached from one level or two levels only – i.e. supra-state or NGO level. Another strand of social science theorizing has been concerned with networks in a national and transnational setting. The principal categories of social theory employed to capture these different levels, therefore, are networks.

The concept of “network, thus, serves as a link between migration studies and governance. Within migration studies, networks theory have mostly been approached from socio-cultural and/or spatial perspectives, whereby the political sphere has not yet received sufficient attention (Piper, 2006a; as also noted by Faist, 2004). Social movement scholars and political scientists working on advocacy networks, on the other hand, have investigated the transnational sphere of such network activities and the transnational nature of the issues advocated for, as well as the transnational form of such activism, but hardly beyond the context of NGOs neglecting trade unionism and thus collective political action. Migrant worker organizing has, therefore, not been looked at from a transnational nor trans-institutional perspective. There is a great deal of academic writing on the subject of trade union reforms and summarizing these goes beyond the scope of this paper. Trade unions ambivalent stance on migrant labor has also been subject to some analysis (Kahmann, 2002; Briggs, 2001). Theoretically, the most interesting and relevant contributions as far as this chapter is concerned, has been the work by Waterman (2001) on social movement unionism and Johnston (2001) on “labor as citizenship movement. The latter makes direct reference to immigrant labor, documented and undocumented. Johnston highlights the increasingly *transnational* workforce and *transnational* overlapping of societies which requires, according to him, a re-conceptualization of conventional perspectives on citizenship (argued by Piper and Ball, 2002). New approaches and strategies are needed to address critical problems faced by migrant workers in their role as foreigners as well as laborers in certain sectors that are associated with the “three Ds” (dirty, difficult, dangerous), epitomized by construction, agriculture, and domestic work. There is growing realization that “coalitions of organizations” can exert far more influence than single organizations by themselves.

Waterman (2001, 2003) has developed the notion of “social movement unionism” as a synthesis of trade-union theory with that of “new social movement” theory, arguing that the crisis of trade unionism is rooted in the fact that the labor movement is still understood in organizational/institutional terms when it needs to be understood in networking/communicational ones (as new social movements have done). Both he and Johnston argue that although labor is not the only source for social change, it constitutes an important ally and would achieve its full potential if aligned with other democratic social movements. With traditional workers and unions no longer being the norm of political struggle for social justice, labor movements have to rethink their way of operating. Recent studies on migrant worker NGOs in the Southeast Asian context have argued on a similar line: that regular collaboration with trade unions would enhance NGOs advocacy efforts.

The specific situation of many migrant workers highlights the importance of organizational representation and the formation of alliances as well as networks across space, institutions and issue-specific (human rights, women’s rights, worker’s rights) to address the complexity of migrants’ rights.

Similar story can be drawn for Malaysia where proximity distance and the similarity in cultural backgrounds make it a favorable destination to work abroad. The history of Indonesian working in Malaysia starts in fifteen centuries, but migration was especially significant during colonial times. According to the 2001 Malaysian census, there were 1.38 million foreign born in the country, more than half of them from Indonesia. Although most Asian nations oppose permanent settlement of foreigners, more Indonesians are settling in other Asian countries. Among these Indonesians are the highly skilled and those who marry natives of other Asian countries. In Taiwan, for example, a number of Indonesian women have married Taiwanese men, forming the nucleus of a small, permanent Indonesian community. The largest numbers are in neighboring Malaysia, which has a similar language, culture, and religion. Permanent settlement of Indonesians dates back. However, the scale of recent permanent settlement of Indonesians in Malaysia is not known. Significant numbers of unskilled labor migrants settle permanently in Malaysia, but many do not become legal residents as permanent settlement of unskilled Indonesians is opposed.

The tendency for migrant workers to become permanent or long-term residents has been particularly marked in East Malaysia. The population of the state of Sabah has soared from 697,000 in 1979 to almost 3 million in 2004, and migration from Indonesia and the Philippines has played a major role in this growth. There are an estimated 100,000 irregular migrants in Sabah and 138,000 in the West Malaysia state of Selangor, the majority of whom are Indonesians. The expense and danger of detection at the border has encouraged some migrant workers from eastern Indonesia to settle permanently, or on a long-term basis, in Sabah rather than regularly return to their nearby Indonesian homes. One consequence has been an increase in

the number of “stateless” Indonesians who have no status in Malaysia and whose Indonesian passports have expired. Some 35,000 Indonesian passports were issued to such “paperless” citizens in Malaysia in the first four months of 2006. In Singapore, there is also a tradition of Indonesian immigration and large-scale labor migration. More recently, Singaporean men have brought over Indonesian wives. The number of Indonesian-born residents (excluding contract workers) in Singapore in 2000 was 32,785.

Social Legitimacy

The concept of social legitimacy is also mentioned in Oishi’s work. She proposed the concept to better understand the linkages between policies and individuals relates to each other. The social legitimacy is defined as the embodiment of norms in a given society which endorses particular behavioral patterns. Social legitimacy for international female migration means the set of norms that are conducive to women’s international migration. Social legitimacy for women’s international migration are deeply rooted in many socioeconomic factors such as (1) historical legacy of women’s wage employment, (2) the country’s integration into global economy, which results in the feminization of the labor force, (3) women’s rural urban mobility; and (4) gender equality, particularly in education.

Reasons to Decide on Becoming Female Migrant Workers

In any endeavor of human life, each person will find their course of action related to their own needs and surroundings. In some woman, their roles as mothers and wives devoted to the maintenance of a stable, nurturing, domestic environment were central to the state’s vision of an orderly and morally controlled nation. Yet the state’s production of idealized bourgeois femininity as naturally linked to the home and hearth (Robinson, 1991; Shiraishi, 1997; Sen, 1998) was complicated in the state’s own promotion of class specific gender ideologies that encouraged low-income women’s separation from kin in certain situations (Stivens, 1990; Sunindyo, 1996; Ananta et al., 1998). In order to work as a domestic in Saudi Arabia, most migrants leave their families, including their children in many cases, behind in Indonesia. Thus, the family regimes under the New Order that promoted the domestic workers’ departure from kin were considerably more flexible than the state-promulgated ideal of the middle class nuclear family.

Historical Legacy of Women’s Employment

The historical legacy of women’s gainful employment refers to the tradition in which women were engaged in economic activities outside their home, whether in formal or informal sectors. In the Philippines, women had been engaged in commerce and services even before the colonial period. Similarly, Sri Lankan women

have been the primary workforce in tea estates since the country was under British rule, and also comprised the majority of handloom workers after the country gained independence. In both countries, women's wage employment and geographical mobility were not alien to the society. On the other hand, in Bangladesh, the tradition of female seclusion has discouraged women from openly taking part in wage employment. Women have long been "invisible human resources" (Wallace et al, 1987). The story of Indonesia is not far different from those countries. More women than men are working in collective jobs in the tea plantations or rice field. Women also dominate the traditional markets around their immediate community when men travel to do it.

Impact of Global Economy and Women's Rural-Urban Mobility

A country's integration into the global economy and success in export-oriented industrialization also help develop social acceptance toward female migration. In Indonesia, the Philippines and Sri Lanka, export-oriented industrialization led to a rapid increase in the female labor force and accelerated rural-urban migration of women. Bangladeshi women have also started entering the labor force in manufacturing sectors, but to more limited extent than Filipinas and Sri Lankans. The vast majority of them still remain in the agricultural sector in rural areas. Rural-urban migration is still dominated by men. Women's geographical mobility within the country is still limited in Bangladesh.

Women's Education

Women's education level also affects the level of international female migration, albeit in indirect ways. First, the high education level among female population in developing countries attracts the investment of multinational corporations. Foreign investors normally prefer to hire skilled female workers who are also cheap and docile. The export-led manufacturing sectors thus facilitate women's internal mobility because they increase their employment prospects in various urban sectors. Having education also increases women's expectations for better life, and family tends to expect returns from daughter's education as well. While the public shows concerns for internal/international migration of illiterate women, it tends to accept the migration of women with some education, believing that they should be able to make wise decisions and can protect themselves in an unfamiliar environment.

Social legitimacy is further enhanced by political backing. In the Philippines, President Marcos's aggressive promotion of overseas employment helped increase the number of migrant workers, and this created an accommodating environment for international migrants, whether men or women. While succeeding administrations have not officially promoted labor migration, they have recognized its economic importance and almost all presidents have praised migrants in public speeches as na-

tional heroes or heroines for helping their family and country. The Philippine president even greets returning migrants at the airport in every December. Such recognition that the government attached to migrant workers certainly helped increases the social acceptability of international migration, whether for men or women. In the Philippines, very little stigma is attached to international female migration.

In Bangladesh, by contrast, social legitimacy for female migration even within the country is generally low, let alone for their migration to foreign countries. Social stigma against women migrating abroad is still strong. And this is reflected in the lack of political backing to female migration as well. The policy makers and intellectuals argue that potential migrant women tend to be illiterate, helpless, and vulnerable to abuse and exploitation in a foreign land. All of that related to the traditional culture and social norms that confer power and privilege to men. They believe that the state needs to protect these women by banning their emigration. The lack of such legitimacy or the existence of stigma against female migration within their own country also discourages women from leaving the country. Women are afraid of being ostracized, labeled as promiscuous, and risking their marriage ability or tarnishing family reputations.

Conclusions

The patterns of international female migration can be explained by three levels of analyses from the “sending side”: (1) the state; (2) individuals; and (3) society. At the state level, emigration policies treat men and women differently. Because women are not a value neutral workforce but the symbols of national dignity and pride, the government tends to have protective and restrictive emigration policies for women. Emigration policies for women tend to be value-driven rather than those for men which are economically driven where women put in their traditional status in domestic works wherever they are.

At the individual level, women’s autonomy and decision-making power are crucial determinants. Women in so called “major sending countries” (e.g. Indonesia, Philippines and Sri Lanka), have higher autonomy and decision making power within their households than those in “non sending countries.”

However, these are not the only determinants, either. Many low-income Bangladeshi women have higher autonomy and yet are not interested in migration indicating that the social stigma about indecency for woman to travel alone is strong enough to discourage the vast majority of lower-middle and middle-class women from leaving the country. Therefore, “social legitimacy” matters.

Social legitimacy, which derives from historical legacy of women’s employment, a country’s integration into global economy, women’s rural-urban mobility, and their education level, is a prerequisite for the large-scale international female migration. A country’s export oriented strategy increases foreign investment that leads to the rise

in women's labor force participation and their rural-urban mobility. Even in the major "sending countries" such as Philippines and Sri Lanka, it was not socially desirable for women to leave their community on their own to work in cities before export-oriented industrialization started. However, as the country became integrated into the global economy, and as the demand for female labor increased in urban areas, many low-income women responded to the demand by leaving their communities, moving from rural to urban areas. As a result, social norms were gradually transformed. The increase of women's rural-urban mobility eventually resulted in social acceptability of women leaving their community on their own, whether for cities or foreign countries.

The link between globalization and international migration is not as direct as the conventional migration literature suggested. The globalization process and the resultant export oriented industrialization do not necessarily produce international migrants directly. However, they seem to help bring about changes in social perceptions towards women's employment and their independent departure from their own community. The sudden increase in the demand for female labor gradually transforms traditional norms which used to restrict women's geographical mobility within the traditional community.

The mechanism of international female migration is extremely complex and thus requires an "integrative approach" with the multiple levels of analyses. Similar studies are needed in other "sending country" regions such as Latin America, Eastern Europe, and Africa to compare the main causal factors. Does the state act in the same manner in all regions? Are there any regional differences in the ways in which globalization processes affect women's migration? Further comparative research will lead us to a better understanding of international female migration.

Acknowledgements

Interests to write the topic develop simultaneously by an old friend academic speech (he works for the Ministry of Man Power) at the department, the call for IJS paper and it grow stronger learning the fate of Indonesian female migrant worker, Ruyati, beheaded in Saudi Arabia exactly 50 days ago. This paper, for me, is the first composed about female migrant worker. It is not good or excellent for the details and data mostly derives from others writers work. Research should be done on the topic that I choose to elaborate, the reason why unskilled, inexperienced, low educated women dare to leave their family behind to work as migrant worker. The writing standards also need to be improved. Suggestions and critics are welcome.

Many thanks sent to Nur Azizah, Tulus Warsito and Siti Muslikhati for their insightful commentary and endless support that encourage me to write in the nick of time I can afford to spare. Particular thanks to my colleagues in BPM: Dewi Nurul

Musjtari Titiek Widyastuti, Nurul Makiyah, Maryam and Andri that kept the office run to give me opportunity to complete this paper. Presentation of this paper is made possible under IR grants for IJS. That funding is greatly appreciated. I alone remain responsible for any shortcomings.

REFERENCES

- Ananta, A., Kartowibowo, D., Wiyono, N. H., & Chotib (1998). The impact of the economic crisis on international migration: the case of Indonesia. *Asian Pacific Migration Journal*, 7(2-3), 313-338.
- Briggs, V. M. *Immigration and American Unionism*, ILR Press, 2001.
- Castles, S., & Miller, M. *The Age of Migration*. (2nd ed.). London: Macmillan, 1998.
- Directorate General of Overseas Employment Development [PPTKLN]. Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration. 2006.
- Faist, T. (2004) „Towards a Political Sociology of Transnationalization, in: *Archives Européennes de Sociologie* vol. 45(3): 331-366.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Hernández-Coss, Raúl, et.al. *The Malaysia-Indonesia Remittance Corridor: Making Formal transfers the Best Option for Women and Undocumented Migrants*, World Bank, Washington DC., 2008
- Halabi, Romina, *Contract Enslavement of Female Migrant Domestic Workers in Saudi Arabia and the United Arab Emirates*, *Topical Research Digest, Human Rights and Human Welfare*, 2009.
- Higgott et al. *Non-State Actors and Authority in the Global System*, London: Routledge ; O'Brien et al. (2000), *Contesting Global Governance – Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements*, Cambridge University Press. 2000.
- Hossain, Mahabub. Et.al. *Nature and Impact of Women's Participation in Economic Activities in Rural Bangladesh: Insights from household surveys*, 2004
- Hugo, Graeme, *Statistic on Indonesian Migrant Workers*, University of Adelaide, 2007
- ILO (2003) *Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers: An Information Guide – Booklet 1: Why the Focus on Women International Migrant Workers*. Geneva: ILO.
- ILO (2004) *Towards a Fair Deal for Migrant Workers in the Global Economy*, Geneva: ILO.
- ILO (2005) *ILO Multilateral Framework on Labour Migration – Non-binding principles and guidelines for a rights-based approach to labour migration*, Geneva: ILO.
- ILO Socio-Economic Security Programme (2004) *Economic Security for a Better World*, Geneva: ILO.
- International Organization for Migration. *World Migration Report*. Geneva, 2005.
- Johnston, P. “Organize for What? The Resurgence of Labor as Citizenship Move-

- ment, in H. Katz and L. Turner (eds), *Rekindling the Movement: Labor's Quest for Relevance in the 20th Century*, Ithaca: Cornell University Press, 2001.
- Kahmann, M. "Trade Unions and Migrant Workers: Examples from the United States, South Africa and Spain, Discussion and Working Paper 2002.02.03, ICFTU, Brussels, 2002.
- Kritz, M. L. Lim, and H. Zlotnik. *International Migration Systems: A Global Approach*. Oxford, Clarendon Press. 1992.
- Oishi, N. *Women in Motion – Globalization, State Policies, and Labor Migration in Asia*, Stanford: Stanford University Press, 2005.
-*Gender and Migration: An Integrative Approach*, CCIS, University of California, San Diego, 2002
- Özden, Ç. and M. Schiff, Eds. *International Migration, Remittances, and the Brain Drain*, Palgrave Macmillan, New York, 2005.
- Piper, Nicola, *Enhancing the Migration Experience: Gendering Political Advocacy and Migrant Labor in South East Asia*, IDRC WRC Working Paper Series, no. 1, 2007.
-"Economic Migration and the Transnationalization of the Rights of Foreign Workers – A Concept Note", *ARI Working Paper Series No. 58*, February 2006, ARI: Singapore (www.nus.ari.edu.sg/pub/wps.htm).
-and A. Uhlin, "New Perspectives on Transnational Activism, in: Piper, N. and A. Uhlin (eds), *Transnational Activism in Asia – problems of power and democracy*, London: Routledge, 2004.
-and R.E. Ball (2002) „Globalisation and Regulation of Citizenship - Filipino Migrant Workers in Japan', in: *Political Geography*, vol. 21(8): 1013-1034.
- Robinson, K. Housemaids: the effects of gender and culture in the internal and international migration of Indonesian women. In G. Bottomley, M. de Lepervanche, & J. Martin (Eds.), *Intersexions: Gender/class/culture/ethnicity* (pp. 33-51). Sydney: Allen and Unwin, 1991.
- *Gender, Islam, and nationality: Indonesian domestic servants in the Middle East*. In K. Adams, & S. Dickey (Eds.), *Home and hegemony: Domestic service and identity politics in South and Southeast Asia* (pp. 249-282). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2000.
- Sen, K. (1998). Indonesian women at work: reframing the subject. In K. Sen, & M. Stivens (Eds.),
- Shiraishi, S. (1997). *Young heroes: The Indonesian family in politics*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Stivens, M. (1990). Thinking about gender, state and civil society in Indonesia. In A. Budiman (Ed.), *State and civil society in Indonesia* (pp. 99-113). Clayton, Australia: Monash Asia Institute, Monash University.
- Sunindyo, S. (1996). Murder, gender, and the media: sexualizing politics and violence. In L. J. Sears (Ed.), *Fantasizing the feminine in Indonesia* (pp. 120-139). Durham
-

- and London: Duke University Press.
- Tienda, Marta and Booth, Karen, *International Sociology*, March 1991 vol. 6 no. 1.
- Taylor, J. Edward, *International Migration and Economic Development*, International Symposium on International Migration and Development, Turin, June 2006.
-*The Relationship between International Migration, Trade and Development: Some Paradoxes and Findings*, Texas, September, 2006
- Wallace, Ben J, Rosie Mujid Ahsan, Shahnaz Huq Hussain, and Ekramul Ahsan. *The Invisible Resource: Women and Work in Rural Bangladesh*. Westview Press. Boulder & London. 1987.
- Waterman, P. (2003), “*Adventures of Emancipatory Labour Strategy as the New Global movement Challenges International Unionism*,”
- <http://groups.yahoo.com/group/glosodia/files/labour> HYPERLINK “<http://groups.yahoo.com/group/glosodia/files/labour%20intentionalism/%20>”intentionalismHYPERLINK “<http://groups.yahoo.com/group/glosodia/files/labour%20intentionalism/%20>”/
- *Globalization, Social Movements and the New Internationalism*, London and Washington: Mansell (second edition), 2001.
- Wibowo, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, Cindelaras, Yogyakarta, 2003

Welcome to ‘Indonesia’! Feminist Readings of “*teach yourself Indonesian*” Self-Learning Language Course¹

Abstract:

Coinciding with the celebration of 80 years of *Sumpah Pemuda 1928*, this paper offers a feminist close reading of the “*teach yourself Indonesian*” self-learning language material. “*Teach yourself Indonesian*” offers for the English speaking world, ways to learn bahasa Indonesian, but it also offers ways to “discover” Indonesia and Indonesians. The close reading provided in this paper draws from the perspective that concepts, ideas and norms are constituted through reiteration in everyday social practices, such through repetition of the sixteen learning units of the “teach yourself Indonesian”. This paper aims to illustrate from the readings of the learning units, who are the “normalized” students of Indonesian language, and who, on the other hand, Indonesians and Indonesia with whom the students will interact, with a particular focus on constructs and boundaries of gender norms. Paper also briefly reflects the “forgotten” events of May 1998, that form an important part of the authors process of learning Indonesia(n).

Marjaana Jauhola

Department of International Politics,
Aberystwyth University
email: kmj06@aber.ac.uk

Introduction: Setting the Stage for Performativity

Listen to these introductions several times. Then when you feel that the sounds are familiar, have ago at repeating after the Indonesian speakers... So now (laughter) when you are familiar with the self-introductions in this section, we are going to let you hear them again. But this time, at full, natural conversation speed (Byrnes and Nyimas 2003, Unit I: Welcome to Indonesia).

One part of the learning a new language is learning the fluency of using it through repetition. Repetition at first is slow and feels cumbersome. However, with the effort of doing homework and listening to the dialogues in the learning units again and again, the student is rewarded by “getting things right” and being able to use right words and idioms in the right contexts – even perhaps in real life situations. A closer look at the language course

materials is not only about the vocabulary and grammatical structures. It offers possibilities to understand how course materials- such as dialogues in the learning units – simultaneously construct the world that is being introduced and discussed. How certain ideas and concepts become “normalised”.

Judith Butler’s (1999 [1990]) work on performativity of gender provides an important entry point to talk about repetition and how gendered subjects are produced through materials such as “teach yourself Indonesian”. As Alecia Yongblood Jackson (2004) has argued, performativity for Butler, does not refer to performance by subject, but a performativity that *constitutes* a subject and *produces* the space of conflicting subjectivities that contest the foundations and origins of stable identity categories (Jackson 2004, 675).

This process can never be final, and thus, there is always space for resistance and subversion: the ideals what Indonesia, a student of bahasa Indonesian, Indonesianess, or being Indonesian woman, or man could mean. An analytical focus on discourses allows us to understand how the world around us is constructed and made understandable to us. While at once it allows ways to understand the world, it also shows the limitations of sayable (Foucault 1991, 59) – what remains absent from the picture painted for us.

Sara Ahmed (2006) has noted

This paradox – with effort it becomes effortless – is precisely what makes history disappear in the moment of its enactment. The repetition of the work is what makes the work disappear (Ahmed 2006, 56).

While repeating the units of the “teach yourself Indonesian” language course first time in 2006, it suddenly occurred to me. To understand what appears to be normal, requires the listener to play, pause, rewind, and replay; and pay close attention to the disappearing histories, meanings and assumptions, the processes of normalizing that are lost in the repetition.

This paper, coinciding the celebration of 80 years of *Sumpah Pemuda 1928*, focuses on the analysis of “teach yourself Indonesian”, the material with which I started my bahasa Indonesian studies in 2006 before arriving in Indonesia for the first time. My aim in this paper is to illustrate the representation of “Indonesia” and “Indonesians”, but also representation of those “who arrive”, and “learn Indonesian”. The book under close reading is the 2003 edition of the “teach yourself Indonesian”. The analysis does not attempt to be exhaustive, merely it is an attempt to illustrate what intertextuality and feminist close reading “does to a text”. The focus of the analysis is on the dialogues and the illustrations of the book. Thus, this essay does not claim to have completed the close reading. In fact, keeping the method in mind, it would be impossible to claim that there is a particular moment when the reading has come to its end.

The structure of this paper is the following: the first part introduces a theoretical framework for a method for feminist reading. The second part, after short introduction to “*teach yourself*” book series, provides examples of feminist close reading of the bahasa Indonesian learning materials.

Theoretical Framework

Feminist method of reading that will be introduced next can be located belonging to the “linguistic turn”² in International Relations, where the focus is often in the writings of French philosophers such as Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Julia Kristeva, and Roland Barthes, which are further used and developed by various literature theorists and political and social scientists (Gregory 1989, xiii-xiv; also DerDerian & Shapiro 1989).

What seems to be common for “linguistic turn”, is the interest in how knowledge, truth and meanings are constituted (Gregory 1989, xiii). The focus of the research is on workings of language that construct the world, concepts and ideas that are perceived as facts/values, and discourses that constitute “regimes of truth” (Gregory 1989, xiv). Thus, identities, knowledge and power relations and constructions of Self and Otherness are placed into the centre of the analysis. This analysis involves a critical interrogation of the exclusionary operations by which “positions” are established and it requires that concepts and terms used in the research are reused and rethought.

Not all feminists, however, accept the idea of linguistic turn without criticism. For example, postcolonial feminists are critical about postmodern idea of the loss of essence of concepts and identities (Alexander and Mohanty 1997, xvii) and say that although postmodernism can be practiced as an oppositional critique of modernism, it remains on a continuum with modernism (Grewal and Kaplan 1994, 4). Furthermore, the fear of essentialism has created confusion regarding the interconnections between location, identity, and the construction of knowledge (Alexander and Mohanty 1997, xvii). However, postmodernity is also seen as a useful concept to analyze the way that modernity is produced in diverse locations and how these cultural productions are used and circulated. The analysis enables to understand processes of domination and subordination in those diverse locations. (Alexander and Mohanty 1997, xvii; Grewal and Kaplan 1994, 5).

Along with the lines of linguistic turn and Judith Butler in particular, I argue that instead of being a man or a woman, it is necessary to replace the verb being with a vocabulary of action – becoming or doing. To Judith Butler, identity categories, such as gender, should be understood as normative and performative activity, which constitutes itself through the cultural and social repetition and rearticulation. Concepts do not exist before they are performed in a social context and they become seen as natural through regulative knowledge and power relations. Thus, gender can be

thought of a way of acting the body, yet one does not become gender through a free choice, as gender identity is governed by taboos, conventions and laws that operates within social practices (Butler 2004, 41).

The distinction between sex (male/female), a matter of biology, and gender (masculine/feminine), a set of culturally and socially defined characteristics, has been central to a significant body of gender theory, and this distinction is nowadays seen as a 'natural' part of Introduction to Gender/Women Studies courses: "sex is a natural, biological fact, but gender is a cultural, historical and linguistic production or achievement" (Chambers and Carver 2008, 56). Some scholars locate the emergence of the word 'gender' or 'jender' into the Indonesian vocabulary after introduction of the English concept by Asia Foundation and Ford Foundation in early 1990s. These days it is an integral part of taught Women and Gender studies, and widely used by the women's NGOs (see e.g. Jamil and Lubis 2003 and Rinaldo 2006). A common notion of gender is based on the idea of binary opposition of two sexes and exclusionary categories of man and woman are created. Based on this construct, one can be only one gender, never the other, or both.

In the Indonesian context, in addition to the sex/gender (*jenis kelamin/ jender*) divide which has been an important part of the feminist discourse since 1990s, a third concept, *kodrat* (natural character) is as important. Term *kodrat* is used to refer to the biological 'facts' or intrinsic nature of woman and man, which has also gained religious meanings as 'God's will' and 'creation of God' (Tiwon 1996, 48). At the national level the concept 'women's nature' is built on various pre-colonial and mainly selected Javanese aristocratic ideals during the colonial period, although they are portrayed as the norm and universal (Wieringa 2003, 72; 2002, 35; Dzuhayatin 2001, 256-260).

For Butler, the category of 'woman' achieves its stability and coherence only in the context of the heterosexual matrix in which for bodies to cohere and make sense there must be a stable sex expressed through a stable gender (masculine expresses male, feminine expresses female) that is oppositional and hierarchical through the compulsory practice of heterosexuality (Butler 1999[1990], 208 footnote 6).

The assumption of coherence of bodies requires processes of regulation, where certain behaviours and ways of life are constituted as 'normal' and 'natural' - against which all people are measured (Carabine 1996, 59-60). The concept 'normative violence', or 'violence of norms', refers to violence which takes place in the formation of subjectivities. An attempt to denaturalise gender aims to make this violence visible (Butler 1999 [1990], xx-xxii; Chambers and Carver 2008, 78, 81).

I use the concept normative heterosexuality to refer to the norms that govern heterosexuality and regulations that control heterosexual practices. For example roles between men and women in the public, and in the private sphere. This means that there are heterosexual practices that are non-normative and "queer" or odd

(Richardson 1996, 2-9). However, instead of insisting a binary between normativity and non-normativity, I understand normativity as a gliding scale, and a product of continuous negotiation of norms that take place in various locations, and historical moments (See e.g. Bhaiya and Wieringa 2007; and Wieringa, Katjasungkana and Hidayana 2007).

To be able to locate the representations of normativity, I use the concept of feminist close reading. By close reading I refer to what Sara Ahmed has also called as reading which works against, rather than through, a text's own construction of itself (how the text 'asks to be read')..The disobedient reader...is a reader who interrupts the text with questions that demand a re-thinking of how it works, of how and why it works as it does, and for whom (Ahmed 1998, 17).

Critical reading can involve simple tactics of hesitating and pausing. It does not mean that critical reading assumes a 'meaning' or 'truth' that can be uncovered. Rather, the aim of the reading is to make judgment on how those texts constitute their objects. (Ahmed 1998, 14, 19-20). Concepts such close reading make the reader to focus on the details which open up possibilities to interpret against the conventional meanings.

The concept of intertextuality as a way of reading offers the possibility of seeing the reading as a process where textual relations are formed and discovered. Text is a link in a chain of texts, reacting to, drawing in, and transforming other texts.

Texts cannot be separated from the larger cultural or social textuality out of which they are constructed. All texts, therefore, contain within them the ideological structures and struggles expressed in society through discourses (Allen 2000, 36).

Teach yourself – Taking Part in World Politics since 1938

Teach yourself -books is a UK based book series under the category of "self-help" books. The first *teach yourself* - book was published in 1938 in Britain and the titles produced around the Second World War reflected the nation in war with the aim to "help the British nation survive" in their everyday lives, producing titles focusing on pig and poultry keeping. Other titles were also dedicated to more directly towards the "war effort" and increasing citizen's knowledge of flying, air navigation, and trigonometry (www.teachyourself.co.uk). Thus, the link between the "teach yourself" series and the world politics is closer than one could have guessed. According to the publisher's website, over the last sixty years, more than forty million people have learned about over 750 subject areas. Currently advertised books include over 500 titles arranged under fourteen different categories, such as language, buying home abroad, business & careers, health & well-being, history and politics and creative arts. The changes in topics illustrates interestingly the imagined typical reader, and the needs of "self-improvement".

The history of Indonesian language materials within the book series is relatively long one. While preparing the first version of this paper in 2007, I managed to get hold of at least two different earlier versions of the teach yourself, one from 1965, and another from late 1980s. The dialogue based learning seems to be a more recent pedagogical tool, whereas the 1965 version introduces vocabulary and grammar through short texts and examples.

Introductions: Unit 1 "Welcome to Indonesia (at the airport)"³

- Mr. Anton *Excuse me! Are you Mr Knight?*
 Mr. Knight *Yes, that's correct.*
 Mr. Anton *Welcome to Jakarta. We are from the CITRA company. Pleased to meet you. I'm Anton and this is Mr Bambang.*
 Mr. Bambang *Pleased to meet you.*
 Mr. Knight: *Pleased to meet you too.*

The units of the "teach yourself Indonesian" are divided into two dialogues (dialogue A and dialogue B). Both of the dialogues in the first unit take place at the Sukarno-Hatta airport, where two main male characters arriving from the English speaking world are introduced. The dialogue A introduces Ken Knight, a businessman from New Zealand with an Indonesian wife and a son and a daughter. The dialogue B, on the other hand, introduces Mark Spencer, a student from Leeds/United Kingdom who has flown to Indonesia to meet his e-pal, Reza, for the first time. Ken Knight is an expatriate⁴ living in Jakarta. Being an 'expatriate' locates Ken Knight to certain (geographical and social) locations in Jakarta. How to track down the expectations of the expatriate life style? Internet provides various resources to find out the possibilities for living as expatriate in certain occupations, in certain countries and websites offer practical information about housing, hiring staff for your household and living in your new hometown.⁵ Similarly, Mark, gets located in social spaces reserved for the young university educated generation in Jakarta.⁶

Through the experiences of Ken and Mark, the book constructs a picture of *bule* which literally means "white person" but is generally used for non-Indonesians. Many expatriates find the term offensive. What is remarkable however, based on Fecther's study in Jakarta, white expatriates refuse to recognise their status as a 'race', and discourses on "being *bule*" persist the notion of whiteness as a racial norm. Focusing on the offensiveness of the naming, attention is rarely drawn into the processes of maintaining dominant power positions (e.g. economic and social) (Fechter 2005, 89, 96-97, 101).

In what contexts do Ken Knight and Mark Spenser do business and study? The two Indonesian colleagues of Ken Knight work for CITRA (in English image) company. So what business is Ken Knight doing? The statistics of the Indonesian govern-

ment might be helpful in contextualizing the matter. According to the statistics of the Ministry for Manpower and Transmigration, in 2008 most of the expatriate workers were involved in industry, trade and mining and large proportion in unspecified sectors. 70 percents of the expatriate workers are from Asia (22 % from ASEAN countries, 50% from other Asian countries). Largest expatriate group was Japanese (15%), although citizens of South Korea, the US, Australia, United Kingdom, India and China were all between 7-9 % of the total. Mark Spencer, on the other hand, visits his friend Reza, who is a student at the University of Indonesia in computer science.

The “learner” of Indonesian is primarily represented as someone who comes to Indonesia for professional and family reasons, or to continue a friendship. Ken Knight represents the business community that has been actively invited, especially during the New Order period and reformation period, to “boost” the Indonesian economy. Mark Spencer, as the e-pal of Reza, represents the 21st century’s young generation that has access to the world through internet and travelling.

Both protagonists repeat the idea of white middle-class male independence. Their activeness is reinforced on the cover pages of the book which promise “be[ing] where you want to be with teach yourself” and it locates the book very close to independent traveller books (such as Lonely planet) or the colonial travel writing where the idea of the independent global traveller is maintained and ideas about rational, dynamic, masculine and modern are repeated.

What caught my attention after repeating the units for several time was, that remarkably, the narrator/instructor on the CD, is the only non-Indonesian female character in the material that I could be identifying myself with, yet she was native English speaker. Her role was crucial to bind the units and materials together, to keep the listener/learner interest in the materials using positive encouragement. She is the one, teacher, who instructs the listener to repeat, and complete the exercises of each unit.⁷

The Imagined Indonesia

Indonesian language has a fascinating history and is often described as a product of independence movement and nationalism from early 20th century, developed from modern Malay. As Benedict Anderson points it out, ‘Indonesia’ as idea of a unified nation is a twentieth-century invention, as most of today’s Indonesia was only conquered by the Dutch between 1850 and 1910, and the emphasis of ‘newness’ of the language (vs. Malay) is part of the process shaping the Indonesian’s nationalist consciousness (Anderson 1990, 124; 1991 [1983], 11). Anderson’s point of ‘imagined community’, referring to an active process of performing the idea of ‘Indonesia’ is useful for reading the *teach yourself Indonesian*.

The 1965 version of the teach year self Indonesian narrates the history of politics

of language: Malay was used as the *lingua franca* since 15th century of the coastal harbour towns of the archipelago, known as Indonesia today. The arrival of European traders strengthened the use of Malay as the language of commerce, and later during the Dutch rule, Dutch authorities used Malay to make contact with the Indonesian sultans and chieftains (Kwee 1965, xi).

Max Lane (1996 [1984]), the famous translator of Pramoedya Ananta Toer's works, in his translation of the "Buru Quartet" continues, that the use of language was an important indicator of a person's social cast during the colonial period. Dutch was the language of the governing caste and local languages, such as Javanese, the language of the common people. Malay was the language of interracial, or rather intercaste communication (as many elite could speak Dutch), as well as the language of many Eurasians. In situations where the social caste order needed to be emphasized, Natives were forbidden to use Dutch. (Lane 1996 [1984], 9).

The use of Malay was encouraged by the Dutch and the Dutch-sponsored village schools established in the early 1900's taught in Malay. Only in 1930s, when the Indonesian nationalism started increasing its political significance⁸, the colonial government change the main medium of village primary instruction to local languages. Later on, when different regions in Indonesia (such as East Timor, Aceh and Papua) have struggled for their independence, the role and uniqueness of local languages have gained new political importance in differentiating the areas from rest of Indonesia.

Whereas the 1965 version of the *teach yourself Indonesian* has an introductory chapter explaining the history of the bahasa Indonesia, the 2003 edition does not refer to that history, nor to any other language spoken in the archipelago. The book takes part in the nation-building effort with the idea of "unified" Indonesia in which language plays an important role.

The focus of the book is on the urban Jakarta, and the notions of 'diversity' of the Indonesian archipelago is portrayed only through illustrations of ethnic dresses, visit to the Taman Mini Indonesia Indah (Unit 6: Tourist Information). Where as Jakarta is introduced as the place for studying and doing business, Bali is introduced as a tourist destination, fully in line with the Indonesian government's longstanding focus on Bali as the sources of national culture, but importantly as economic development through tourism (Vickers 1996[1989], 175).

Bali stands out as the "natural" destination for anyone visiting Indonesia in different versions of the "*teach yourself Indonesian*". Where as the 2003 version illustrates the intensified tourist industry of packet tours, the 1965 version starts with the following dialogue:

- Where does the sculptor live?
- Over there
- Is it a long way off?

- No, it is near by
- Would you show me the way?
- All right

This dialogue, remarkably, points towards the older history of tourism in Bali, the period between the world wars, when Bali, and especially Ubud, became the images of culture and art for foreign tourists, especially focusing on local artists and their paintings and sculpture, e.g. work of I Gusti Nyoman Lampad. Bali was, for many Europeans, their escape from the war but also from tightening morals against homosexuals. The period around 1920s and 1930s, due to long-term residents such as Walter Spies in Ubud, attracted many upper-class tourists in search of art and eroticism. Vickers points out however, that this erotic and magical side of Bali was dropped effectively by Indonesian tourism planning authorities by using Puritanism and anti-colonialism as their ways to recreate Bali (Vickers 1996[1989], 141, 105-106, 194). Different versions of “*teach yourself Indonesian*” seem to take part in creating Bali, and it will be interesting to see how the future editions of the book will reflect the later history of Bali: bombings, and opposition to and impacts of the newly approved law on pornography.

Where are Indonesian Men and Women?

- *Marking the Boundaries of Nation and Constructing Ideal Indonesian Citizenship*

In this section, I will provide examples of how the ideal pictures of Indonesians are portrayed in the dialogues. The book does not portray just one picture, but rather, portrays two different pictures: one of the older, already settled, generation (dialogue As), and the younger generation of a female university student who connects with her grandmother living in a kampung in Jakarta (dialogue B).

Following the A dialogues, early on, Anton and Bambang, Ken’s two Indonesian colleagues are introduced. The main aim of the chapter 3 is to learn how to describe your marital status when introducing yourself to new people. The dialogue confirms the heterosexual norm of being or planning to get married. Several other dialogues directly orient the reader towards normalized heterosexual relationships, and normalized ‘family time and space’: family and home, time before marriage, and time after the marriage. Women are specifically positioned as holding the reproductive role taking care of the household, children and the husband as wives.

For example, in the unit titled “Family and Home” Ken has a discussion with his Indonesian colleague Anton about their wives and children. The role of the wife as a mother plays an important role in strengthening their roles as men, proper citizens.

Unit 5: Family and Home

Ken and Anton take the opportunity to get to know each other a little better

during a coffee break in the company canteen.

Ken *You're already married, aren't you.*

Anton *Yes, my wife is from Padang. We have three children. The first one is a boy (who is still (at) elementary school. The second ones are twin girls. They are very, very cute.*

Ken *How old are they?*

Anton *Ten years and seven years old. And you, how many children do you have?*

Ken *I have two children. The first born is a girl and the youngest is a boy.*

Anton *Does your wife work?*

Ken *No. She used to be a secretary but now she's just a housewife. (She) looks after (her) children and husband. She is a good wife. Does your wife work?*

Anton *She is an English teacher but we have a housemaid to look after the children.*

Ken *That's good. My wife and children will arrive next week from New Zealand. They want to see their grandfather, grandmother and cousins.*

Anton *Does their grandfather still work?*

Ken *He was a senior lecturer at Padjadjaran University, but now he is retired. My wife has a big family. She has two brothers and two sisters. They are all married.*

Anton *Please don't forget to introduce them (to me) if they come to Jakarta. I will invite them for dinner.*

Ken *Sure. Thank you.*

The book locates women into their well defined places, into heterosexual relationships with men (as wives, daughters, grandmothers or e-pal's) the referent object being the male actor. The role of the mother plays an important role in strengthening their roles as men as breadwinners of the family.

Scholars who have focused on the constructs of the family through the official state discourse argue that the 'family' as father, mother, and two children, inhabits the modern official spaces where the ideal Indonesian citizenship is built (Shiraishi 2000 [1997], 164). The gender ideology of the New Order period is described as 'state ideology of motherhood (Djajadiningrat-Nieuwenhuis 1987; Suryakusuma 1996), which focused on 'Five Duties of Women'. The hierarchical order of these duties illustrates the importance of marriage and giving birth to children as a qualification for a membership of society. Women are generally not considered as adults until they have married (Graham 2001, 13; see also Wieringa 1992, 110.). Krishna Sen (1998) has argued that in the early 1990s there was a shift from women as 'wife and womb' into women as reproductive workers (Sen 1998, 45).

The strong emphasis on motherhood, however, also includes emphasis on having housemaids, which Arlene Hoschild has called as the nanny chain, "a series of personal links between people across the globe based on the paid or unpaid work of caring" – and crossing the social and economic classes within one society. A global care chain might start in a poor country and end in a rich one, or it might link rural

and urban areas within the same poor country. More complex versions start in one poor country and extend to another slightly less poor country and then link to a rich country. In Indonesia, women take up all different roles in the global care chain. For example, there is a growing number of women working in Malaysia and Middle East (especially in Saudi Arabia) as domestic workers (See e.g. Hugo 2002, 158-164), and women's activists have attempted to raise concern of their protection, due to reports of violence and sexual harassment against women (see e.g. Work of Solidaritas Perempuan).

This unit also points towards a certain socio-economical status of the families which is rather clear from the topics of conversation: housemaids and university education. The focus of the discussions is what males do and think, however, the listening exercises also include female characters applying for jobs and travelling abroad.

Dialogue B

Although the material seems to portray a strong context of family life, there are alternate narratives to it too. Both Mark and Reza remain "just" friends throughout the units. In several dialogues, Reza's neighbour, friends and family, assume that Mark is her boyfriend, which she decisively denies. In general, sexuality of women, has been used to mark boundaries of nations (See e.g. Anthias and Yuval-Davis 1989 and Yuval-Davis 1997). Some scholars argue that in the Indonesian context, the binary positioning of women divides them into good and bad, the model and the maniac. The model referring to women who are able to control their desire and passion and wait for marriage, and the maniac referring to women who speak out loud and show sexual passion.

The fear of "loose women" is still present in Indonesia, where female citizens are expected to fulfil their roles as mothers within the heterosexual framework (Wieringa, Katjasungkana, Hidayana 2007). The idea of compulsory marriage is underlined in the "teach yourself Indonesian", which advises to use the term "not married yet" or "bukan" even if one might not be planning to get married at all. This cultural expression is introduced early on when Ken asks his colleague Bambang if he is married, and gets a short response "not yet" or "bukan". What is interesting here is that this is the only conversation that Ken has with Bambang. Bambang disappears after this chapter whereas the heteronormative performances continue in other chapters between Ken and Anton and later with Ken and his family.

As argued by several postcolonialist feminists, portrayals of harmonious families are necessary for state's ability to constitute and imagine itself, thus women's appropriate sexual behavior becomes an important part of the state discourse (Alexander 1997, Kandiyoti 1993). Women's sexuality, or "sexual agency and autonomy" challenge the image of the nuclear family, the ideological anchor and source of legitimacy for the state.

Presence in Absence

Several themes appear strikingly absent from the "teach yourself Indonesian" units. It seems that the learning of Indonesian can continue without disruptions through lives of Ken and Mark without having to worry, or even reflect upon events like the economic crisis, student movement protests, anti-Chinese riots leading to rapes and killings, or the years of reformasi that followed after the fall of Suharto's regime. For example, listening the learning unit (Unit 4 "Working and Studying", dialogue B) where Mark visits Reza's campus, I cannot but think about the year 1998 after having read Komnas Perempuan's lengthy reports and survivors' narrations of the violence that took place. May 1998 has remained one of the stories of my own family, as it was exactly around the time of the student killings, when my father's business visit to Jakarta and Pekanbaru included worried phone calls back home, sharing information of the escalation of violence and killing of four students on May the 12th, and finally, leading to his evacuation to Singapore.

Remarkably, the different revisions of the *teach yourself Indonesian* book have coincided major political changes in Indonesia: independence in 1949, military coup in 1965, economic crisis and fall of 30 years regime of President Suharto in 1998. However, the sociological, economical or political context of the Indonesian archipelago is not discussed at all in the edition 2003.

Furthermore, family and public life appears as secular, as none of the characters seem to be practicing any of the officially acknowledged religions in Indonesia. The characters also live their everyday lives without having contact to government bureaucracies and other state authorities, such as police or military, are absent from the pages of the book. Several units, however, point directly to the ongoing political debates on women's rights for citizenship and sexuality – the boundaries of nation and citizenship, when read carefully. In Unit 7 "Invitations" Anton invites Ken and his family to his house for dinner. While discussing the food, Anton asks "do your children feel home at here?" At the time of publishing the book, a child born to an Indonesian mother married to a foreigner could not get citizenship of Indonesia and woman would also lose her citizenship if she decided to take the citizenship of her husband. This would require visits to the local immigration office once a month to extend the children's, and husband's visa, if they would prefer staying longer than the two months given for social and cultural visits. So the question of children feeling at home, points to the direction of feeling home without the citizenship rights of one's "home" – or rather, making the point that the home is not in Indonesia. The law on citizenship was changed in 2006, and now allows children to have dual citizenships.

Conclusions

In this paper I have attempted to provide one attempt to close read the *teach*

yourself Indonesian language book, and by no means have given justice to the whole book, or its narratives of 'Indonesia'. Based on my reading, the learning units in the book construct a portrait of wealthy, healthy, modern, secular and urban world where Ken, Anton, Bambang, Mark and Reza interact. This construction not only repeats the idea of modernized and unified Indonesian citizens, but also the picture of white male globetrotters.

'Indonesia' gets constructed as a united country, where being modern, middle-class (see the discussions about family and occupations in chapter 5) and urban Jakartan is normalised. Other parts of the country appear as the exotic and traditional Other. This is supported by the book's illustrations of men and women in traditional costumes and traditional occupations (such as farmer, fisherman) whenever other parts of the country are referred in the text. Thus, to gain its dominant position as modern nation, or modern citizen, illustrations of the "Other" are offered: short visits to Reza's grandmother in the kampung of Jakarta and tourist visit to Bali, and narratives of "not yet married" population.

The two dialogues in each of the learning units, also provide interesting view to two different generations: the already settle one cherishing traditional family values, and the younger one, enjoying the fruits of the modern nation: university education and economic stability, not necessarily however, reflecting the realities of most Indonesians. This picture remains in the realities of university educated, urban middle class - the sphere where the foreigner learning Indonesian is hoped to mingle in. Strangely enough, my family's story repeats the dialogues A & B. Whereas my father visited Indonesia due to forestry business related reasons, I arrived to learn Indonesian with the aim to pursue my PhD studies on gender policies in post-tsunami Aceh and interact with the university educated NGO activists, drawing attention to the "forgotten" histories of global trade and politics in Indonesia - including the environmental problems of the heavy deforestation - an added learning unit to be discussed with my family once back in Europe?

In Jakarta, 22 November 2008

Endnotes

¹ Marjaana Jauhola is currently preparing her PhD thesis on the negotiation of gender norms in gender mainstreaming initiatives in Nanggroe Aceh Darussalam. The author wishes to acknowledge support of the European Community under the Marie Curie Early Stage Research Training Programme and Academy of Finland project Gendered Agency in Conflict. Earlier version of this paper was presented at the Conference 'Reading: Images, Texts, Artefacts', Cardiff University 28-29 June 2007.

² Linguistic turn is also often referred as postmodern/poststructural turn.

- ³ The English translations of the dialogues are original translations from the 2003 edition of the language course. Through out the course/book, both Indonesian and English versions of the dialogues exist one after another.
- ⁴ According to the Mac OS X Oxford American Dictionary, 'expatriate' is a person that lives outside of their native country (American expatriates in London) or archaic meaning, a person that is exiled from their native country.
- ⁵ To get ideas of what the expected expatriate life styles are, see websites Living in Indonesia, Expatriate.com, and @llo' Expat.
- ⁶ Tertiary enrolment was 17 per cent in 2006 (Unesco Statistics Institute 2008).
- ⁷ My other experiences of learning bahasa Indonesia took place in two different language schools in Jakarta and Yogyakarta and formed rather different experiences of what is the assumed role of the female foreigner learning Indonesian language. The first one in Jakarta in 2006, due to two other housewives of their expatriate men, focused heavily to build up vocabulary of "domestic sphere" and how to deal with domestic help. The second one in Yogyakarta in 2007 was tailor-made for my learning needs as a "PhD student in International Relations" and focused on general socio-political and economic topics, but also on issues such as student movement, New Order regime and fall of Suharto, reformation and current political affairs.
- ⁸ "We speak one language: the Indonesian language" was declared the youth conference held in 1928 (Kwee 1965). Later in 1938 a conference on the forming of the Indonesian language was held and it was decided that the modern Malay would be the basis of Indonesian language (Kwee 1965)

Bibliography

- Ahmed, Sara. 1998. *Difference that Matter: Feminist Theory and Postmodernism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ahmed, Sara. 2006. *Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others*. London: Duke University Press.
- Alexander, M. Jacqui. 1997. "Erotic Autonomy as a Politics of Decolonialization: An Anatomy of Feminist and State Practice in the Bahamas Tourist Economy." In *Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures*, eds. M. Jacqui Alexander and Chandra Talpade Mohanty. London: Routledge, 63-100.
- Alexander, M. Jacqui and Chandra Talpade Mohanty. 1997. "Introduction. Genealogies, Legacies, Movements." In *Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures*, eds. M. Jacqui Alexander and Chandra Talpade Mohanty. London: Routledge, xiii-xlii.
- Allen, Graham. 2000. *Intertextuality*. London: Routledge.
- Anderson, Benedict R. O'G. 1990. *Language and Power: Exploring Political Cultures*

- in Indonesia. London: Cornell University Press.
- Anderson, Benedict. 1991 [1983]. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Anthias, Floya and Nira Yuval-Davis (eds.) 1989. "Woman-Nation-State". London: Macmillan Press.
- Bhaiya, Abha and Saskia E. Wieringa. 2007. "Manual on Sexual Rights and Sexual Empowerment." Jagori, APIK and Kartini Network.
- Butler, Judith. 1999 [1990]. *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Butler, Judith. 2004. *Undoing Gender*. Oxfordshire: Routledge.
- Butler, Judith and Joan W. Scott 1992. "NAME OF THEIR INTRO" In *Feminist Theorize the Political*, eds. Judith Butler and Joan W. Scott. London: Routledge, 3-21.
- Byrnes, Christopher and Eva Nyimas. 2003. "Teach yourself Indonesian." London: Hodder Headline.
- Carabine, Jean. 1996. "Heterosexuality and social policy." In *Theorising Heterosexuality*, ed. Diane Richardson. Buckingham: Open University Press, 55-74.
- Chambers, Samuel A. and Terrell Carver. 2008. *Judith Butler and Political Theory: Troubling Politics*. Oxon: Routledge.
- Der Derian, James. 1989. "The Boundaries of Knowledge and Power in International Relations." In *International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics*, eds. James Der Derian and Michael J. Shapiro. New York: Lexington Books, 3-9.
- Djajadiningrat-Nieuwenhuis, Madelon. 1992 [1987]. "Ibuisism and priyayization: Path to power?" In *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions*, eds. Elsbeth Locher-Scholten and Anke Niehof. Leiden: KITLV Press, 43-51.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2001. "Gender and Pluralism in Indonesia." In *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*, ed. Robert W. Hefner. Honolulu: University of Hawai'i Press, 253-267.
- Expatriates.com. Indonesia Community. <http://www.expatriates.com/classifieds/ind> (Accessed in November 2008)
- Fechter, Anne-Meike. 2005. "The 'Other' Stares Back: Experiencing whiteness in Jakarta." *Ethnography* 6(1):87-103.
- Foucault, Michel. 1991. "Politics and the study of discourse." In *The Foucault Effect: Studies in Governmentality with Two Lectures by and an Interview with Michel Foucault*, eds. Graham Burchell, Colin Gordon and Peter Miller, 53-72.
- Graham, Sharyn. 2001. "Negotiating Gender: Calalai' in Bugis Society." *Intersections*(6, August 2001):1-38.
- Gregory, Donna U. 1989. "Foreword." In *International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics*, eds. James Der Derian and Michael J.

- Shapiro. New York: Lexington Books, xiii-xxi.
- Grewal, Inderpal and Caren Kaplan. 1994. "Introduction: Transnational Feminist Practice and Questions of Postmodernity." In *Scattered Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist Practices*, eds. Inderpal Grewal and Caren Kaplan. London: University of Minnesota Press, 1-33.
- Hansen, Lene. 2006. *Security as Practice. Discourse Analysis and the Bosnian War*. Oxon: Routledge.
- Hochschild, Arlie. 2000. "The Nanny Chain." *The American Prospect* 11(4):<http://www.prospect.org/print-friendly/print/V11/14/hochschild-a.html>.
- Hugo, Graeme. 2002. "Women's International Labour Migration." In *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*, eds. Kathryn Robinson and Sharon Bessel. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 158-178.
- Jackson, Alecia Youngblood. 2004. "Performativity Identified." *Qualitative Inquiry* 10(5):673-690.
- Jamil, Asriati and Amany Lubis. 2003. "Seks dan Gender." In *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah and McGill Project/IISEP, 53-84.
- Kandiyoti, Deniz. 1993. "Identity and Its Discontents: Women and the Nation." In *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. A Reader*, eds. Patrick Williams and Laura Chrisman. London: Harvester Wheatsheaf, 376-391.
- Kwee, John B. 1965. *Teach Yourself Indonesian* London: The English Universities Press Ltd.
- Lane, Max. 1996 [1984]. "Introduction." In *Child of All Nations* by Pramoedya Ananta Toer. New York: Penguin Books, 7-11.
- Living in Indonesia. A Site for Expatriates.<http://www.expatriates.or.id/> (Accessed in November 2008)
- Marching, Soe Tjen 2004. "Sexual Transgression in the Autobiographies of Two Indonesian Women." *Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*(10):<http://www.she.murdoch.edu.au/intersections/issue10/marching.html>.
- Reid, Anthony. 2005. *An Indonesian Frontier: Achenese & Other Histories of Sumatra*. Singapore: Singapore University Press.
- Richardson, Diane. 1996. "Heterosexuality and social theory." In *Theorising Heterosexuality*, ed. Diane Richardson. Buckingham: Open University Press, 1-20.
- Rinaldo, Rachel. 2006. "Contesting Womanhood in Two Indonesian Islamic Organizations." *Antropologi Indonesia* 30(1):21-35.
- Sen, Krishna. 1998. "Indonesian women at Work: Reframing the subject." In *Gender and Power in Affluent Asia*, eds. Krishna Sen and Maila Stevens, 35-62.
- Shiraishi, Saya S. 2000 [1997]. *Young Heroes: The Indonesian Family in Politics*. Ithaca: Cornell University, Southeast Asia Program.

- Suryakusuma, Julia I. 1996. "The State and Sexuality in New Order Indonesia." In *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, ed. Laurie J. Sears. London: Duke University Press, 92-119.
- Teach Yourself. <http://www.teachyourself.co.uk/>." (accessed in November 2008)
- Tiwon, Sylvia. 1996. "Models and Maniacs: Articulating the Female in Indonesia." In *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, ed. Laurie J. Sears. London: Duke University Press, 47-70.
- Unesco Institute for Statistics. 2008. *UIS Statistics in Brief. Education in Indonesia*. <http://www.uis.unesco.org> (Accessed in November 2008).
- Vickers, Adrian. 1996 [1989]. *Bali - A Paradise Created*. Singapore: Periplus Editions.
- Wieringa, Saskia E. 1992. "Ibu or the Beast: Gender Interests in Two Indonesian Women's Organisations." *Feminist Review* 41(Summer 1992):98-113.
- Wieringa, Saskia E. 2003. "The Birth of the New Order State in Indonesia. Sexual Politics and Nationalism." *Journal of Women's History* 15(1):70-91.
- Wieringa, Saskia E., Nursyahbani Katjasungkana and Irwan M. Hidayana. 2007. "Pengantar: Heteronormativitas dan pemberdayaan seksual [Introduction: Heteronormativity and Sexual Empowerment]." In *Membongkar Seksualitas Perempuan Yang Terbungkam*, eds. Saskia E. Wieringa, Nursyahbani Katjasungkana and Irwan M. Hidayana. Jakarta: Kartini Network, xi-xxxii.
- Yuval-Davis, Nira. 1997. *Gender & Nation*. London: SAGE Publications.
- @llo' Expat Indonesia. http://www.alloexpat.com/indonesia_expats_forum/ (Accessed in November 2008)

Relasi Antara Tingkat Konflik di Dunia Islam dengan Setting Geografi Politik (Studi Kasus Konflik di Kawasan Timur Tengah)

Abstract

The main problem in the Muslim world is a conflict among the Islamic community, and other community involvement in the problem. Middle East as a region that represents a typical Islamic region have these problems, nearly a century of conflict in the Middle East experiencing extreme dynamics. This research is a type of qualitative research, and data collection techniques based on secondary data. To test the validity of data-used method Triangle Truth. Categorize the conflict, the author uses three levels of conflict; debate, games and wars. By using this category, the conflict in the Middle East shows a variety of symptoms. Conflicts based on religion and the sacred and strategic giving a large space for the birth of the conflict in the wars.

Surwandono

Staf Pengajar FISIPOL Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

Latar Belakang Masalah

Dunia Islam merupakan area atau wilayah yang sangat luas dan memiliki potensi yang paling beragam dibandingkan dengan aktor lain dalam hubungan internasional. Secara konseptual dunia Islam merujuk kepada kondisi demografis suatu wilayah di mana terdapat sejumlah entitas Islam yang memiliki identitas khas yang tinggal dalam negara tertentu. Apalagi kalau dipergunakan batasan yang lebih klasik yang merujuk dunia Islam sebagai dar al-Islam maka semua wilayah di mana terdapat penduduk yang memeluk agama Islam sebagai aqidahnya, maka semua wilayah tersebut merupakan dar al-Islam. Berseiring dengan tumbuhnya nation-state di dunia Islam pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani, maka diperkenalkan dua klasifikasi besar untuk memetakan dunia Islam.

Pertama, *Islamic state*, suatu istilah yang merujuk

konsep dunia Islam dari sisi representasi Islam tidak hanya dalam dataran demografis saja, akan tetapi sampai dalam dataran kelembagaan formal dengan diapresiasi Islam sebagai *rule of game* dalam negara. Kedua, *Moslem state*, suatu istilah yang merujuk konsep dunia Islam yang dilihat dari representasi demografisnya, dan tidak harus tercerminkan dalam representasi kelembagaan formal kenegaraan.

Hal yang cukup menarik dalam mengkaji dunia Islam khususnya di Timur Tengah adalah fenomena konflik yang sangat menahun. Paling tidak hampir setengah abad ini konflik di Timur Tengah senantiasa hadir. Baik konflik antara negara seperti Irak-Kuwait, Irak-Arab Saudi, Iran-Afganistan, Mesir-Sudan, Arab- Israel yang variannya menjadi sangat banyak, seperti Palestina-Israel, Jordania-Israel, Suriah-Israel dan yang lainnya.

Kehadiran konflik yang sangat menahun ini kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan besar (*great power*) seperti AS dan Uni Soviet ketika itu untuk saling berebut pengaruh. Bahkan runtuhnya Uni Soviet dalam batas tertentu kemudian tergantikan oleh RRC yang sebelumnya telah menjadi major power di kawasan Asia Timur, Asia-Selatan dan Asia Tenggara untuk mengembangkan pengaruhnya di Timur Tengah. Suplai sejumlah senjata dan transfer teknologi ke negara Timur Tengah oleh RRC cukup membuktikan bahwa dalam 1 dekade ke depan, Timur Tengah masih menjadi potret buram konflik di dunia.

Posisi geografis Timur Tengah yang sangat strategis yang menghubungkan dunia bagian Timur dan Barat selama ini diklaim sebagai pusat utama konflik. Teori besar yang dibuat oleh Karl Haushoffer dan Mc Kinder yang menempatkan wilayah ini sebagai "*heart-land*" (daerah jantung) menjadikan pusaran konflik dalam Perang dunia I berpusat di Eropa dan mengimbas ke Timur Tengah. Siapa menguasai Timur Tengah, maka ialah yang akan menguasai dunia.

Dalam dekade berikutnya alasan konflik kemudian bergeser kepada persoalan konflik sumber daya, dalam hal ini alam, terutama minyak. Suplai pasokan minyak dunia dalam dekade 1970-an sangat tergantung kepada minyak di Timur Tengah. Di mana pada saat bersamaan bermunculannya paradigma "pembangunanisme" yang paralel dengan industrialisasi sangat membutuhkan energi minyak. Maka tampak sekali kekuatan dari luar (*intrusive state*) (John Spanier, 1994) melakukan penetrasi yang mengakibatkan negara-negara di Timur Tengah saling berkonflik. Dalam konteks ini AS merestui berdirinya Israel sebagai negara yang bisa memberikan jaminan kepentingan AS di Timur Tengah bisa terjaga, Israel yang memang menjadi variabel antara bagi eskalasi konflik memungkinkan AS bisa memiliki alasan yang kuat untuk menjadi hegemon di Timur Tengah agar konflik berkurang.

Namun fakta sampai sekarang konflik di Timur Tengah masih terbuka dengan menganga. Apalagi di Timur Tengah ditenggarai oleh kekuatan Barat dalam hal ini AS dan Inggris yang menyatakan terdapat *triple alliance* yakni Iraq, Afghanistan, sebagai poros setan, yang kemudian dikembangkan ke negara radikal lainnya seperti

Sudan dan Iran. Timur Tengah sebagai ladang gerakan fundamentalis dianggap sebagai penyebab utama mengapa konflik di Timur tengah masih hadir.

Namun terdapat kondisi obyektif yang belum banyak dibahas tentang relasi konflik dengan setting geo-politik di Timur Tengah. Hal ini menarik untuk dikaji sehingga bisa diukur sejauh mana kontribusi setting geografi politik terhadap intensitas konflik. Dengan diketahui *degree* relasinya diharapkan akan memiliki kontribusi yang positif untuk mendesain geografi politik menjadi setting yang kondusif bagi perdamaian. Sehingga wilayah yang memiliki potensi yang sangat beragam ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemakmuran dan perdamaian di dunia.

2. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah relasi setting geografi politik di Timur tengah dengan intensitas dan kualitas konflik yang terjadi ?

3. Kajian Pustaka

Kajian tentang geografi politik sudah banyak dilakukan oleh para ahli. Kajian klasik yang pernah dilakukan oleh Mopntesqieu yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara konflik dengan temperamen politik. Sedangkan temperamen sendiri sangat juga dipengaruhi oleh lingkungan. Pada daerah yang panas tingkat naluri agresi rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan naluri agresi di daerah yang dingin. (Maurice Duverger, 1995)

Kajian geografi politik kemudian banyak diteliti oleh generasi dari Eropa berikutnya yakni Karl Haushoffer yang terkenal dengan Heart-land theory, yang berasumsi bahwa setiap negara atau masyarakat cenderung akan mencari daerah yang memiliki arti yang sangat strategis. Yang kemudian diistilahkan dengan istilah daerah Jantung. Sehingga terumuskan dalam preposisi, “siapa saja yang menguasai daerah jantung maka ia akan menguasai daerah berikutnya bahkan pada akhirnya dunia. Pandangan ini menjadi sangat monumental bagi elit di Jerman untuk mengembangkan konsep *lebensraum* (teori rung baru). (Drysdale Alaydair, 1989)

Agak berbeda sedikit dengan pandangan Karl Haushoffer, intelektual geografi politik Mc Kinder dari Inggris cenderung menempatkan lingkungan dalam konteks laut. Teori ini kemudian dikenal dengan Rim-land Theory, yang memiliki preposisi bahwa barang siapa bisa membentuk sebuah jaringan antar wilayah dengan menggunakan laut, maka ia akan menguasai dunia. (Drysdale Alaydair, 1989) Sejarah telah mencatat Inggris menjadi negara besar karena kuatnya armada lautnya. Teori ini kemudian juga dikembangkan oleh para elit politik di Uni Soviet ketika itu untuk mencari akses air dalam hal ini laut yang kemudian dikenal Teori Air Hangat. Teori ini cukup memberikan kontribusi yang signifikan bagi lahirnya konflik di Asia Tenggara khususnya di kawasan Indo-Cina dan di kawasan Eropa Timur khususnya di kawasan Baltik.

Seorang Roger Geraudy melakukan studi yang kaitannya dengan geografi politik untuk mengukur proses pendudukan Israel terhadap Palestina. Theodore Herzl, aktivis zionisme mampu melakukan strategi kolonialisme klasik dan demografis di kawasan Timur Tengah khususnya Palestina dengan memanfaatkan situs keagamaan yang diramu dengan idiom-idiom politik, sehingga Zionisme yang sebelumnya berbasis keagamaan menjadi Zionisme yang berbasis politik. (Roger Geraudy, 1994) Pemanfaatan setting geografis, bukit Zion ini mampu memanipulasi sentimen politik, yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang positif bagi peledakan konflik di Timur Tengah.

Kajian yang mengulas tentang hubungan konflik dan geografis juga telah dilakukan oleh Drysdale yang menyatakan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara peta geografis yang artifisial (buatan) dengan konflik yang terjadi. (Drysdale Alaydair, 1989) Garis-garis berbatasan yang tumpang tindih menjadikan terdapatnya irisan-irisan politik dalam masyarakat yang tidak mesti kongruen. Inilah yang kemudian menyebabkan tinggi konflik berkepanjangan di beberapa negara bekas jajahan karena banyaknya perbatasan artifisial yang menabrak garis-garis komunitas masyarakat.

Kajian ini kemudian diperkaya dengan analisis Wolter S Jones yang menyebutn perbatasan artifisial ini melahirkan masalah dalam proses integrasi atau yang dikenal dengan gejala separatisme dan irredentisme. Jika separatisme lebih sebagai upaya pemisahan satu kelompok masyarakat minoritas yang dipaksa terintegrasikan karena persoalan perbatasan artifisial dari kelompok yang besar karena terdapatnya heterogenitas ras dan kepentingan. Sedangkan jika gejala Irredentisme adalah gejala penggabungan suatu kelompok minoritas yang pasca penjajahan dipaksa bergabung dengan kelompok yang lebih besar tapi berbeda ras dan kepentingan untuk bergabung dengan komunitasnya sendiri. (Wolter S Jones, 1997)

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengidentifikasi variabel penelitian seperti variabel ; setting geografi politik, intensitas konflik dan kualitas konflik.. Dari variabel ini diharapkan akan bisa dihubungkan suatu peta konflik yang lebih transparan sehingga memungkinkan proses penemuan variabel antara yang kondusif bagi perdamaian di Timur Tengah. Penelitian ini didukung oleh literasi kepustakaan yang berkaitan dengan konflik dan sumber-sumber konflik khususnya yang berkaitan dengan geografi politik. Eksplorasi data dilakukan melalui kajian literasi, dan akan diperoleh melalui media pustaka, majalah, koran, jurnal, maupun untuk mendapatkan data *up to date* akan banyak didukung melalui sediaan data yang ada di internet.

HASIL PENELITIAN

Relasi Geografi Politik dengan Konflik di Timur Tengah

Dari pemetaan yang dilakukan, maka akan dianalisis hubungan antara variabel

konflik yang sudah dipaparkan di dalam Bab II dengan tingkat konflik yang sudah dipaparkan. Diharapkan dalam akan bisa didapatkan pola hubungan antara variabel penyebab konflik dengan proses eskalasi konflik, baik dari arah *debates*, *games* sampai ke *wars* ataupun dari *wars*, *games* ke *debates*.

Tabel 1 Tingkat Konflik Kaitannya Dengan Aktor Konflik

TINGKAT KONFLIK	AKTOR KONFLIK
Debates	Berbasis konflik antar negara-masyarakat, antar masyarakat terutama di negara berbasis republik, seperti di Israel, Mesir, Iran
Games	Lebih sering timbul antar Negara, yang dalam posisi memiliki kekuatan yang relatif seimbang, dan tidak memiliki persoalan krusial, seperti konflik Suriah-Irak, Irak Yordania
Wars	Lebih sering terjadi aktor konflik antar negara yang memiliki persoalan substansial yang kemudian dikemas dalam kerangka ideologi, seperti konflik antara Iran-Iraq, Arab-Israel, Kuwait-Iraq, juga terjadi dengan aktor antar masyarakat/etnis yang memiliki orientasi ideologi yang kuat semisal di Iraq, Palestina, Israel

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel 2 Tingkat Konflik Kaitannya Dengan Issue Konflik

TINGKAT KONFLIK	ISSUE KONFLIK
Debates	Berbasis konflik tentang perbatasan, namun pihak yang berkonflik tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk mengajukan gugatan. Seperti konflik antara Arab Saudi dengan Suriah, Suriah dengan Jordania. Berbasis issue keagamaan yang berada di luar area yang mudah dimobilisasi untuk konflik ideologis, ini terjadi di Qatar, Mesir Berbasis issue natural resources yang satu sama lain tidak menganggapnya signifikan, konflik air antara Irak-Suriah.
Games	Berbasis konflik perbatasan, namun pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang relatif seimbang. Seperti konflik yang terjadi Iraq-Iran sebelum pecah perang Berbasis issue keagamaan, terutama di daerah yang sudah dikelola dengan baik, seperti di Lebanon
Wars	Berbasis perbatasan memiliki arti substansial dan didukung kekuatan untuk mendapatkannya, Konflik Mesir-Israel, konflik Iraq-Kuwait. Berbasis ideologi keagamaan, di mana terdapat kelompok-kelompok militan yang satu sama lain sudah saling merasa dipinggirkan, baik oleh negara atau kelompok yang lain. Misal konflik Iran-Iraq. Palestina-Israel, Hams-Israel, Jihad Islam-Israel, Hizbulloh-Israel Berbasis Natural Resources, di mana terdapat sumber alam yang signifikan seperti air dan minyak. Konflik Sudan-Mesir, Iraq-Kuwait, Amerika Serikat -Iraq, Iran-Iraq.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam analisis ini akan dikategorikan tingkat konflik dengan istilah intensif, dinyatakan konflik intensif jika konflik lebih dari 3 kali muncul di wilayah negara di Timur Tengah, dan dinyatakan kurang intensif jika tingkat konflik hanya terjadi kurang dari wilayah negara di Timur Tengah. Sedangkan jika tidak ditemukan hubungan yang jelas maka akan dipergunakan istilah tidak jelas.

A. Hubungan Antara Tekstur Wilayah dengan Konflik

Dari sisi tekstur geografis pantai, terdapat kecenderungan tingkat konflik menunjukkan gejala yang intensif. Hal ini bisa dilihat dinamika konflik dari negara Arab Saudi dengan dinamika konflik pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi) yang kemudian berkembang juga kelompok Ikhwan, kelompok al-Qaeda yang sangat sering terjadi polemik pemikiran. Arab Saudi sebagai negara yang besar juga senantiasa memberikan ruang konflik, sehingga Arab Saudi merasa sangat khawatir terhadap pengaruh pemikiran Syi'ah yang sebenarnya secara wilayah tidak berbatasan langsung.

Yaman, yang langsung berbatasan dengan Arab Saudi dan Oman di sebelah Barat, dan berbatasan dengan laut Merah serta Ethiopia di Afrika memiliki konflik dalam tingkat debate juga sangat tampak, Yaman selatan banyak diwarnai pemikiran Sosialis, sedangkan utara banyak diwarnai pemikiran konservatif sebagaimana Arab Saudi, yang mana pada akhirnya menyebabkan perang etnis, antara kelompok di sebelah Selatan dan Utara.

Mesir sebagai daerah pantai juga sangat intensif dalam dinamika konflik, baik dari sisi pemikiran sampai melibatkan dalam berbagai perang di Arab. Dari sisi pemikiran Mesir merupakan negara yang pernah mempraktekkan berbagai ragam pemikiran, dari berbasis pemikiran keislaman, sosialis, kapitalis bahkan mencampurkan pemikiran tersebut. Mesir juga difahami sebagai gudang lahirnya gerakan pemikiran besar, baik dari sisi keislaman seperti Hasan al-Banna, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Hasan Hanafi, ataupun pemikiran nasionalis gaya Gamal Abdul Nasser. Mesir juga banyak melibatkan diri dalam tingkat konflik games, maupun wars. Mesir bahkan terlibat dalam perang Arab Israel lebih dari 2 di 1956 dan 1967.

Sedangkan di negara berbasis gurun gejala konflik dalam tingkat debates dan wars ada kecenderungan kurang intensif. Hampir tidak ditemukan konflik yang berarti seperti perang langsung secara terbuka, walaupun terjadi perang hanya terlibat dalam perang kolektif dengan Israel yang lebih mengedepankan ikatan emosional Arab saja. Namun jika negara berbasis gurun tersebut memiliki sedikit akses pantai, maka ada kecenderungan negara tersebut akan intensif melakukan konflik. Hal ini bisa dilihat di negara Iraq yang pola konfliknya dalam 3 dekade terakhir terlibat dalam konflik secara konfrontatif, yakni perang teluk I (Iran-Iraq), Perang teluk II (Iraq-Kuwait) dan perang teluk III (Iraq-Amerika Serikat). Negara berbasis gurun cenderung memilih konflik dalam bentuk games, di mana ditandai oleh gejala-gejala konflik untuk senantiasa waspada terhadap segala kemungkinan. Hal ini bisa dilihat dari sisi alokasi anggaran untuk militer, negara berbasis pantai mengalokasikan anggaran lebih dari 7% bahkan sampai 20%, sedangkan negara berbasis gurun rata 5%-7%, yang jika dibandingkan dengan wilayah lain jauh lebih tinggi. (Microsoft Encarta Encyclopedia, 2004)

Tabel 3: Hubungan Tingkat Konflik Dengan Tekstur Geografis

SETTING GEOGRAFIS	TINGKAT KONFLIK		
	DEBATES	GAMES	WARS
1. Tekstur Geografis			
a. Pantai	Intensif	Intensif	Intensif
b. Gurun	Kurang Intensif	Intensif	Kurang Intensif

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

B. Hubungan Antara Iklim dengan Konflik

Sejauh yang diamati dari berbagai sumber faktor iklim belum tampak hubungan yang positif ataupun negatif dalam konteks tingkat konflik. Artinya semakin stabil iklim suatu wilayah tertentu belum tentu berkorelasi dengan semakin stabilnya masyarakat, demikian pula sebaliknya. Arab Saudi, Jordania dan Iraq merupakan wilayah yang memiliki iklim relatif stabil namun dalam batas tertentu negara ini sering terlibat dalam konflik. Namun ini bukan berarti semakin stabil iklim suatu negara, maka negara tersebut akan melakukan konflik.

Tabel 4: Hubungan Tingkat Konflik Dengan Iklim

SETTING GEOGRAFIS	TINGKAT KONFLIK		
	DEBATES	GAMES	WARS
2. Iklim			
a. Tidak Stabil	Tak jelas	Tak Jelas	Tak Jelas
b. Stabil	Tak jelas	Tak Jelas	Tak Jelas

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

C. Hubungan Antara Unsur Demografis dengan Konflik

Dari sisi kepadatan penduduk tampaknya ada gejala yang menarik. Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi ternyata memiliki peluang yang besar untuk mengapresiasi konflik. Kepadatan yang dimaksud disini disamping dilihat dari sisi kuantitas, juga dilihat dari sisi multi kulturalis. Israel dan Palestina merupakan kawasan yang sangat rawan konflik, dan mau tidak mau harus berkonflik karena terkepung oleh lingkaran negara yang tidak ramah dengan Israel ataupun palestina yang setiap saat harus menghadapi peminggiran demografi oleh Israel. Dengan kepadatan yang tinggi Israel harus memperluas wilayah dengan melakukan kebijakan pendudukan dan ekspansi.

Demikian pula, di negara Iraq sebagai negara yang sebagian besar berbasis gurun, maka mau tidak mau pemerintah harus membuka akses bagi warga negara untuk melakukan migrasi di sekitar wilayah Iraq yang memiliki tingkat kemakmuran yang lebih baik. Atau pun Iraq harus siap melakukan kebijakan invasi guna memenuhi kepentingan nasional yang belum bisa terpenuhi. Setidaknya alasan inilah yang mengilhami Saddam Hussein untuk melakukan perang dengan Kuwait. Pemerintah Iraq juga harus bekerja keras agar tetap mendapat suplai air dari sungai Eufrat dan Tigris, yang sumbernya berada di wilayah Turki. Demikian langkah ini juga banyak

ditempuh oleh negara Suriah.

Lebanon merupakan contoh yang menarik, dengan kepadatan yang sangat tinggi karena wilayah ini sangat nyaman dengan iklim yang stabil, sehingga negara ini memiliki etnis yang beragam. Setelah Lebanon diguncang konflik yang sangat mematikan di dekade 1980-an, maka pemerintah kemudian menerapkan pola pengelolaan kekuasaan secara bergulir. Dalam batas tertentu formula ini cukup memberikan pengaruh positif bagi munculnya konflik dalam bentuk wars.

Negara dengan kepadatan yang rendah dalam batas tertentu belum menunjukkan konflik yang berarti, meskipun negara ini berbasis pantai. Negara Qatar, Oman, Bahrain, Emirat Arab merupakan wilayah negara yang jarang sekali terjadi konflik yang monumental.

Tabel 5: Hubungan Tingkat Konflik Dengan Unsur Demografis

SETTING GEOGRAFIS	TINGKAT KONFLIK		
	DEBATES	GAMES	WARS
3. Demografi			
a. Padat	Intensif	Intensif	Intensif
b. Kurang Padat	Kurang Intensif	Kurang Intensif	Kurang Intensif

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

D. Hubungan Antara Unsur Agama dengan Konflik

Tabel 6: Hubungan Tingkat Konflik Dengan Agama

SETTING GEOGRAFIS	TINGKAT KONFLIK		
	DEBATES	GAMES	WARS
4. Agama			
a. Islam-Islam	Intensif	Kurang Intensif	Intensif
b. Yahudi-Islam	Intensif	Intensif	Intensif
c. Nasrani-Islam	Kurang intensif	Kurang intensif	Kurang intensif
d. Nasrani-Islam-Yahudi	Intensif	Intensif	Intensif

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Konflik sebagai hasil interaksi antar sesama umat Islam dalam batas tertentu cenderung mewarnai konflik di Timur tengah, hal ini dalam batas tertentu bisa difahami karena populasi umat islam di Timur tengah sampai angka 93%. (Microsoft Encarta Encyclopedia, 2004) Namun kita juga harus melihat potret secara seksama bahwa memang ada persoalan yang sangat akut antar umat islam sendiri. Konflik antara Iraq-Iran, Kuwait-Iraq, antar faksi di Palestina, antar kelompok keagamaan di Arab-Saudi maupun Mesir merupakan potret konflik yang cenderung berekskalasi ke arah tingkat perang.

Konflik Sunni Syiah tidak hanya dalam batas debate semata, namun lebih jauh sampai ke tingkat perang, bahkan sampai melibatkan konflik di kawasan Arab maupun diluar Arab. Efek dari perang Iraq-Iran difahami sebagai konflik bawaan

yang telah diwariskan umat Islam semenjak abad ke 8 Masehi yang sampai abad 21 belum terselesaikan dengan baik. Meskipun konflik Iran-Iraq telah berakhir di 1988, namun bukan berarti konflik berbasis Sunni-Syiah telah berakhir sama sekali. Meskipun dalam batas tertentu telah mengalami pengurangan yang signifikan dengan diterima presiden Khatami sebagai ketua OKI.

Konflik diberbagai wilayah Islam sebagai representasi faksi dalam pemikiran Islam juga terus terjadi dengan intensif. Mesir merupakan sebuah mosaik bagaimana banyaknya pemikiran keislaman yang berkembang di abad 20 namun menimbulkan gejala yang tidak sehat, berupa kafir-mengkafirkan. Inilah yang kemudian mengilhami Ikhwanul Muslimin membangun model pemikiran jalan tengah, (Yusuf Qordhawy, 1997) meski di tengah jalan pemikiran jalan tengah Ikhwanul Muslimin dipaksa untuk dieliminasi karena dianggap sebagai embrio gerakan esktrim. Konflik pemikiran Islam di Palestina antara kubu nasionalis dan fundamentalis pernah terjadi, yang sebenarnya lebih disebabkan karena pilihan dilematis yang harus diterima ketika sebagian umat Islam melakukan konsesi perjanjian dengan Israel.

Sedangkan konflik Islam dengan Yahudi sebelum menjadi konflik sudah menahun, semenjak jaman Nabi Muhammad SAW. Konflik dengan Yahudi sudah mereda tatkala umat Yahudi terdiaspora ke mana, menyebar ke seluruh dunia untuk mencari tempat bermukim. Konflik menjadi mengemuka tatkala Theodore Herzl mendeklarasikan program pulang kembalike tanah air mereka dalam konteks untuk menetap, bukan hanya ziarah saja. Meskipun konflik ini hanya terjadi di satu kawasan yakni di Palestina, namun posisi Palestina dalam pandangan Islam dan Arab merupakan tempat yang sangat monumental. Sehingga konfliknya berekskalasi sampai membesar, sehingga melahirkan konflik yang sangat kompleks yang dikenal dengan konflik Arab-Israel. (Robert B. Satloff, 1995)

Dalam kurun 1980-an, sebenarnya intensitas konflik Arab Israel menunjukkan pola penurunan semenjak Mesir melakukan perjanjian Cam David, namun di satu sisi Israel menunjukkan gejala sebaliknya. Peristiwa yang sangat mengerikan yakni terjadinya pembantaian kaum muslimin Arab di Sabra dan Satila di 1988. Yang bersamaan itu lahirlah gerakan perlawanan Islam yang masif untuk melakukan serangkaian perlawanan. Gerakan intifadha adalah gerakan yang lahir sebagai reaksi terhadap tindakan represif Israel.

Karena tindakan represif Israel tidak terhenti, maka gerakan Intifadha yang sebelumnya direpresentasikan sebagai gerakan non kekerasan, yakni melawan Israel dengan ketapel dan lemparan batu, maka di 1994-an mulai muncul modus baru perlawanan terhadap Israel dengan tindakan "bom syahid". Bagi Israel tindakan bom bunuh diri ini diyakini sebagai tindakan kontra represif, yang kemudian mengakibatkan regim yang berkuasapun semakin mengental dengan politik kekerasannya. Benyamin Netanyahu yang diyakini sebagai perdana menteri yang sangat keras kepada pejuang Palestina, ternyata masih dianggap kurang keras, sehingga muncullah sosok Ariel

Sharon yang sangat keras.

Konflik ini kemudian tidak hanya melibatkan Yahudi yang berada Timur Tengah saja, namun juga melibatkan kekuatan Yahudi yang berada di Amerika Serikat dalam bentuk ikatan lobby yang tergabung dalam AIPAC. Demikian pula tindakan diskriminatif Yahudi juga tidak hanya berlaku di Palestina, namun juga di daerah-daerah di mana lobi yahudi sangat berpengaruh. Demikian sebaliknya, sentimen anti yahudipun berkembang di seantero dunia islam. Penolakan kepada produk dan pejabat Yahudi sedemikian merebak di mana-mana.

Sedangkan tingkat konflik antara Islam dan Nasrani relatif tidak banyak tercermin di Timur Tengah. Kalaupun ada konflik, hanya di beberapa wilayah Lebanon saja. Kekuatan politik Nasrani kurang begitu berkembang di Timur Tengah, karena posisi tidak lebih dari 2% saja di hampir semua negara, kecuali di Lebanon yang mencapai 15%.

E. Hubungan Antara Unsur Agama dengan Sakral

Sebagaimana dibahas dalam Bab sebelumnya, kawasan Timur Tengah memiliki situs situs strategis baik dari sisi ekonomi-politik, maupun dari sisi spiritual. Dalam konteks jumlah konflik ada kecenderungan konflik yang berbasis strategis dari sisi ekonomi politik relatif menempati frekuensi yang tinggi, dan terjadi secara merata. Sedangkan dari sisi daerah sakral secara spiritual hanya beberapa titik yang mengalami konflik yang serius, terutama yang berada di Yerusalem.

Dan ada satu tempat di Iraq, yakni di sekitar Karbala yang diyakini terdapat makam Imam Ali, dan tempat pembantaian terhadap cucu Rasul yakni Imam Hussein. Jika daerah ini sampai dirusak oleh pihak lain, maka akan dengan sangat mudah menimbulkan sentimen untuk timbulnya konflik. Iran sebagai representasi negara Syi'ah sangat menghormati dan menaruh perhatian yang sangat kuat terhadap berbagai wilayah di Iraq.

Sedangkan untuk kawasan situs yang lain bisa ditemukan tempat yang sangat sakral bagi umat Islam yakni Makkah dengan bangunan Ka'bahnya. Tempat ini relatif tidak menjadi ajang konflik, walaupun ada hanya sebatas demonstrasi yang dilakukan oleh jama'ah haji dari Iran. Kabah dan Makkah pernah menjadi tempat konflik yang sangat berarti tatkala terjadi konflik antara Mua'wiyah bin Abi Sofyan dengan Zubair bin Awwam yang mempergunakan Ka'bah sebagai benteng pertahanan ataupun konflik yang dilakukan oleh raja Abraham ketika menyerang Ka'bah. Semenjak kasus ini, situs sakral di Kabah relatif tidak menjadi ruang konflik, dan pemerintah Arab Saudi sangat berkepentingan untuk menjadikan daerah Makkah sebagai daerah yang steril dari aktivitas politik.

Daerah sakral yang berkaitan dengan ekonomi politik berada di beberapa titik semisal terusan Suez, sekitar pangkalan dan pelabuhan minyak di sekitar Teluk Persia, ataupun beberapa wilayah yang memiliki akses air. Tempat ini merupakan tempat

yang senantiasa akan menjadi picu konflik yang lebih besar.

Terusan Suez merupakan terusan yang mampu menghubungkan Eropa dengan Asia tanpa harus mengelilingi benua Eropa, sehingga Inggris dan Perancis mati-matian mempertahankan penguasaan terusan ini. Demikian juga Mesir menjadikan terusan ini sebagai ladang devisa sebagai bahan baku pembangunan Mesir.

Pelabuhan minyak di sekitar Teluk juga telah memberikan kontribusi bagi lahirnya konflik antar berbagai negara seperti konflik Iraq-Kuwait maupun Iraq-Iran. Konflik ini sedemikian panjangnya sehingga rata-rata memakan waktu antara 8-10 tahun. Hal ini pulalah yang kemudian mengilhami Arab Saudi dan Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di Dahran untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang muncul di sekitar teluk Persia sebagai tempat pelabuhan minyak.

Tempat strategis yang lain adalah daerah berbasis sungai, yang tidak hanya memiliki nilai ekonomis juga strategis. Konflik air merupakan salah satu konflik yang sangat sering terjadi, bahkan dapat dikatakan rutin terjadi.

Tabel 7: Hubungan Tingkat Konflik Dengan Daerah Sakral

SETTING GEOGRAFIS	TINGKAT KONFLIK		
	DEBATES	GAMES	WARS
5. Daerah Sakral			
a. Strategis	Kurang Intensif	Intensif	Intensif
b. Spiritual	Intensif	Intensif	Intensif

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

DAFTAR PUSTAKA

- Cobb, Roger dan Charles Elder, *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building*, Allyn and Bacon, Boston, 1972
- Drysdale, Alaydair, *Political Geogrhapy in North Africa and Middle East*, New York, Princenton, 1989
- Eickstein, Harry, *Internal War Problems and Approaches*, London, The Free Press of Glencoe Collier Macmillan, 1964
- Esposito, John L, *Unholy War*, Yogyakarta, LKIS, 2002.
- Fraser, T.G, *The Arab-Israel Conflict*, London, MacMillan Press Ltd, 1995
- Geraudy, Roger, *Zionisme Keagamaan dan Politik*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1993
- Gurr, Ted, *Why Men Rebbel*, New Yotk, 1975
- Hotcopy, Osama bin Laden: Teroris atau Mujahid*, Jakarta, Gramedia, 2001
- Hunter, Shireen T. (ed.), *The Politics of Islamic Revivalism: Unity and Diversity*, Bloominton, Indiana University Press, 1988
- Jones, Wolter S., *The Logic of International Relation*, New York, 1995
- Jurgensmeyer, Mark, *Berperang Atas Nama Tuhan*, Jakarta, 2002
- Mas'ad, Dhurorudin dkk, *Prospek Kerjasama Ekonomi-Politik Indonesia Timur Tengah*, Jakarta, LIPI, 1997
- Mas'oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta LP3ES,

1995

- Muhammad, Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, Jakarta, Logos, 1996
- Nasikun, Mohtar Mas'oeed, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta, PAU UGM, 1995
- Obert, John Voll, *Politik Islam: Perubahan dan Kesenambungan* (terjemahan), Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1996.
- Ridho, Abu, *Palestina Nasibmu Kini*, Jakarta, Sidik, 1996.
- Said, Edward, *Covering Islam: Bias Liputan Barat Atas Dunia Islam*, Jogjakarta, Ikon Teralitera, 2001
- Satloff, Robert B., *The Politics of Change in the Middle East*, Boulder, Westview Press, 1993
- Sihbudi, Riza, Hamdan Basyar, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Jakarta, Pustaka Grafindo, 1994
- Smelser, Neil, *Theory of Collective Behaviour*, New York. The Free Press, 1971
- Spanier, John, *Games Nations Playing*, New York, Princenton University, 1994
- Syoeb, Jusuf, *Sejarah Khulafaur Rasyidin*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979
- Taylor, Alan R., *Pergeseran-Pergeseran Aliansi Dalam Sistem Perimbangan Kekuatan Arab*, Jakarta, AmarPress, 1990, hal. 149
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam II*, Jakarta, Radjawali, 1998
- Zahrah, Muhammad Abu, *Aliran Politik dan Agama Dalam Islam*, Jakarta, Logos, 1996

Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama

Abstract

Border problems are often originated from a very complex issue. Problems that arise are because of there is no uncertainty about the border, and disparity of boundary zone development between the country and neighbouring countries. The latter problem often encourages the orientation and mobility of border communities who tend to prefer to more rapid development area. Problems can arise from the differences perception and outlook between the government and society about the meaning of border, as well. This paper proposed the concept of shared space as a strategic move to overcome that perceptual difference on the border. A space that is managed together both in planning and implementation, will be able to minimize the number of conflicts and tensions that often arise in the border region.

keywords: border, shared space, border region, conflict

Wahyuni Kartikasari

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
wahyunikartikasari@umy.ac.id

Pengantar

Definisi umum dari negara-bangsa adalah pemerintahan yang syah, adanya rakyat yang berdaulat dan memiliki wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas. Maka, proses untuk mengidentifikasi negara bangsa salah satunya dilakukan dengan cara mengenali batas-batas wilayahnya. Batas, menunjukkan tempat awal mula dan berakhirnya sesuatu, juga menandai kepemilikan atas sesuatu. Dalam tataran negara, batas wilayah merupakan persoalan kedaulatan negara, penanda kepemilikan suatu negara atas wilayah serta potensi-potensi yang berada di dalamnya. Pentingnya pengenalan wilayah ini, dapat terlacak dari *Boundary Making Theory* oleh Stephen B Jones¹, yang mengungkapkan 3 tahap dari keseluruhan empat tahap pengelolaan perbatasan, yaitu *Allocation*, *Delimitation*, *Demarcation*, dan *Administration*.

Ditengarai ada persoalan yang timbul ketika kita memaknai perbatasan. Lumayan sering kita dapati, konflik perbatasan dipicu oleh persoalan-persoalan memaknai penentuan garis batas negara. Seperti beberapa kali terjadi adanya kasus penangkapan nelayan tradisional Indonesia oleh tentara laut

negara Malaysia karena persoalan sederhana dimana para nelayan tersebut terbatas dalam peralatan navigasi, ataupun klaim suatu negara (atau lebih) atas wilayah tertentu karena belum jelas patok-patok batas wilayahnya.

Namun apakah melulu persoalan perbatasan timbul hanya antar pemerintah pada negara yang berbatasan saja? Mungkinkah, persoalan perbatasan itu juga sebenarnya dapat ditimbulkan oleh faktor-faktor di dalam negeri sendiri? Atau, mungkinkah persoalan tetap timbul, ketika batas wilayah yang jelas sebenarnya sudah ditetapkan?

Tulisan ini dimaksudkan sebagai pencarian alternatif pemecahan terhadap problem yang timbul di wilayah-wilayah perbatasan, terutama studi kasus-studi kasus di wilayah perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangganya. Mungkin saja terdapat perbedaan persepsi mengenai perbatasan baik oleh masing-masing negara, oleh pemerintah, ataupun oleh rakyat. Oleh sebab itu, sistematika pembahasan akan tersusun menjadi bagian pertama yang akan menilik, apa itu wilayah perbatasan maupun kawasan perbatasan, serta bagaimana proses pembentukan dan penetapannya. Dengan demikian, pada bagian ini diharapkan kita dapat memahami makna perbatasan bagi negara. Bagian kedua akan mengurai makna perbatasan bagi penduduk, terutama penduduk setempat yang langsung mengalami dan menerima dampak perbatasan ini. Samakah persepsi penduduk dengan makna perbatasan yang dimiliki negara? Bagian selanjutnya menunjukkan pada kita, ada problem-problem yang mungkin timbul akibat perbedaan pemahaman mengenai makna perbatasan baik itu bagi negara ataupun bagi penduduk, serta perbedaan kondisi di perbatasan. Bagian terakhir penulis mencoba menawarkan bentuk pengelolaan perbatasan dimana selanjutnya dapat ditelaah lebih jauh kemungkinan penerapannya.

Pemahaman Batas Negara Bagi Negara dan Cara Penentuannya

Pengenalan terhadap definisi perbatasan dan istilah-istilah yang lazim dipakai, akan dapat membantu memetakan batas-batas hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara serta arti penting daerah perbatasan.

Sebagaimana telah disebutkan secara sepintas di awal tulisan, penentuan perbatasan dapat merunut pada *Boundary Making Theory* oleh Stephen B Jones, yaitu *Allocation, Delimitation, Demarcation, dan Administration*.

Allocation/Alokasi: yang dimaksud dengan alokasi dalam teori ini adalah cakupan dari wilayah suatu negara, termasuk dimana wilayah yang berbatasan dengan negara tetangganya. Berkaitan dengan cakupan wilayah, Hukum Internasional mengatur cara-cara bagaimana sebuah negara memperoleh atau bahkan kehilangan wilayahnya. Untuk Indonesia, wilayah Indonesia adalah wilayah yang diwariskan dari penjajah Belanda. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum internasional *Uti Possidetis Juris* yang menyatakan bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Sebagai contoh, perjanjian perbatasan antara Kalimantan Barat dan Serawak yang menetapkan patok-patok wilayah perbatasan merunut batas-batas wilayah yang ditinggalkan

oleh penjajah dahulu.

Delimitation/Penetapan Batas: Setelah cakupan wilayah diketahui, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang tumpang tindih ataupun wilayah yang masih harus ditentukan batasnya oleh negara.

Demarcation (Penegasan Batas): Demarkasi atau penegasan batas merupakan tahap yang ditempuh setelah penetapan batas atau delimitasi yang biasanya ditetapkan melalui perjanjian batas. Penegasan Batas dilakukan di lapangan secara fisik. Ketegasan ini diperlukan karena sifat garis batas yang sangat penting, yaitu sebagai tanda awal mula dan berakhirnya hak, kewajiban serta kedaulatan negara. Penegasan batas dilakukan dengan menandai perbatasan dengan memasang tanda-tanda atau patok-patok batas di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan perjanjian.

Administration/ manajemen pembangunan. Walaupun tahap ini merupakan tahap terakhir, bukan berarti tahap administrasi hanya dapat dilakukan setelah tahap 3 yaitu penegasan batas, dilaksanakan. Dalam *Theory of Boundary Making*, pengelolaan wilayah perbatasan yang baik dapat saja menumpang-tindihkan atau menjalankan secara bersamaan proses pembangunan perbatasan dan demarkasi. Hal ini dapat dimengerti karena, proses penyelesaian masalah dan pembangunan bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik memerlukan waktu yang panjang. Selain itu diperlukan pula sosialisasi pemahaman bagi penduduk di kawasan perbatasan, bahwa setelah penegasan batas ditentukan, mereka dapat terpisah secara administratif kenegaraan dengan sanak keluarga dan kerabat yang berlainan warganegara. Dalam tahap ini pula, seluruh aspek pemerintahan dalam negeri termasuk didalamnya. Pemerintahan Daerah dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan perbatasan.

Lalu bagaimana pemerintah Indonesia memandang daerah perbatasan? Sebagai Negara kepulauan (*archipelagic state*), berdasarkan hukum internasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki beraneka perbatasan nasional baik berupa perbatasan wilayah dengan kedaulatan penuh maupun perbatasan kawasan dengan hak-hak pemanfaatan sumber daya alam tertentu (misal landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif). *Archipelagic state principle* merupakan pengejawantahan Wawasan Nusantara yang memandang wilayah laut bukan sebagai pemisah, tetapi justru sebagai penghubung dengan wilayah darat di seluruh wilayah NKRI. Berdasarkan prinsip ini wilayah laut Indonesia yang pada masa penjajahan Belanda hanya seluas 100.000km² menjadi kira-kira 3.000.000km². Wilayah Laut NKRI dengan kedaulatan penuh tersebut terdiri dari Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan atau Perairan Nusantara, dan Laut Teritorial/Laut Wilayah.

Sedangkan definisi-definisi perbatasan yang ada, mengungkap sebagai berikut: Daerah Perbatasan adalah daerah daratan, laut dan udara di atasnya sepanjang perbatasan bersama kedua negara, yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara². Terdapat pula istilah Kawasan Penyangga Perbatasan yang dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terhadap arus barang dan

manusia yang keluar masuk Indonesia, untuk kepentingan pertahanan keamanan nasional.

Untuk menentukan batas laut kedua negara, maka ada dua konsep yang digunakan: yaitu konsep Teritorial Laut dan Zona Ekonomi Eksklusif³. Ini adalah perangkat aturan yang disepakati melalui Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu adanya Konsep Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200mil dari garis dasar yang dipakai untuk menentukan batas laut teritorial suatu negara⁴. Alasan untuk penggunaan dua konsep ini adalah:

While the oceans cover some 71 percent of the earth's surface, the human use of the ocean is extremely concentrated, with by far the majority of activities occurring in area close to the coast (max 12 miles).

Second, while ocean extend over vast areas, the resources which they contain or cover are not evenly distributed. The connection between the presence of fisheries and continental shelf areas of the world has long been noted. According to UNFAO some 95% of the world fish catch comes from areas within 200 miles of the coast.

Dari dua pernyataan diatas, maka model atau potensi konflik dalam wilayah Laut Teritorial akan berbeda dengan konflik di ZEE. Konflik dalam wilayah laut teritorial adalah konflik penggunaan ruang laut (*conflict in the use of ocean shore*). Sehingga dalam wilayah ini diperlukan administrasi lautan yang tertib (*ocean administration*) dan menerapkan kadaster laut. Konflik di ZEE adalah konflik atas pemanfaatan sumber daya perikanan (misalnya pencurian). Sehingga, negara-negara yang dititipi ZEE harus menetapkan zona-zona perikanan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*total allowable catch*). Azas kadaster tidak dapat ditetapkan disini, dimana administrasi lautan lebih sederhana, namun pengawasan harus lebih ketat.

Untuk wilayah laut, ada beberapa yang lain menambahkan dengan Wilayah laut Zone Tambahan⁵, yaitu nilai strategis batas wilayah laut dengan Zone Tambahan selebar 12 mil laut yang mengelilingi laut wilayah selebar 12 mil laut. Untuk wilayah laut dengan Zone Tambahan selebar 12 mil laut, membuat Indonesia dapat melaksanakan pengawasan atas masalah-masalah bea-cukai, fiskal, imigrasi atau kesehatan⁶.

Selain Laut Teritorial, ZEE dan Zona Tambahan, Rudolf Matindas menambahkan dengan Zona Perikanan dan Landas Kontinen⁷. Zona perikanan tidak sama dengan ZEE walaupun perkembangan menunjukkan bahwa semakin banyak negara mengacu kepada ZEE. *Fishery Zone* umumnya hanya mengacu pada sumber daya hayati ikan yang ada dalam *water column*-nya⁸. Landas Kontinen (*Continental Shelf*) adalah dasar laut dan tanah dibawahnya (*sea-bed and subsoil*) yang berbatasan dengan daerah dasar laut dibawah laut teritorial, sampai dengan batas maksimal 350 mil dari garis pangkal, atau 100 mil dari kedalaman 2.500 meter. Di Landas Kontinen negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alamnya⁹. Menurut UU No.1 Th 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia: adalah dasar laut dan tanah

dibawahnya di luar perairan Republik Indonesia sampai dengan kedalaman 200meter atau lebih¹⁰.

Batas suatu negara dilaut kemudian ditetapkan dengan menarik Garis-garis Pangkal atau *Base Line* yang menghubungkan rangkaian titik-titik terluar yang disebut Titik Dasar atau *Base Point*. Titik-titik dasar ini ditentukan melalui survey hidrografi oleh Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL¹¹.

Apabila ditinjau secara fisik, Indonesia merupakan negara terbesar kelima didunia yang dibatasi oleh dua matra, yaitu di laut dengan sepuluh negara: Australia, Malaysia, Singapura, India, thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea dan Timor Leste; dan di darat dengan tiga negara: Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Perbatasan merupakan perwujudan dari kedaulatan teritorial, sehingga daerah perbatasan dimaknai pula sebagai daerah atau jalur pemisah antara unit-unit politik (negara)¹². Pemisahan ini dapat terlihat jelas dalam bentuk fisik seperti Tembok China, Tembok Berlin, Tembok Jerusalem, Tembok Israel, dan lain-lain. Pemisahan fisik kemudian jelas memperlihatkan kepemilikan negara atas suatu wilayah, beserta segenap isi yang berada didalamnya seperti kekayaan alam, bangunan, dan masyarakat.

Kepentingan kepemilikan ini, atas dasar kedaulatan, seringkali menimbulkan konflik. Konflik di perbatasan Thailand – Kamboja atas kepemilikan Kuil Phreah Vear, konflik klaim wilayah Sipadan – Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Khusus bagi Indonesia, berbagai studi¹³ menunjukkan bahwa isu atau masalah perbatasan sangat kompleks. Secara umum permasalahan-permasalahan di perbatasan dapat diidentifikasi berdasar beberapa kelompok isu berikut:

Isu geografis-teritorial karena belum disepakatinya batas-batas wilayah darat maupun laut di beberapa tapal batas dengan negara tetangga. Antara Indonesia dan Singapura, masih ada perbedaan persepsi tentang batas wilayah laut di selat Malaka dan Pulau Nipah. Antara Indonesia dan Malaysia, batas laut teritorial Malaysia di bagian utara selat malaka dan di selat Singapura belum menghasilkan kesepakatan Batas Landas Kontinen di laut China Selatan, Batas laut teritorial dan landas kontinen sebelah timur Pulau sebatik. Penarikan batas menurut pulau terluar, tidak sesuai dengan status Malaysia yang bukan negara kepulauan. Antara Indonesia dan Filipina, terdapat perbedaan persepsi antara batas ZEE dan landas kontinen. Antara Indonesia dan Vietnam, ada perbedaan persepsi dalam penentuan batas wilayah di sekitar Kepulauan Natuna. Penarikan batas menurut pulau terluar, tidak sesuai dengan status Vietnam yang bukan negara kepulauan. Antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina, terjadi tumpang tindih wilayah perairan ZEE dengan klaim pihak RRC. Antara Indonesia dan Palau, posisi kepulauan Palau berada di selatan Samudra Pasifik berbatasan dengan Papua, tepatnya di P.P. Asia dan P.P Mapia (milik Indonesia). Disini penetapan ZEE belum dapat dilaksanakan, sehingga kedua negara masih dihadapkan pada masalah nelayan tradisional. Antara Indonesia dan Australia, bahwa dengan terpisahnya Timor-Timur (Timor Leste) dari wilayah Indonesia, penetapan Batas Wilayah Laut di

celah Timor (Timor Gap) perlu dirundingkan kembali. Belum ada kesepakatan bagi Batas Landas Kontinen di sekitar perairan P Christmas, begitu juga tentang status Karang Ashmore. Belum tuntasnya penataan batas negara di Kabupaten Belu-Timor Leste. Sektor Timur (Kab Belu) sepanjang 149,1km; sektor barat Kab Timor Tengah Utara 109km dan Kupang 10,7km berbatasan dengan *Enclave Oecusse*. Pilar batas yang permanen baru sebagian kecil ada. Dari keseluruhan perbatasan negara sepanjang 268,8km kedua negara dalam *provisional agreement* telah berhasil menyepakati 907 koordinat titik-titik batas atau sekitar 96% dari total panjang garis batas, dan telah dibangun 47 tugu/pilar demarkasi di kab Belu-Timor Leste.

Isu-isu keamanan dan kedaulatan nasional, terutama kejahatan lintas batas (*cross border crimes*) yang teroganisir seperti penyelundupan, perdagangan ilegal (obat, manusia, bahan-bahan makanan, kayu, dll) dan garis batas (*dispute area*) yang tidak jelas dengan akibat berkurangnya wilayah nasional Indonesia.

Isu lingkungan yakni kerusakan ekologi dan eksploitasi sumber daya berlebihan, bersifat lintas batas dan dilakukan secara legal maupun ilegal. Contoh: *Illegal logging*. Potensi sumber daya alam yang melimpah belum mampu memberikan nilai tambah yang besar. Serta pusat pelestarian lingkungan yang belum berkembang.

Isu kemiskinan, keterbelakangan, keterbatasan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dialami warga negara Indonesia di perbatasan, memicu terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*). Sarana transportasi dan pembangunan yang masih minim dan infrastruktur yang terbatas.

Isu koordinasi dan implementasi kebijakan pembangunan akibat jauhnya jarak komunikasi antar pemerintah lokal dan pemerintah daerah atau pusat. Rendahnya alokasi pembiayaan pembangunan atau ketergantungan pada pemerintah pusat dan belum terwujudnya keterpaduan dalam upaya pengelolaan perbatasan. Pembangunan hanya diarahkan pada pusat-pusat kota/pertumbuhan, juga masih minimnya pelayanan CIQS (*Custom-Immigration-Quarantine-Service*) pada pintu-pintu lintas batas.

Isu kependudukan dan perubahan sosial terutama akibat migrasi lintas batas yang bersifat legal dan ilegal. Pengungsi yang sekarang dikenal sebagai warga baru keturunan Timor Leste (eks pengungsi), terpisah dengan sanak saudaranya yang berada di Timor Leste. Kekerabatan penduduk perbatasan dan Hak Ulayat di Kabupaten Belu yang secara sosiologis tidak mengenal batas wilayah negara, memerlukan pendekatan dan upaya persuasif dalam melaksanakan penegakan kedaulatan Negara. Untuk keperluan Lintas Batas, Pemerintah Timor Leste belum menerapkan Pas Lintas Batas (PLB). Sedangkan di Papua, mulai tahun 2008 pemerintah PNG membatasi penggunaan Kartu Pelintas Batas (KLB) karena banyak disalahgunakan.

Isu patriotisme dan ketahanan nasional terutama menyangkut persepsi penduduk perbatasan bahwa mereka dianaktirikan.

Pemahaman Batas Negara Bagi Penduduk

Setelah memahami pandangan negara mengenai konsep perbatasan, timbul pertanyaan, apakah makna pemisahan tersebut benar-benar dapat berlaku? Bagaimanakah konsep perbatasan yang dipahami oleh masyarakat daerah perbatasan, sebagai masyarakat yang langsung terlibat nyata dengan persoalan-persoalan perbatasan? Jalan apa yang dapat ditempuh untuk memadukan konsep perbatasan oleh negara dengan konsep wilayah perbatasan bagi masyarakat setempat? Pertanyaan ini muncul karena menilik beberapa kondisi di daerah perbatasan yang ada antara Indonesia dengan negara-negara tetangga sebagai berikut:

Perihal kondisi masyarakat terutama di daerah perbatasan darat, sebagian besar penduduk di daerah perbatasan merupakan masyarakat serumpun. Ini dapat terlihat misalnya dari komposisi etnis yang relatif sama di perbatasan Kalimantan Barat (antara lain Dayak, Melayu, Cina) dan Sarawak (Iban, Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau, dan lain-lain)¹⁴. Sedangkan pada daerah perbatasan antara kabupaten Belu dan Timor Leste, seluruh suku-suku di daratan Timor adalah satu keturunan dengan empat keluarga besar yaitu Silah Liurae (Lorosae), Dong Silah (Ambeno), Ampoang Silah (Ampoang) dan Sonbae Silah (Soe-Belu)¹⁵.

Hubungan kekerabatan yang masih erat ini membuat penduduk daerah perbatasan selalu berkomunikasi dan berhubungan dengan keluarganya walaupun sanak keluarga tersebut tinggal di negara tetangga. Sehingga kegiatan penduduk melintas perbatasan adalah kegiatan lumrah sehari-hari seperti kunjungan keluarga, aktifitas sosial dan kebudayaan serta pemenuhan kebutuhan ekonomi. Daerah Perbatasan menjadi daerah aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di daerah perbatasan Papua, akibat pembagian garis batas antara Inggris dan Belanda pada 16 Mei 1895 melalui The Hague Treaty, banyak warga masyarakat perbatasan Indonesia memiliki tanah ulayat berupa lahan garapan yang berada di wilayah Papua New Guinea (PNG), dan demikian pula sebaliknya.

Perbedaan Kondisi di Kedua Wilayah Negara Memicu Problem dan Konflik

Selain telah diungkapkan di bagian-bagian awal tulisan, dimana terjadi beragam konflik dari beragam isu menyangkut daerah perbatasan, bagian ini khusus ingin menelaah problem yang timbul di perbatasan khusus pada amatan kondisi pembangunan di daerah perbatasan.

Perbedaan kondisi antara kedua wilayah yang berbatasan, akan menjadi magnet migrasi dari daerah yang satu ke daerah lain. Kita tidak dapat mengesampingkan kenyataan bahwa, ternyata di daerah perbatasan-perbatasan Indonesia dengan Malaysia terdapat perbedaan tingkat pembangunan yang relatif mencolok. Sarana dan prasarana kehidupan di kota-kota kecil di Malaysia relatif lebih baik dan tersedia lengkap dibandingkan dengan kota-kota kecil yang ada di wilayah Indonesia.

Perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi yang ada di daerah perbatasan antara

Kalimantan dengan Malaysia membuat kasus-kasus *trafficking* banyak terjadi. Penduduk di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur banyak tergiur untuk menjadi tenaga kerja di Sarawak, bahkan dengan status tenaga kerja ilegal sekalipun. Kalimantan Barat menempati urutan besar dalam kasus *trafficking*, bersama-sama dengan Batam.

Selain kasus *trafficking* yang terjadi akibat dari adanya perbedaan tingkat kesejahteraan ekonomi yang ada di daerah perbatasan Kalimantan sebagaimana telah dijelaskan diatas, persoalan orientasi penduduk yang lebih besar pada negara tetangga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah untuk alasan loyalitas dan nasionalisme. Terutama sekali karena jarak ibu kota yang jauh, suplai barang-barang dari Pontianak menyebabkan harga-harga barang di wilayah pedalaman menjadi mahal, sehingga masyarakat lebih mengandalkan pasokan barang dari Sarawak yang lebih dekat, lebih mudah diperoleh dan lebih murah. Hijrahnya ratusan pedagang ke Sarawak juga membuktikan perekonomian di daerah perbatasan sangat tergantung pada Sarawak. Kegiatan perdagangan ke Sarawak ternyata memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi negara tetangga tersebut. Bahkan menjadi hal yang lazim bagi penduduk Indonesia di daerah perbatasan untuk menggunakan mata uang Ringgit Malaysia selain mata uang Rupiah Indonesia.

Di sektor kehutanan, produksi kayu yang sebenarnya mereka dapatkan dari Kalimantan Barat, menjadikan negara Malaysia Timur menjadi salah satu daerah penghasil devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas¹⁶. Kasus-kasus *illegal logging* terjadi karena kondisi infrastruktur yang lebih baik di wilayah Sarawak memungkinkan mereka dapat mengakses hutan-hutan perbatasan dari wilayah Sarawak dan segera pergi ketika terjadi razia. Hal ini dimungkinkan karena kondisi jalan yang relatif baik sudah terbangun di wilayah Sarawak memudahkan mobilisasi.

Kondisi pembangunan yang lebih maju dan fasilitas umum yang lebih lengkap di Sarawak membuat penduduk lebih sering dan lebih mudah memanfaatkan fasilitas hidup di Sarawak. Penduduk Kalimantan Barat akan lebih mudah memanfaatkan sarana dan prasarana umum seperti jalan, pasar, rumah sakit, sekolah, di Sarawak dibandingkan jika mereka harus pergi ke Pontianak.

Untuk persoalan orientasi kehidupan dan nasionalisme juga terdapat beberapa masalah. Kita pernah mendengar beberapa berita sekitar perekrutan warganegara Indonesia menjadi tentara atau laskar di Malaysia. "Perekrutan" warga Indonesia menjadi bala bantuan Malaysia sebenarnya sudah terjadi sejak perseteruan Indonesia - Malaysia pada tahun 1960-an. Perbatasan Kalimantan dan Malaysia merupakan kawasan konflik saat Soekarno melancarkan konfrontasi mengganyang Malaysia. Ribuan pasukan reguler dan paramiliter dikerahkan untuk menyokong politik konfrontasi itu.

Sebagian dari warganegara Indonesia menjadi tentara cadangan negara Malaysia untuk mencari nafkah. Sebagian lain sengaja disusupkan tentara Indonesia untuk

menjadi mata-mata¹⁷. Beberapa sumber menyebutkan, anggota keluarga mereka menjadi anggota Askar, malah menjadi Tentara Diraja Malaysia dan sudah menjadi warga Malaysia. Yakon Lomon, Temenggung Agung Dewan Adat Dayak wilayah perbatasan, mengatakan, Malaysia telah merekrut warga Indonesia menjadi laskar sejak 1962. Para pemuda Dayak berbondong-bondong menjadi anggota Tentara Nasional Kalimantan Utara, dan dengan demikian menjadi warga negara Malaysia. Karena buruknya administrasi saat itu, mereka tak juga melepas status kewarganegaraan Indonesia. Kini, kata Yakon, masih banyak putra Dayak beralih kewarganegaraan. Awalnya, mereka bekerja untuk pengusaha-pengusaha Malaysia yang membuka hutan di perbatasan. Saat pekerjaan usai dan para pemuda itu menganggur, tawaran menjadi askar (Askar Wataniah) datang. Askar Wataniah adalah komponen cadangan tentara Malaysia. Pasukan ini dibentuk untuk menjalankan konsep “pertahanan menyeluruh”, yang mengatur adanya Angkatan Tetap dan Angkatan Simpanan. Pasukan ini bertugas membantu tentara reguler di masa perang atau menangani bencana. Ada beberapa bagian pasukan ini, antara lain elemen tempur, elemen bantuan tempur, elemen ahli, dan pasukan kerahan. Askar acap kali pula dipakai para pengusaha Malaysia untuk menjaga aset-aset mereka.

Hal yang relatif umum pula bagi masyarakat di perbatasan adalah, walaupun mereka warganegara Indonesia, tapi mereka juga memiliki kartu identitas Malaysia. Bagi orang yang tinggal di perbatasan hal ini sangat memungkinkan, sebab mereka pada dasarnya berasal dari suku yang sama yaitu Dayak Bidayah.

Pulau Sebatik sebagai pulau terluar Republik Indonesia mempunyai fenomena tersendiri pula. Secara administratif pulau ini terletak di dua negara, di bagian utara dikelola oleh negara bagian Sabah, di Malaysia sedangkan di bagian selatan dikelola oleh propinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pada masa dahulu, Pulau Sebatik pernah menjadi tempat pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Malaysia. Kondisi sarana dan prasarana pulau ini sungguh memprihatinkan. Fasilitas jalan di pulau ini adalah tanah tidak beraspal, becek dan licin. Ketersediaan jaringan listrik sangat minim, sehingga sangat sulit untuk memperoleh fasilitas listrik bagi industri besar di sini.

Kota Tawau Malaysia yang terletak di seberang utara, sangat terlihat jelas dari Pulau Sebatik. Kota Tawau relatif lebih jauh maju dan berkembang pesat secara ekonomi dibandingkan Pulau Sebatik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Sebatik sangat tergantung pada kota Tawau. Masyarakat nelayan Sebatik dapat menjual ikan hasil tangkapannya di tempat pelelangan ikan di Tawau. Kapal-kapal merekapun dilengkapi dengan bendera Malaysia agar mudah melakukan transaksi dan melintas batas, karena di Sebatik tidak ada pabrik es yang dapat mengawetkan ikan-ikan mereka. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Sebatik ini oleh pengusaha Malaysia diberi merek Malaysia dan diekspor ke negara lain dengan harga sampai 3-4 kali lipat. Untuk contoh yang lain, ketika rakyat di daerah lain di Indonesia, sedang kesusahan membeli

minyak goreng atau susu yang harganya terus melambung, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat Sebatik. Mereka dapat memperoleh keperluan sehari-harinya melalui Malaysia, dimana mereka mendapatkan barang-barang mewah di Indonesia itu dengan harga murah di Malaysia. Harga murah ini terjadi karena barang-barang kebutuhan pokok di subsidi oleh pemerintah Malaysia. Untuk akses informasi dan berita, masyarakat Sebatik lebih sering dan mudah mengakses acara-acara dari televisi Malaysia dibandingkan dengan televisi Indonesia, karena di daerah ini tidak ada satupun saluran televisi yang bisa ditangkap dengan jelas.

Problem-problem perbatasan di Indonesia ternyata tidak hanya terjadi jika kondisi wilayah Indonesia yang lebih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Di perbatasan wilayah Indonesia dan Papua New Guinea, dapat dikatakan kondisi Indonesia relatif lebih baik, namun ternyata tetap saja menyisakan masalah.

Konsulat Republik Indonesia saat ini tengah menangani masalah repatriasi warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Papua New Guinea pada tahun 1970-an yang jumlahnya mencapai ribuan, sama halnya dengan ribuan warga Papua New Guinea yang tinggal di wilayah Papua. Status mereka tidak jelas dan tidak diakui pemerintah mereka masing-masing. Akibatnya mereka tidak dapat menikmati pelayanan fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan¹⁸ di daerah tempat tinggal mereka, di daerah perbatasan.

Menilik paparan diatas, maka konsep perbatasan yang sejatinya berupa batas, memisahkan masyarakat perbatasan berdasarkan status warganegara yang berbeda, menjadi kabur. Masyarakat memperlakukan dan memerlukan wilayah perbatasan sebagai ruang aktivitasnya sehari-hari, tanpa ada batasan dan peraturan. Batasan akan akses terhadap sarana dan prasarana kehidupan berlandaskan hak dan kewajiban sebagai warganegara.

Penyelesaian Masalah Melalui Ruang Bersama

Dari dua bagian diatas, sedikit kesimpulan yang bisa ditarik adalah, negara menjadikan perbatasan sebagai isolasi interaksi komunitas dan kegiatannya dari komunitas dan kegiatan negara di seberangnya. Dari beberapa kasus di perbatasan yang telah dikemukakan diatas, sering menimbulkan polemik. Negara khawatir jika terlalu sering dan banyaknya masyarakat mengandalkan sarana dan prasarana yang ada di negara tetangga, kehidupan mereka akan lebih cenderung berorientasi kepada negara tetangga, sehingga apada akhirnya akan melunturkan kecintaan warganegara kepada tanah air.

Di pihak rakyat, nilai perbatasan yang sejatinya membatasi mereka, menjadi kabur. Karena kepentingan ekonomi sehari-hari, kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemenuhan keperluan hidup adalah prioritas utama mereka. Dengan konteks ini, daerah perbatasan tidak dapat semerta-merta dipahami sebagai batas pemisah negara (*state borders*).

Lalu, dapatkah kita mempertemukan dua pemahaman yang berbeda ini?

Diperlukan pemahaman yang lebih luas pada kondisi yang ada di wilayah dengan menimbang karakteristik kehidupan masyarakat yang ada didalamnya, yang mungkin saja dapat bergeser dari definisi perbatasan oleh negara. Wilayah perbatasan dapat dilihat sebagai pemukiman (*urban settlements*) yang berlokasi di wilayah batas.

Ketika kita memahami wilayah perbatasan sebenarnya adalah kota pemukiman, seperti kota-kota pemukiman lainnya di luar wilayah perbatasan, maka kita akan melihat adanya interaksi sosial, politik, ekonomi, etnik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari dalam satu ruang publik. Tanpa memandang batasan warganegara, tapi yang ada adalah satu ikatan etnis, ataupun ikatan kekeluargaan serta ikatan kepentingan kehidupan sehari-hari. Mengenali wilayah perbatasan dari sudut ini adalah mempelajari dan mengenali persoalan sosial, ekonomi, politik, etnis, agama, dan lain-lain dalam suatu ruang kota kehidupan dengan segala fasilitas kelengkapannya seperti pasar, stasiun, jalan, taman, rumah sakit dan lain-lain. Ruang bersama ini merupakan ruang untuk saling berinteraksi untuk kehidupan bersama, memenuhi kebutuhan hidup secara besama-sama.

Sebenarnya, jika kita dapat menilik sejenak hal-hal mengenai kerjasama ruang antar negara, pengelolaan ruang bersama antar negara telah dilakukan dalam bentuk lain, dalam berbagai contoh berikut.

Pertama, Timor Gap. Timor Gap atau disebut juga dengan celah Timor adalah daerah landas kontinen yang terletak antara Timor Leste dan Australia. Pada masa sewaktu Timor Leste masih menjadi salah satu propinsi di Indonesia, telah tercapai kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk eksplorasi minyak dan gas di wilayah ini. Pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatangani kesepakatan untuk batas dasar laut Timor, dimana kemudian ditetapkan bagian barat laut Arafura dan sebelah selatan Kepulauan Tanimbar. Perjanjian ini memperpanjang garis batas yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 1971¹⁹. Timor Gap menjadi wilayah yang strategis karena kandungan minyak bumi dan gas alamnya. Celah Timor merupakan salah satu dari enam kawasan yang memiliki cadangan minyak tergolong besar selain Timor Leste wilayah tengah, Venezuela, Mexico, Argentina dan Madagaskar. Cadangan minyak yang dikandung Celah Timor diperkirakan sekitar 5 miliar barrel dan endapan gas sekitar 50 miliar kaki kubik²⁰.

Kedua, Elang Kakatua. Ladang minyak ini relatif berukuran kecil, dieksplorasi oleh perusahaan perminyakan Conoco Philips. Ketika Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, pendapatan 50 juta Dollar AS yang dihasilkan dari ladang minyak ini dibagi antara Indonesia dan Australia. Setelah merdeka, Timor Leste menggantikan Indonesia dalam perolehan bagian tersebut.

Ketiga, Bayu Undan. Ladang yang juga di kelola oleh Conoco Phillips ini kaya akan cairan gas alam. Sejak mulai di produksi pada tahun 2004 dengan target pengembangan 20 tahun kedepan, Timor Leste diharapkan dapat memperoleh 1,8

milliar dollar AS.

Keempat, Greater Sunrise. Kandungan gas di Greater Sunrise ini dua kali lipat dibandingkan dengan yang ada di Bayu Undan. Dua puluh persen luas wilayah ladang ini berada dalam Wilayah Pengembangan Minyak Bersama, sedangkan sisanya yang 80% dikuasai Australia, walaupun di klaim pula oleh Timor Leste.

Kelima, Laminaria-Corralina. Wilayah ladang minyak yang di eksplorasi oleh Woddside ini terletak diluar Wilayah Pengembangan Minyak Bersama, tapi letaknya lebih dekat ke wilayah Timor Leste. Wilayah ini diklaim baik oleh Timor Leste, juga Australia.

Keenam, Kawasan Berikat. Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekrasan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Walaupun buka suatu daerah pengelolaan bersama, ataupun belum tentu terletak di kawasan perbatasan, melalui contoh ini yang akan diutarakan adalah bentuk perlakuan khusus yang diterapkan pada wilayah ini. Yang memungkinkan beberapa pembebasan bersyarat terhadap kegiatan memasukkan dan mengeluarkan barang. Termasuk pula ke dalam golongan ini adalah Kawasan Pabean. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Beberapa contoh diatas mengemukakan bahwa pengelolaan-pengelolaan ini lebih bersifat ekonomi, karena kita melihat secara langsung manfaat ekonomi dengan perolehan devisa negara yang besar yang didatangkan dari model pengelolaan seperti ini. Sumber alam minyak sampai masa sekarang merupakan satu-satunya sumber pembangkit tenaga untuk berbagai proses produksi dan konsumsi kegiatan manusia. Ketersediaan minyak dan keseimbangan energi serta distribusinya yang tidak merata di dunia, membuat minyak tampil sebagai salah satu komoditi yang sangat penting dan strategis secara ekonomi dan politik. Minyak dapat terkait dengan beberapa hal penting seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, orientasi kebijakan politik luar negeri dan perdagangan, pada suatu negara. Akibatnya, seluruh hal yang berkaitan dengan minyak dan gas akan menempati prioritas utama dalam hal-hal tersebut, baik itu bagi negara pengimpor maupun pengeksport.

Melalui sedikit contoh diatas, sebenarnya kita telah mempunyai pengalaman terhadap pengelolaan ruang bersama, dan relatif dapat dikatakan bahwa bentuk pengelolaan seperti ini mudah dilaksanakan, karena ada kepentingan ekonomi didalamnya. Pertanyaan berikutnya, dapatkah model pengelolaan ini diterapkan di bidang sosial dan budaya?

Pada bagian terakhir tulisan ini, mencoba mengemukakan pengelolaan ruang bersama yang memprioritaskan eksplorasi sumberdaya alam ataupun kegiatan ekonomi seperti contoh diatas, lalu ditransfer dalam bentuk pengelolaan bersama ruang untuk interaksi sosial dan budaya, selain tentu saja, bidang ekonomi pula. Kawasan yang dapat dikembangkan untuk Ruang bersama ini adalah Kawasan Perbatasan, atau bahkan mungkin Kawasan Penyangga Perbatasan. Kawasan yang telah ditetapkan secara jelas batas-batas wilayahnya, namun penduduk antar negara masih dapat saling berinteraksi, dan saling memanfaatkan kondisi kota yang relatif baik.

Pengembangan kawasan *duty free zone* pada perbatasan Malaysia dan Thailand di Bukit Kayu Hitam, dapat dijadikan ide awal. Disini tersedia suatu kawasan yang relatif besar, dimana semua orang dapat mengkases wilayah ini untuk berbelanja. Konsep seperti ini bisa saja kemudian dikembangkan menjadi suatu kota kecil yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti rumahsakit, sekolah, dan lain-lain. Dan dapat diperlebar menjadi kawasan pemukiman bagi para komuter yang bekerja di negara tetangga, sehingga membuat warganegara tidak perlu berdiam di negara tetangga.

Pemahaman ruang bersama ini diharapkan membantu mempercepat proses pengelolaan perbatasan pada tahapan keempat dalam Boundary Making Theory, yaitu tahapan administrasi. Kesadaran dan kerjasama kedua negara yang berbatasan sangat diperlukan. Hal ini dapat dimengerti karena untuk mengelola pembangunan, akan melibatkan multisektor dan perencanaan yang terintegrasi dari bidang-bidang seperti politik, pertahanan, keamanan, sosial, ekonomi, budaya, hukum, lingkungan hidup, sarana dan prasarana dan lain-lain. Pada tahap ini pula terjadi kerjasama bagi pembangunan wilayah perbatasan antara kedua negara untuk bidang-bidang tersebut diatas. Dan sekali lagi, pada tahap ini lingkaran pekerjaan sangatlah besar. Seluruh aspek pembangunan dan pemerintahan terlibat di dalamnya. Maka kerjasama pemerintah baik pusat dan daerah sangat diperlukan, mengingat bahwa sekarang di Indonesia berlaku Otonomi Daerah. Pada tahapan ini, pemerintah daerah dapat terlibat aktif di dalam pengelolaan perbatasan.

Bagi Indonesia hal ini akan langsung bersinergi dengan kebijakan pemerintah Indonesia sekarang yang mencoba mengubah paradigma yang pada masa dahulu menganggap bahwa daerah perbatasan adalah halaman belakang dan menangani permasalahan perbatasan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), menjadi paradigma baru yaitu daerah perbatasan adalah halaman muka negara yang harus dikelola dan ditampilkan sebaik mungkin dengan menonjolkan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Tidak ada lagi alasan bagi pemerintah setempat dan pemerintah negara yang bersangkutan untuk mengabaikan pembangunan di wilayah tersebut, karena pemerintah “terikat” untuk mengembangkan wilayah dalam kerangka kerjasama kedua negara.

SIMPULAN

Keberadaan garis batas menjadi hal sangat strategis terutama ketika terjadi konflik diantara negara yang berbatasan tersebut.

Secara tidak langsung, terdapat dua pemahaman mengenai wilayah perbatasan, secara formal bagi negara dan informal bagi penduduk perbatasan. Negara menjadikan perbatasan sebagai isolasi interaksi komunitas dan kegiatannya dari komunitas dan kegiatan negara di seberangnya. Di pihak rakyat, nilai perbatasan yang sejatinya membatasi mereka, menjadi kabur. Karena kepentingan ekonomi sehari-hari, kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemenuhan keperluan hidup adalah prioritas utama mereka.

Kondisi wilayah negara tetangga yang lebih pesat pembangunannya memperkuat kaburnya pemahaman perbatasan di pihak rakyat. Orientasi penduduk akan lebih condong ke wilayah yang lebih berkembang tersebut. Dan, satu negara tidak dapat mencegah fenomena seperti itu.

Sebagai jalan tengah, diutarakan pemanfaatan ruang bersama, dimana kegiatan yang berlangsung di wilayah tersebut diberikan perlakuan khusus. Rakyat masih dapat melakukan aktifitasnya secara normal sebagaimana kehidupan sehari-hari, negara pun “diamankan” kedaulatannya terhadap wilayah yang jelas serta status penduduk didalamnya. Ruang Bersama ini dapat mendorong keseriusan negara untuk mengelola ruang bersama karena alasan kewajiban sebagai wilayah kerjasama. Dengan demikian mendorong pula keseriusan pemerintah pada konsep pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Endnotes

- ¹ Teori yang dikemukakan oleh Stephen B Jones yaitu teori Boundary Making yang membagi ruang lingkup pengelolaan perbatasan ke dalam empat bagian: yaitu Allocation, Delimitation, Demarcation, dan Administration. Selanjutnya lihat dalam Stephen B Jones, *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, 1945
- ² Pengaturan Dalam Bidang Keamanan di Daerah-daerah Perbatasan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Pasal I ayat e, Yogyakarta, 3 Desember 1984.
- ³ L. Juda, *International Law and Ocean Management*, 1996, oleh Jacob Rais (mantan Senior Spatial Planning Advisor Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II USAID) *Wilayah Lautan: Common Property Dilemmas dan Warisan Umat Manusia*, dikutip dalam: *Gatra*, Edisi Khusus: *Di Laut Kita (Belum) Jaya*, No. 08 Tahun XII, Januari 2006, hal 20.
- ⁴ Jacob Rais (mantan Senior Spatial Planning Advisor Mitra Pesisir/Coastal Resources Management Project II USAID) *Wilayah Lautan: Common Property Dilemmas dan Warisan Umat Manusia*, dikutip dalam: *Gatra*, op.cit

- ⁵ Ir. Suwarno P Raharjo, M.Sc, *Problematika di Balik Manfaat yang Besar (Rangkuman Hasil Forum Komunikasi dan Koordinasi Batas Wilayah)*, dalam O.C. Kaligis & Associates, *Sengketa Sipadan-Ligitan Mengapa Kita Kalah*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003, hal 165.
- ⁶ *ibid*
- ⁷ Ir. Rudolf W. Matindas, M.Sc (kepala BAKOSURTANAL), *Masalah Delimitasi Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif dan Zona Perikanan Khusus dengan Australia dan Timor Leste*, disampaikan pada pertemuan “Apresiasi Kesepakatan Bilateral dan Multilateral” diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya Ikan, Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan 15 Januari 2002, dalam O.C. Kaligis & Associates, *Sengketa Sipadan-Ligitan Mengapa Kita Kalah*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003, hal 88.
- ⁸ Namun, perlu dicatat bahwa UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Pasal 2, menetapkan bahwa Wilayah Perikanan Indonesia juga meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- ⁹ Etty R Agoes, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara*, dalam O.C. Kaligis & Associates, *op.cit*, hal 67
- ¹⁰ *Ibid*, hal 69.
- ¹¹ Laksmana TNI AL Bernard Kent Sondakh, *Peran TNI Dalam Pemngamanan dan Pemberdayaan Pulau Terluar RI*, dalam O.C. Kaligis & Associates, *Sengketa Sipadan-Ligitan Mengapa Kita Kalah*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003, hal 83
- ¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, cetakan kesepuluh, 1999, halaman 98.
- ¹³ Misalnya Studi yang dilakukan oleh Depkimpraswil 2002, studi BAPPENAS 2004, dan studi Lemhanas 2004 dan LIPI. Juga dalam Ir. Florianus Nahak, MSi, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste (Pengalaman PemKab Belu)*, makalah pada Seminar Nasional Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta, tgl 18 November 2008. Lihat juga pada makalah yang disampaikan pada seminar yang sama oleh: Ganewati Wuryandari, Ph.D, *Wilayah Perbatasan RI-Timor Leste: Permasalahan dan Model-model Pengelolaan*. Begitu juga dalam Rohmad Supriyadi, MSi, *op cit*. Dan pada Ir. Suwarno P Raharjo, M.Sc, *Problematika di Balik Manfaat yang Besar (Rangkuman Hasil Forum Komunikasi dan Koordinasi Batas Wilayah)*, dalam O.C. Kaligis & Associates, *Sengketa Sipadan-Ligitan Mengapa Kita Kalah*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003, hal 166-169. Begitu juga dalam Kompas, *Perbatasan: Melongok Pintu Gerbang PNG di Vanimo*, 21 Desember 2008, hal 5.
- ¹⁴ Dikutip dari Mahmud Akil, *Fenomena Etnisitas di Kalimantan Barat Dalam Paulus*

- Florus dkk, *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*, Jakarta, LP3ES-Institut of Dayakologi Research and Development, Gramedia, 1994, hal 186, dalam Wahyuni Kartikasari, *Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia Studi Kasus Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjahmada, 1997, hal 26-27. serta Data statistik dalam *Year Book of Statistic 1993*, Sarawak. Juga dalam: Portal Rasmi Kerajaan Negeri Sarawak: <http://www.sarawak.gov.my/ms/about-sarawak/demographics>
- ¹⁵ Ganewati Wuryandari Ph.D, peneliti P2P-LIPI, Wilayah Perbatasan RI-Timor Leste: *Permasalahan dan Model-model Pengelolaan*, makalah pada Seminar Nasional Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta, tgl 18 November 2008.
- ¹⁶ Wahyuni Kartikasari, *Trafficking di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, Thesis, Program Studi Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2005, hal 8-9
- ¹⁷ Kompas on line, Edisi. 03/XXXVII/10 - 16 Maret 2008
- ¹⁸ Sutarwindargo, Pejabat Sementara Konsul RI di Vanimo PNG dalam Kompas, *Perbatasan: Melongok Pintu Gerbang PNG di Vanimo*, 21 Desember 2008, hal 5.
- ¹⁹ Tulus Warsito, DR, *Diplomasi Perbatasan*, Monograf, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008, hal 73-74
- ²⁰ Timor Gap Membidik Potensi Sumber Daya Alam Timor Lorosae, <http://www.hamline.com>, dalam Tulus Warsito, DR, *Diplomasi Perbatasan*, Monograf, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008, hal 76-78

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Hubungan Internasional Indonesia, *Lanskap Baru Politik Internasional, Proceeding Konvensi Nasional I Asosiasi Hubungan Internasional Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009
- Dino Patti Djalal, *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*, CSIS, Jakarta, 1996
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar negeri Republik Indonesia, *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*, 2001
- Florianus Nahak, Ir, MSi, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste (Pengalaman PemKab Belu)*, Makalah, Yogyakarta, 18 November 2008
- Gatra, Edisi Khusus: Di Laut Kita (Belum) Jaya, No. 08 Tahun XII, Januari 2006
- Hasjim Djalal, *Indonesia and The Law of The Sea*, CSIS, Jakarta, 1995
- Mustafa Abubakar, *Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan Belajar dari kasus Sipadan*,

- Ligitan dan Sebatik*, KOMPAS, cetakan 1, 2006
- O.C. Kaligis & Associates, *Sengketa Sipadan-Ligitan Mengapa Kita Kalah*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003
- Rohmad Supriyadi, MSi, *Strategi dan Model Pengelolaan Perbatasan*, Makalah, Yogyakarta, 18 November 2008
- Stephen B Jones, *A Handbook for Statesmen, Treaty Editors and Boundary Commissioners*, 1945
- Tempo, Edisi Khusus 60 Tahun Kemerdekaan: Merawat Indonesia, No. 25/XXXIV/15-21 Agustus 2005
- Tulus Warsito, DR, *Diplomasi Perbatasan*, Monograf, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008
- Wahyuni Kartikasari, *Hubungan Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia Studi Kasus Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjahmada, 1997
- Wahyuni Kartikasari, *Trafficking di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, Thesis, Program Studi Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2005

Model Pemerintahan Dunia: Perspektif Taqyuddin An Nabani

Abstract

This paper aims to analyzing the idea of world government by using Taqyuddin An Nabhani's perspective about world government. It argues that, according to Nabhani, a world government has its rooted on ideological belief system. And for Nabhani, the final form of world system can be understood based on Islam as an ideology. Historically, Islam as political ideology has run a genuine system called Khilafah Islamiyah.

Keywords: *world government, ideology, transnational political party*

Siti Muslikhati

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
email: sitimuslikhati@umy.ac.id

Gagasan tentang pemerintahan dunia adalah gagasan yang terkait dengan aktifitas mengintegrasikan unit-unit politik yang masing-masing berdaulat ke dalam satu unit politik baru yang juga berdaulat.¹ Secara teoritik dan praktis, kemampuan mengembangkan kerjasama di antara unit-unit politik atau negara-negara yang selama berabad-abad bermusuhan sangat menarik untuk dipelajari. Sementara fenomena sesudah PD II ditandai dengan adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan tradisional dalam perbandingan politik yang dianggap lebih mengkhususkan diri pada bentuk kebudayaan tertentu, yaitu Dunia Barat, di mana fokus kajiannya adalah pada lembaga-lembaga formal pemerintah dalam sistem di Negara Barat, sehingga kurang sensitif terhadap faktor-faktor dan proses-proses informal yang beroperasi di luar lembaga-lembaga formal pemerintah.² Kajian tentang perbandingan politik yang menurut Harry Eckstein berlangsung cepat sekali, khususnya melalui studi intensif terhadap sistem negara non-Barat, telah menyebabkan perhatian diletakkan pada peran politik kelompok-kelompok sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai beserta kesadaran politik, loyalitas, dan identifikasi.³

Tulisan ini berusaha untuk menampilkan

perspektif Islam tentang pemerintahan dunia, yang dimungkinkan untuk makin memperkaya diskursus tentang masalah tersebut. Karena sangat luasnya perspektif Islam, akibat dimungkinkannya variasi pendapat dalam Islam, maka perspektif Islam yang ditampilkan dalam tulisan ini lebih dibatasi pada pemikiran salah seorang pemikir Islam, yaitu Pemikiran Taqyuddin An Nabhani. Pemikiran Taqyuddin An Nabhani dipilih dengan pertimbangan dialah penggagas berdirinya partai politik transnasional, Hizbut Tahrir, yang pada awal abad ke-21 ini bersuara sangat nyaring tentang ide Khilafah Islamiyah. Bagi penulis, gagasan Kekhilafahan ini menarik karena merupakan alternatif model bagi pemerintahan dunia.

Untuk mengetahui pandangan Islam An Nabhani tentang pemerintahan dunia, tulisan ini dibagi menjadi 4 sub judul, yaitu pertama tentang signifikansi pemerintahan dunia. Kedua, tentang dasar yang bisa dipakai untuk mengikat masyarakat dunia. Ketiga, tentang peluang bagi Islam untuk menjadi pengikat masyarakat dunia tersebut. Dan keempat baru dipaparkan tentang model pemerintahan dunia dalam perspektif Islam.

A. Signifikansi Pemerintahan Dunia

Sebagaimana makhluk hidup yang lain, manusia adalah jenis makhluk yang hidup dalam kesatuan kolektif. Manusia disebut sebagai *homo-socius*, yang selalu hidup dalam masyarakatnya. Menurut Taqyuddin An-Nabhani, kecenderungan ini merupakan hal yang alami dan bersifat naluriah.⁴ Para ahli antropologi budaya dan sosiologi memaparkan tentang berlangsungnya kehidupan kolektif dalam dunia manusia, yang dibedakan dari kehidupan kolektif binatang oleh unsur akal. Akal inilah yang memungkinkan manusia mampu mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas kehidupan, sekaligus menghasilkan pola-pola kolektif manusia yang senantiasa berubah dan berkembang.⁵

Integrasi yang didefinisikan sebagai “membentuk bagian-bagian menjadi suatu kesatuan”⁶, bisa dipahami sebagai wujud dari kebutuhan akan kehidupan kolektif tersebut. Masyarakat adalah wujud kehidupan kolektif yang kompleks karena di situlah tempat bagi sekelompok manusia untuk untuk mengejar berbagai kemanfaatan (*kemashlahatan*) kehidupan dengan jalan berinteraksi secara terus-menerus, berdasar kesatuan pemikiran, perasaan (emosi) dan peraturan (sistem) tertentu.⁷ Talcott Parsons dan A.L. Kroeber menyatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan individu yang melahirkan kebudayaan, di mana di dalam masyarakat tersebut, interaksi merupakan unsur kebudayaan yang disebut sebagai *activities* atau *social system*, sementara persepsi, emosi dan sistem adalah unsur kebudayaan yang disebut sebagai *ideas* atau *cultural system*.⁸ Masyarakat akan selalu terbangun sesuai dengan ketiga elemen *ideas* di atas, yaitu pemikiran, perasaan dan peraturan.

Dari awal catatan sejarah, manusia berkumpul bersama-sama untuk menghadapi tantangan alam yang hidup maupun yang mati secara kolektif. Idealnya kondisi yang

ada dalam kehidupan bersama harus selalu berkesinambungan dan berkembang, sehingga semua peserta yang terlibat, melalui tindakan-tindakan kolektifnya, bisa mempermudah transaksi di antara mereka dan memperoleh keuntungan/manfaat yang setara dan terus meningkat. Apalagi bila pokok persoalannya dianggap lebih efisien bila ditangani secara kolektif daripada secara kompetitif.

Hubungan masyarakat dengan politik digambarkan oleh Aristoteles dengan menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Seperti halnya aristoteles, An-Nabhani juga melihat politik sebagai sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia.⁹ Politik pada esensinya berbicara tentang bagaimana permasalahan-permasalahan manusia (konflik-konflik kepentingan di antara manusia) di dalam kehidupan bersama bisa diselesaikan dengan cara-cara yang adil, cara-cara yang bisa diterima oleh warga masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh G.K. Robert & Jill Lovecy, sebagai berikut: *The fundamental problem of politics is concerned with the question of how members of community are to live together peaceably and resolve their differences in an acceptable manner.*¹⁰ Akal adalah atribut yang membedakan manusia dari segala jenis binatang. Menurutnya manusia harus memperkuat keterlibatannya dalam politik supaya sempurna perkembangan potensi rasionalnya.¹¹

Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa *power* adalah bagian tak terpisahkan dari tindakan politik meski mereka belum sepakat tentang definisi konsep ini.¹² Hubungan antara masyarakat, politik dan negara bisa dilukiskan dengan ungkapan “di mana ada asap di situ ada api”. Di mana ada masyarakat, di situ ada politik. Di mana ada politik di situ ada *power* (kekuasaan). Di mana ada *power* di situ ada pemerintah. Keputusan pemerintah akan mempengaruhi tidak hanya pemerintahan, tetapi banyak sekali hal dalam kehidupan manusia ; ekonomi, pendidikan, pergaulan, bahkan cuaca.

Menurut Aristoteles, kemunculan negara tidak bisa dipisahkan dari watak politik manusia.¹³ Negara merupakan komunitas sosial seutuhnya, yang merupakan perluasan dari keluarga, klen dan suku. Negara biasanya terdiri dari institusi-institusi formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Negara berkembang sebagai akibat berkembangnya kepentingan dan kebutuhan individu. Prinsip yang menuntun pertumbuhannya adalah pengembangan pranata yang semakin terinci dan esensial untuk memenuhi sifat unik dan paling menonjol pada diri manusia, yaitu akal. Dengan demikian, negara adalah perkembangan alamiah dari kualitas manusia, baik fisik maupun intelektualnya. Menurut Aristoteles, partisipasi dalam politik negara merupakan cara yang paling lengkap untuk menyalurkan kemampuan intelektual seseorang.¹⁴

Simbol yang paling tampak dari suatu negara adalah pemerintah. Pemerintah merupakan lembaga politik yang resmi. Negara lewat pemerintahnya, lebih mampu secara sah dan efektif memberlakukan seperangkat norma dan aturan yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di antara warganya. Yang menonjol di dalam pemerintah biasanya adalah kepala eksekutifnya. Namun karena tidak ada

kepala eksekutif yang bisa memikul semua tanggung jawab tanpa bantuan pegawai yang mengurus bidang politik dan administratif, maka pemerintahan menjadi sangat kompleks. Studi proses eksekutif kemudian mengisi sebagian studi tentang birokrasi.¹⁵

Kebutuhan akan adanya pemerintahan dunia, sebenarnya mengikuti logika umum tentang kebutuhan akan adanya pemerintahan dalam sebuah masyarakat. Meningkatnya kecepatan melakukan perjalanan, dan saling berkaitnya perekonomian, informasi dan politik internasional sebetulnya telah menjadikan manusia di seluruh dunia menjadi suatu komunitas yang saling berinteraksi. Ada kebutuhan akan adanya sistem sosial dunia dalam masyarakat global. Mengikuti persyaratan yang diajukan oleh Marion Levy, efektifitas pembentukan masyarakat dunia membutuhkan adanya komunitas yang namanya negara dunia (*world government*)¹⁶, yang biasanya merupakan pusat kajian bidang-bidang studi yang mempelajari *world politics* (politik dunia) atau hubungan internasional.¹⁷

B. Ideologi Sebagai Dasar Ikatan Masyarakat Dunia

Di atas sudah disebutkan bahwa masyarakat selalu dipandu oleh pemikiran-pemikiran politik tertentu. Tingkat tertinggi dari pemikiran politik adalah pemikiran yang berhubungan dengan urusan umat manusia di dunia dari sudut pandang tertentu. Pemikiran politik seperti inilah yang akan melahirkan kesadaran politik, yaitu pandangan yang universal (mencakup seluruh dunia internasional) dengan sudut pandang yang khas.¹⁸ Tingkat tertinggi dari pemikiran politik inilah yang oleh An-Nabhani disebut sebagai ideologi (*mabda'*).

Masyarakat dunia adalah masyarakat yang sangat kompleks, sehingga perlu dibangun berdasar pemikiran politik yang berangkat dari cara pandang yang universal. Menurut An Nabhani, masyarakat dunia akan sulit terbentuk, manakala dibangun berdasar hal-hal yang sifatnya kodrati/alamiah¹⁹ dan temporal²⁰. Ikatan-ikatan tadi tidak akan melahirkan kesadaran politik, karena ketika manusia berupaya untuk memahami bagaimana memelihara urusannya tidak didasarkan pada pandangan yang universal atau bertolak dari sudut pandang yang khas. Oleh karena itu ikatan-ikatan tersebut sulit untuk menyatukan manusia secara global. Ikatan yang mampu menyatukan manusia secara global adalah ikatan yang dibangun atas pemikiran yang mendasar dan menyeluruh tentang manusia, alam dan kehidupan (*aqidah aqliyah*), yang dari pemikiran ini terlahir sistem (aturan) kehidupan yang komprehensif (*nidzom*). Ikatan inilah yang oleh An Nabhani disebut sebagai ikatan ideologi (*mabda'*).²¹

Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani *idea* dan *logos*, yang berarti pengetahuan tentang gagasan. Ide dan ideologi memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Robert A. Haber mendefinisikan ideologi sebagai:

an intellectual production has several elements: (1) a set of moral values, taken as absolute, (2) an outline of the 'good society' in which those values would be realized, (3) a systematic criticism (or.... Affirmation) of the present social arrangements and an

*analysis of their dynamics, (4) a strategic plan of getting from the present to the future.*²²

Sementara Joseph La Palombara mengartikan ideologi sebagai: *involves a philosophy of history, a view of man's present place in it, some estimate of probable lines of future development, and a set of prescriptions regarding how to hasten, retard, and / or modify that developmental direction.*²³ Dari dua definisi tersebut bisa dipahami bahwa ideologi adalah sistem ide yang berisi apa yang seharusnya terjadi (normatif-ideal), apa yang sedang terjadi (realitas) dan bagaimana mengubah realita yang ada menjadi kondisi yang sesuai dengan normatif-idealnya.

Mabda' dalam bahasa Arab, berasal dari kata *bada'a - yabda'u - bad'an wa mabda'an* yang artinya memulai. Menurut istilah, *mabda'* berarti pemikiran yang mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang lain.²⁴ Taqyuddin An Nabhani merumuskan ideologi (*mabda'*) sebagai *aqidah aqliyah* (pemikiran mendasar dan menyeluruh tentang manusia, alam dan kehidupan) yang memancarkan sistem kehidupan (berupa aturan yang berisi *problem solving* masalah-masalah kehidupan dan bagaimana cara menerapkan, cara mempertahankan dan menyebarluaskan jenis penyelesaian masalah tersebut).²⁵

Sebuah masyarakat akan maju seiring dengan majunya pola pikir, emosi dan sistemnya, dan akan mundur dan terbelakang bila ketiga elemen tadi juga mundur. Ketiga elemen tadi dikatakan maju bila dibangun atas satu *qa'idah fikriyah* (paradigma berpikir). *Qa'idah fikriyah* ini harus berupa *aqidah aqliyah* yang memberikan *fikrah kuliyyah* (ide universal, *weltanschauung*, *world view*) tentang alam semesta, manusia dan kehidupan sehingga *fikrah* tadi layak dijadikan pijakan awal bagi semua sub-pemikiran dan menjadi fondasi sistem yang dilahirkannya.

C. Kekuatan Islam Sebagai Ideologi

Secara etimologi, Islam berasal dari kata kerja *aslama* yang berarti berserah diri, menunaikan perintah, damai, keselamatan, kesejahteraan, dan bersih dari pencemaran. Dari pengertian ini, Islam dipahami sebagai ajaran yang menyelamatkan dan menyejahterakan. Juga dimaknai sebagai penyerahan diri secara sukarela kepada kehendak Ilahi dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadaNya, serta mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. (Q.S. 2:128; 2:132 dan 208; 3:19, 85, 102). Penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah akan menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. (Q.S. 2:112) Hal ini untuk menunjuk Islam sebagai suatu sistem ajaran yang sempurna yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang terakhir.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam memuat ajaran tentang *aqidah aqliyah* (pandangan tentang dunia yang didapat dengan mengerahkan pemikiran) dan sekaligus Islam memuat ajaran tentang sistem kehidupan (*nidzom*), yang menjelaskan bagaimana permasalahan-permasalahan dunia diselesaikan. Islam adalah ajaran spiri-

tual sekaligus politik. Islam adalah agama sekaligus ideologi.²⁶

Ideologi Islam berbeda dengan ideologi yang lainnya, karena aqidah Islam menawarkan sebuah pemikiran yang rasional sekaligus sesuai dengan *fitrah* (kodrat-kodrat) yang ada pada manusia. Aqidah Islam, sebagai fondasi ideologi Islam, melalui konsep *tauhid* (mengesakan Allah sebagai pencipta dan pengatur) mampu untuk membebaskan manusia dari belenggu penghambaan dan penindasan sesamanya. Dan inilah hakekat atau makna sesungguhnya dari kebebasan. Dengan konsep tauhid ini, dalam kehidupan manusia, tidak ada yang layak ditakuti kecuali hanyalah Allah. Pembebasan ini, karena dalam kerangka transendensi, maka tujuannya adalah untuk memuliakan manusia (*humanisasi*). Islam akhirnya menjadi agama untuk seluruh alam (QS. 5:3, 21:107). Pada kemuliaan manusia inilah masyarakat mengecap kebangkitan yang benar.

Berbeda dengan ideologi lain, yang tidak mengakui eksistensi Tuhan sebagai pengatur, kemudian menjadikan akal manusia sebagai sandaran pembebasan manusia di dalam pengaturan kehidupannya. Menjadikan akal manusia sebagai sandaran di dalam pengaturan justru merupakan tindakan tidak rasional, karena tidak pernah membawa kepada kondisi pembebasan yang sesungguhnya. Ideologi itu justru membawa manusia pada kondisi dehumanisasi.

Di dalam Islam, negara beserta pemerintahannya didirikan atas prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan dalam Al Qur'an dan Sunnah Rosul SAW. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena Dia yang telah menciptakannya. Maka menurut keimanan seorang muslim, hanya Allah yang harus ditaati. Orang hanya bisa ditaati bila Allah memerintahkannya. Prinsip kedua adalah Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi dalam rangka membimbing umat manusia pada segala bidang kehidupannya. Orientasi kehidupan manusia seharusnya adalah melaksanakan peraturan-peraturan-Nya, bukannya membuat hukum-hukum baru.²⁷

Menurut An-Nabhani, Negara Islam adalah suatu negeri yang menerapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya (untuk menerapkan hukum Islam dan untuk mempertahankan negeri dari serangan musuh) berada di tangan kaum Muslimin. Negara Islam adalah suatu lembaga eksekutif yang menjalankan hukum-hukum syara' secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang merupakan pilar eksistensi Islam dalam kehidupan.²⁸ Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar. Yang tertinggal hanyalah Islam sebagai upacara ritual dan sifat-sifat akhlak semata. Karena itu, negara Islam harus senantiasa ada. Sedangkan yang dimaksud dengan negara kafir (*Daar Al-Kufr*) adalah suatu negeri yang menerapkan hukum-hukum selain hukum Islam dan keamanannya di tangan kaum selain muslim, walaupun mayoritas penduduknya adalah kaum Muslimin.

Sedangkan pemerintahan (*al hukmu / al mulku / as sulthon*) adalah kekuasaan

yang melaksanakan sistem kehidupan, berupa hukum dan aturan. Kekuasaan ini tampak dan tercermin pada salah seorang di antara warga masyarakat, yaitu pemimpin (*amir*). Sehingga pemerintahan biasanya terkait dengan aktifitas kepemimpinan, di mana kekuasaan dipergunakan untuk menjalankan pelayanan terhadap urusan masyarakat, mencegah terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan. Dengan ungkapan lain, pemerintahan bisa disebut kepemimpinan dalam kekuasaan (*wilayatul amri*).²⁹

Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat dan kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi Islam. Posisi aqidah dalam sistem ajaran Islam sangatlah sentral. Aqidah Islam yang terangkum dalam dua kalimat syahadat, yaitu mengesakan Allah SWT sebagai pencipta dan pengatur kehidupan serta mengakui kerosulan Muhammad (SAW) adalah dasar dari pandangan dunia Islam, yaitu kerangka pandang Islam dalam melihat dan menyikapi realitas, dalam memandang persoalan teologis (ketuhanan), kosmologis (alam), maupun antropologis (manusia). Bahkan lebih jauh melakukan perubahan kemasyarakatan berdasarkan cita-cita etik dan profetik dari konsepsi syahadat tersebut.

Keberadaan Aqidah Islam sebagai asas bagi negara dan pemerintahan ini tampak sejak Rosulullah berhasil membangun sebuah pemerintahan di Madinah, serta memimpin langsung pemerintahan di sana.³⁰ Ada berpuluh-puluh ayat Al Qur'an yang menyangkut masalah kekuasaan dan pemerintahan turun pada periode ini, yang sebelumnya belum diturunkan. Keseluruhannya memerintahkan kaum muslimin agar menjalankan pemerintahan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, dan pada saat yang sama melarang untuk mengikuti selera manusia semata. (QS 5: 48-49, 4: 65). Rosul, dan para penggantinya dalam bidang pemerintahan, menjadikan dua kalimat syahadat sebagai asas kehidupan bagi kaum muslimin dan asas dalam berhubungan dengan sesama manusia. Rosul juga menjadikan syahadat sebagai dasar pijakan untuk mencegah terjadinya tindak kedzaliman dan menyelesaikan persengketaan.

D. Khilafah Islamiyah Sebagai Bentuk Pemerintahan Dunia Islam

Sebagaimana sudah dipaparkan di atas, bahwa pemerintahan adalah pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan di tengah-tengah manusia. Keseluruhan hukum yang diturunkan oleh Allah berfungsi untuk memberikan pengaturan bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, Allah SWT mewajibkan kaum muslimin untuk menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan dan agar mereka bertahkim (berhukum) hanya kepada Islam, serta agar konstitusi dan seluruh perundang-undangan mereka – yang merupakan hukum-hukum syara' – bersumber dari Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya. Sesuai dengan konsepsi Tauhidnya, Islam telah membatasi bentuk kekuasaannya, yaitu pemerintahan yang menjalankan

hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Sekaligus Islam melarang berhukum pada hawa nafsu (akal dan perasaan-perasaan manusia semata). Hal ini bisa dipahami dari Qur'an surat Al Maidah ayat 48 dan 49.

Inilah yang merupakan pilar utama sistem pemerintahan Islam, di mana kedaulatan (*as siyadah*) adalah milik Allah, bukan milik rakyat.³¹ Yang dimaksud dengan kedaulatan adalah yang menangani atau menjalankan kehendak atau aspirasi tertentu. Kehendak seorang muslim atau umat, tidak diatur oleh dirinya sendiri atau umat, melainkan diatur oleh Allah SWT dengan seluruh perintah dan larangan-Nya. Ketaatan manusia sudah selayaknya diberikan hanya kepada Allah sebagai penciptanya. Ini adalah tindakan manusia yang rasional. Banyak dalil yang secara tegas menjelaskan bahwa kedaulatan ada di tangan Allah, ditentukan oleh syari'at Islam, bukan di tangan umat / rakyat.

Oleh karena itu setiap kekuasaan yang menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah; atau yang menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan As-Sunah, berarti pemerintahan tersebut merupakan Pemerintahan yang Islami dan *Syar'i* (yaitu pemerintahan yang sesuai menurut pandangan syara'). Bagi An Nabhani, sistem pemerintahan Islam dengan pilar utama ini yang mampu menjamin bahwa permasalahan manusia bisa diselesaikan dengan cara yang adil dan harmonis. Cara-cara penyelesaian seperti ini tidak hanya mampu menciptakan perdamaian di dunia, tetapi sekaligus bernilai plus karena bisa menjadi bekal pertanggungjawaban manusia sesudah kehidupan dunia.

Keadilan adalah prasyarat untuk menciptakan perdamaian. Sebagaimana diungkapkan oleh John C. Raines, bahwa: *If you want peace, work for justice. And if you want to work for justice, understand how power (economic, political and military power) works, how structural violence works. The opposite of peace is violence and the structural violence is so effective in its destruction.*³² Keadilan adalah sesuatu yang sulit sekali didapatkan pada standar-standar yang dibuat manusia, karena saratnya manusia dengan kepentingan dan terbatasnya manusia untuk memahami hakikat kehidupan dan hakikat dirinya sendiri. Keadilan yang mensyaratkan tidak terjadinya kontradiksi antara satu dengan yang lain hanya mungkin didapatkan standarnya dari pencipta manusia dan kehidupan, yaitu Allah SWT.

Pendapat yang senada bisa dilihat pada apa yang dikemukakan oleh Ibrahim Ibnu Sulaiman Al Nugaimasy, Atase Agama Hadimul Haramain Saudi Arabia. Dia mengemukakan persyaratan untuk menciptakan perdamaian abadi bagi kehidupan di dunia dan akhirat, yaitu pertama, dengan keikhlasan untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, selalu menerapkan perintah dan aturannya (syariat-Nya) pada umat manusia. Ketiga menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Berikutnya adalah berbuat adil terhadap rakyat.³³ Jihad tidak bertentangan dengan perdamaian karena jihad pada jalan Allah adalah cara / metode, bukan tujuan. Jihad adalah cara untuk menda-

patkan tujuan yang mulia, yaitu memberikan perasaan damai dengan melepaskan penghambaan manusia terhadap makhluk menuju kepada penghambaan pada Tuhan.

Taqyuddin An Nabhani kemudian menggambarkan tentang bentuk sistem pemerintahan Islam. Menurutnya, Islam juga telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk sistem pemerintahan dengan sistem *Khilafah* dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi *Daulah Islam*.³⁴ Khalifah atau Imam adalah orang yang diangkat oleh rakyat untuk memegang fungsi-fungsi pemerintahan. Meskipun kedaulatan adalah di tangan Allah, tetapi kekuasaan adalah jabatan manusiawi, sehingga perlu melibatkan masyarakat /umat di dalam berbicara tentang penguasa dan kekuasaan.

Sementara metode untuk mengangkat penguasa dalam tubuh kaum muslimin bisa dikembalikan sejak masa Rosul. Di mana hijrah Rosul dari Mekah ke Madinah, seperti yang diungkapkan oleh H.A.R. Gibb, bisa dilihat sebagai *starting point* transformasi menuju era baru dalam kehidupan Muhammad SAW dan penerusnya. Di Madinah, Muhammad SAW menempati posisi yang unik, di mana Beliau sebagai seorang nabi/rosul yang menjadi pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, namun sekaligus juga sebagai pemimpin pemerintahan Islam yang pertama.³⁵ Posisi yang pertama sudah didapatkannya langsung dari pengangkatan Allah ketika Muhammad berusia 40 tahun. Sementara posisi yang kedua didapatkan dari penyerahan umat/masyarakat muslim lewat *bai'at* (pernyataan sumpah setia)³⁶, pada Bai'at Aqobah I dan II. Posisi kedua ini bukan didasarkan pada pengangkatan dari Allah. Peristiwa bai'at ini terjadi menjelang peristiwa hijrah Pada posisi kedua inilah terjadi estafet kepemimpinan kaum muslimin kepada para *khalifah*, di mana hal ini tidak terjadi pada posisi pertama karena kenabian berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, lewat *ijma'* (kesepakatan) para Shahabat Nabi, kita bisa melihat bahwa cara pengangkatan khalifah adalah dilakukan oleh umat dengan cara bai'at.

Estafet kepemimpinan pada posisi kepala pemerintahan ini memang harus terjadi. Karena kehidupan bersama manusia sangat membutuhkan pelayanan terhadap urusannya. Keberadaan kepemimpinan adalah keharusan mutlak. Oleh karena itu umat tidak boleh vakum dari keberadaan seorang pemimpin. Para shahabat Nabi sepakat untuk tidak boleh terjadi kevakuman lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan pada peristiwa pertemuan di balai Saqifah Bani Sa'idah guna membahas pengangkatan *khalifah* (pengganti) Rosulullah semenjak terdengar kabar wafatnya Nabi. Perdebatan pada pertemuan itu berlangsung selama dua malam tiga hari sampai mereka berhasil membai'at Abu Bakar.

Berdasarkan hal ini, maka setiap pemerintahan maupun kekuasaan yang berdiri atas dasar sistem *Khilafah* dan atau yang di dalamnya berlaku pengangkatan *Khalifah* dengan cara *bai'at* dan menjalankan sistem (hukum) dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, berupa Kitab dan As-Sunah maka pemerintahannya itu adalah pemerintahan/kekuasaan Islami yang syar'i. Begitu juga setiap *Khalifah* yang diangkat

oleh kaum muslimin dan dibai'at atas dasar sikap ridha (tanpa ada paksaan), maka ia dianggap sebagai *Khalifah* yang syar'i dan wajib ditaati.

Meskipun kekuasaan dalam pemerintahan Islam dikendalikan oleh institusi tunggal yang namanya Khalifah, Islam menghindarkan terjadinya otoritarianisme dengan menetapkan mekanisme untuk mencegah terjadinya kesewenangan penguasa. Jabatan khalifah adalah jabatan *bashariyyah* (kemanusiaan), bukan jabatan *ilahiyah* (ketuhanan). Khalifah adalah pemimpin manusia, dan dia sendiri juga seorang manusia, yang memiliki karakter-karakter kemanusiaan yang jauh dari sifat sempurna dan *maksum* (terjaga). Oleh karena itu, Islam memahami bahwa pemimpin tetap memiliki kemungkinan untuk lupa dan salah. Dalam kerangka ini, Allah SWT telah mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada penguasa, dengan ketaatan yang tidak mutlak, sedikit berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rosul-Nya, kemudian memerintahkan mereka untuk senantiasa mengawasi dan mengoreksi tingkah laku penguasa. Allah SWT memerintahkan kaum muslimin dengan perintah yang tegas agar mengawasi para penguasa dan meluruskan langkah-langkahnya apabila mereka tidak memperdulikan hak-hak dan urusan rakyat, atau tidak menunaikan kewajibannya terhadap rakyat, atau melalaikan salah satu urusan rakyat, menyalahi salah satu hukum Islam, serta tidak menjalankan urusan pemerintahannya berdasarkan apa yang diturunkan Allah SWT.

Oleh karena itu seorang *Khalifah* tidak dapat diberhentikan oleh umat, walaupun umat memiliki hak untuk memilih dan mengawasi serta menasehatinya. *Khalifah* diberhentikan oleh ketentuan hukum syara semata, yaitu apabila ia menyalahi hukum syara yang jenis kesalahan mengharuskan untuk diberhentikan. Pemberhentiannya dilakukan melalui (keputusan) *Mahkamah Madzhalim*.

Tentang cakupan sistem pemerintahan Islam, kemudian digambarkan bahwa Islam adalah agama yang mampu mempersatukan umat manusia dalam sebuah institusi politik-formal yang paripurna. Sebab, Islam sejak awal telah mengikis habis paham primordialisme, bahkan mencanangkan perang terbuka terhadapnya. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan Islam yang pertama terungkap dalam sebuah dokumen yang terkenal yang disebut "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah". Dalam dokumen tersebut terdapat langkah pertama dan amat penting bagi terwujudnya sebuah badan pemerintahan dunia. Menurut Piagam itu, konsep suku tentang pertalian darah digantikan dengan ikatan iman yang bersifat ideologis.³⁷

Ada beberapa perbedaan antara negara Islam dan negara sekular. Negara sekular modern harus memiliki tiga segi, yaitu harus berdaulat penuh, menjadi nasional dan mempunyai wilayah yang jelas batasannya. Apabila ada ketiga segi itu maka sebuah negara dapat secara sah menyatakan dirinya sebagai negara yang berdaulat. Sebuah negara Islam, tidak berdaulat penuh, karena atribut tersebut hanya dapat digunakan pada Allah. Dia juga bukan negara nasional, karena dasar pengikat masyarakat muslim adalah keimanan dan terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai suku, ras

dan lingkungan yang berbeda. Sebuah negara Islam adalah negara multinasional. Dan yang ketiga bukan merupakan negara wilayah, karena bercita-cita menjadi negara universal.³⁸

Dengan semangat memberantas primordialisme ini bisa dipahami bahwa sistem pemerintahan *Khilafah Islam* adalah berbentuk kesatuan. Kaum muslimin di seluruh dunia tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu *Daulah Islam*. Mereka tidak diperkenankan pula mengangkat lebih dari satu *Khalifah*, yang menerapkan atas mereka Kitabullah dan Sunah Rasulullah, yaitu syari'at Islam. *Khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.³⁹ Karena dalil syar'i telah menentukan kesatuan *Daulah Islam* dan tidak boleh memiliki lebih dari satu negara/pemimpin.

Terkait dengan ide persatuan kaum muslimin ini, pemikiran Taqyuddin An Nabhani bukanlah pemikiran yang asing. Di Dunia Islam telah muncul gerakan pemikiran yang bernama Pan-Islamisme (*al jama'ah al islamiyah*), meskipun An Nabhani sendiri menolak menyebut pemikirannya sebagai bagian dari ide Pan-Islamisme.⁴⁰ Gerakan pemikiran Pan-Islamisme berawal dari ide Sultan Hamid II dan Jamaluddin al Afghani. Bagi Sultan Hamid II, Pan-Islamisme ini diperuntukkan sebagai media mempersatukan seluruh umat Islam terutama dalam menghadapi berbagai tantangan kekuatan asing. Ide Pan-Islamisme melahirkan lembaga khilafah Utsmaniyah.⁴¹ Pan Islamisme ini melahirkan prinsip loyalitas kepada khalifah Utsmani, sebagai kepala negara Islam yang paling kuat dan dianggap paling berwenang untuk mengkoordinasikan kekuatan-kekuatan politik umat Islam.⁴²

Sedangkan bagi Jamaluddin al Afghani, Pan-Islamisme bertujuan untuk menegakkan persatuan seluruh umat Islam, di bawah satu pemerintahan Islam, yang dikepalai oleh seorang khalifah yang berkuasa sepenuhnya.⁴³ Jamaluddin menginginkan dunia Islam seperti pada jaman keemasan Islam dahulu, sebelum dijajah oleh Kolonialisme Barat. Bagi al Afghani, asosiasi politik yang diberi label *al-Jami'ah al-Isamiyah* (Pan-Islamisme) itu harus meliputi seluruh umat Islam dari segala penjuru dunia, baik yang berada dalam negeri-negeri yang sudah merdeka maupun yang masih dalam jajahan. Ikatan tersebut didasarkan pada aqidah Islam yang bertujuan: *pertama*, menentang sistem pemerintahan yang despotik serta absolut; *kedua*, menentang kolonialisme dan dominasi Barat⁴⁴

E. Kesimpulan

Misi diturunkannya wahyu lewat perantara para Nabi dan Rosul adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan pengaturan dalam kehidupannya. Jika pada umumnya nabi atau rosul itu diturunkan untuk menyelesaikan masalah sebuah kaum tertentu, dan untuk masa tertentu, maka masa berlaku *problem solving* seperti itu berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dia diutus untuk seluruh

umat manusia dan sepanjang masa.

Dari masa kenabian Muhammad itu juga, bisa diamati bahwa Islam yang dibawanya adalah unik. Islam merupakan ajaran spiritual, yang ditunjukkan dengan pembawanya adalah orang yang diangkat oleh Allah sebagai nabi/rosul. Di sisi lain, Islam juga merupakan ajaran politik (siasiyah), yang ditunjukkan dengan adanya kepemimpinan dunia (*ulil amri*) di tangan seseorang yang diangkat oleh umat manusia sebagai kepala pemerintahan. Gambaran yang sempurna tentang Islam ditunjukkan pada masa Madinah, di mana Muhammad SAW menduduki posisi unik sebagai nabi yang diangkat oleh Allah, sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang diangkat oleh umat lewat bai'at aqobah menjelang peristiwa Hijrah ke Madinah terjadi. Wafatnya Muhammad SAW menunjukkan berakhirnya masa kenabian, tetapi tidak demikian dengan masa pemerintahan. Karena terjadi ijma' shahabat (para shahabat Nabi bersepakat) tentang permasalahan penting kaum muslimin yaitu kebutuhan akan kepemimpinan dalam pemerintahan.

Karena Islam bersifat universal, dalam makna bahwa Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sepanjang masa, maka An Nabhani berpendapat bahwa Sistem Pemerintahan Islam layak ditawarkan sebagai model pemerintahan dunia.

Endnotes

- ¹ Lihat definisi integrasi internasional yang dikemukakan oleh Ernest B. Haas dalam karyanya *The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-57* (Stanford: Stanford Univ. Press, 1958), hal. 16.
- ² Roy C. Macridis and Bernard E. Brown, *Comparative Politics: Notes and Readings* terj. Henry Sitanggang (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), hal. 3-5.
- ³ Harry Eckstein and David Apter, eds. *Comparative Politics: A Reader* (New York: Free Press, 1963), hal. 23.
- ⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Ad-Daulah Al-Islamiyah* (Beirut: Daarul Ummah, 1994), hal. 52.
- ⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hal. 136. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 370.
- ⁶ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES, 1990), hal. 153.
- ⁷ Taqyuddin An Nabhani, *Dukhul Mujtama'* (Terbitan Hizbut Tahrir, 1958), terj. Abu Falah, hal. 6..
- ⁸ *Ibid.*, hal. 186-190.
- ⁹ *Ibid.*, hal. 10.
- ¹⁰ G.K. Robert & Jill Lovecy, *West European Politics Today* (Manchester Univ. Press, 1984), hal. 7.
- ¹¹ Carlton Clymer Rodee, dkk., *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1993),

- hal. 3.
- ¹² Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (LP3ES, 1990)
- ¹³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 44-45.
- ¹⁴ Kenyataannya, kata “idiot” berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “seseorang yang tidak berminat dalam politik”.
- ¹⁵ Carlton Clymer Rodee, dkk., *Op.Cit.*, hal. 13.
- ¹⁶ Alex Inkeles, “Masyarakat”, dalam Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi: Sebuah Bunga Rampai* (Yayasan Obor Indonesia, 1985), hal.205.
- ¹⁷ Theodore A. Couloumbis & James H. Wolfe, *Op. Cit.*, hal. 51.
- ¹⁸ *Ibid.*, hal. 70.
- ¹⁹ Contoh ikatan alamiah ini adalah ikatan yang didasarkan atas keturunan (rabithoh qoumiyah) dan ikatan yang didasarkan atas teritorial tempat lahir (robithoh wathoniyah). Dalam konsep ilmu politik dikenal istilah nation untuk ikatan qoumiyah dan istilah state untuk ikatan wathoniyah.
- ²⁰ Contoh ikatan yang bersifat temporal adalah ikatan yang didasarkan pada kemanfaatan atau kepentingan sesaat.
- ²¹ *Ibid.*, hal 24
- ²² Mark N. Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies: A Comparative Introduction to Political Science* (New York: Longman Inc., 1978), hal. 391.
- ²³ *Ibid.*
- ²⁴ Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, terj. Nurkhalis (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 179.
- ²⁵ Taqyuddin An-Nabhani, 1953, hal. 22
- ²⁶ Hafidz Abdurrahman, *Op. Cit.*
- ²⁷ Hakim Javid Iqbal, “Konsep Negara Dalam Islam”, dalam Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hal. 57.
- ²⁸ Taqyuddin An-Nabhani, *Nidzom Al-Hukm fi Al-Islam*, Daarul Ummah, Beirut, Libanon, Cet. III., 1990, hal. 20.
- ²⁹ *Ibid.*, hal. 17.
- ³⁰ Bahwa negara Islam pertama adalah masyarakat Islam Madinah bisa dilihat dalam Taqyuddin An Nabhani, *Ad Daulah Al Islamiyah* (Beirut, Daarul Ummah, 1994), hal 50-51, Juga dalam Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. Abdul Hayyi' al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Bab I.
- ³¹ Taqyuddin An Nabhani, *Nidzomul Hukmi fil Islam*, hal. 42.
- ³² John C. Raines, “Peace and Justice in Global Perspective”, dalam Azhar Arsyad, *Islam dan Perdamaian Global* (Yogyakarta: Madyan Press, 2002).
- ³³ Ibrahim Ibnu Sulaiman Al Nugaimasy, “Perdamaian Dunia dan Jihad”, dalam *Ibid.*

- ³⁴ Taqyuddin An Nabhani, *Nidzomul Hukmi fil Islam*, hal. 36.
- ³⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, terj. Masrohin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hal. 1.
- ³⁶ Meskipun dengan menunjukkan perbedaannya, Dhiauddin Rais menyamakan istilah bai'at ini dengan kontrak politik, yaitu istilah yang dimunculkan oleh pemikir politik Rousseau dalam bukunya *The Contract Social*. Lihat dalam Dhiauddin Rais, *Op. Cit.*, hal. 166-168.
- ³⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Op. Cit.*
- ³⁸ Hakim Javid Iqbal, *Op. Cit.*, hal. 60.
- ³⁹ Taqyuddin An Nabhani, *Nidzomul Hukmi fil Islam*, hal. 94.
- ⁴⁰ Taqyuddin An Nabhani, *At Takatul Hizbiy*, terj. Zakaria Labib (Mansyurat Hizbut Tahrir, 1953), hal. 4.
- ⁴¹ Edward Mortimer, *Islam dan Kekuasaan*, terj. (Bandung: Mizan, 1984), hal. 116.
- ⁴² H.A.R. Gibb, *Aliran-aliran Modern Dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 180.
- ⁴³ Ismail Djamil, *Islam dan Dunia Modern di Mesir* (Dian Rakjat, cet. II, tt), hal. 8.
- ⁴⁴ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta, UI Press, 1990) hal. 126

Daftar Pustaka

- Eckstein, Harry and David Apter (eds.), *Comparative Politics: A Reader*, New York: Free Press, 1963.
- Haas, Ernst B., *The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950-57*, Standford: Standford Univ. Press, 1958.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Macridis, Roy C. and Bernard E. Brown, *Comparative Politics: Notes and Readings*, terj. Henry Sitanggang, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.
- Mas'oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- An Nabhani, Taqyuddin, *Nidzom Al-Islam*, Mansyurat Hizbut Tahrir, 1953.
- _____, *At Takatul Hizbiy*, Mansyurat Hizbut Tahrir, Tanpa penerbit, 1953.
- _____, *Dukhul Mujtama'*, Terbitan Hizbut Tahrir, 1958.
- _____, *Mafaahim Hizbut Tahrir*, al Quds, 1953.
- _____, *Ad Daulatul Islamiyyah*, Beirut: Daarul Ummah, 1994.
- _____, *Afkarus Siyasiyah*, Beirut: Daarul Ummah, 1994.
- _____, *At Tafkiir*, Kitab Hizbut Tahrir, 1973.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Robert, G.K. & Jill Lovecy, *West European Politics Today*, Manchester Univ. Press, 1984.